

# MOZAIK RISET AKUNTANSI

**Mozaik Riset Akuntansi** adalah buku yang menyajikan kumpulan studi yang menganalisis secara kritis berbagai topik di bidang akuntansi. Buku ini diterbitkan Jurusan Akuntansi FEB Unila menyusul dua buku terdahulu yang berjudul "Akuntansi: Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan Perusahaan dan Pemerintah" dan "Contemporary Accounting Research: A Collection of Accounting Research Reports". Penerbitan buku ini didorong oleh keinginan para peneliti untuk mendesiminasikan pemikiran mereka dalam bentuk karya ilmiah ke masyarakat luas. Konsistensi dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai hasil penelitian empiris di bidang akuntansi adalah salah satu bukti kemapanan jurusan ini dalam mengemban tugas tridarma perguruan tinggi, khususnya darma penelitian. Berbagai topik disajikan, mulai dari masalah lingkungan hingga kinerja yang merugikan perusahaan, dan dari penipuan hingga masalah budaya kerja di perusahaan dan juga lembaga pemerintah. Selain itu, ada pula penelitian yang melakukan perbandingan kinerja perusahaan Indonesia dengan negara lain. Sebuah kajian menarik, yang akan memberikan kepuasan bagi pembacanya. Selamat membaca.

MOZAIK RISET AKUNTANSI

LINDRIANASARI | DEWI SUKMASARI

# MOZAIK RISET AKUNTANSI

LINDRIANASARI | DEWI SUKMASARI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2020



PUSAKA MEDIA

f penerbit pusaka  
✉ pusakamedia@gmail.com  
@pusaka\_media

ISBN 978-623-7500-92-0



9 786237 560920

---

# EVALUASI KEBERADAAN PERUSAHAAN TAMBANG DI PROVINSI LAMPUNG

---

**Lindrianasari**

*Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Lampung, Indonesia*

email: [lindrianasari@feb.unila.ac.id](mailto:lindrianasari@feb.unila.ac.id)

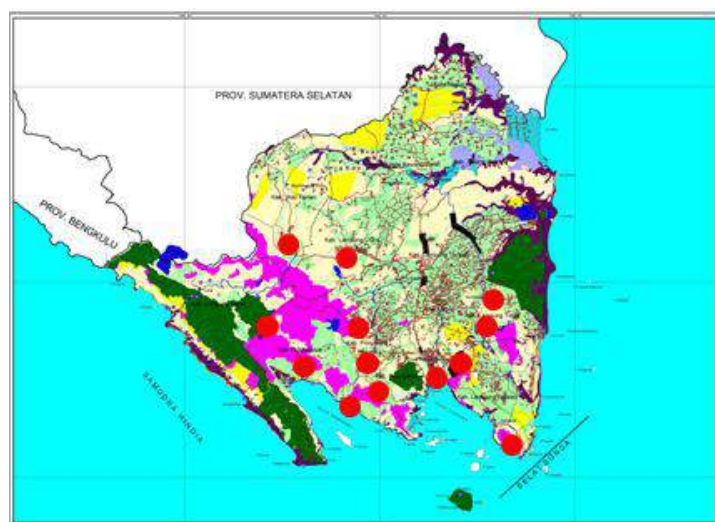
## **ABSTRACT**

This study aims to provide empirical evidence about the benefits of mining in the Lampung region. This survey involved surveyors to obtain data from respondents in several areas in Lampung Province. The survey model aims to obtain data in accordance with the objectives of the study. In addition, through this method data can be obtained quickly because the conditions in the area of mining in the Lampung area are easier. The questionnaire was prepared using simple sentences to avoid saturation of the respondent. Seven variables are measured, First is Governance, Second is mining revenue, Third is living cost, Fourth is environmental cost, measured by environmental quality (pollution free). Fifth is infrastructure improvement; namely the improvement and ease of facilities to support economic activities. Sixth is the impact of other industries, and the seventh is to improve welfare. This study found empirical evidence that the community in the mining company area is strongly influenced by the cost of living, environmental quality, community involvement, infrastructure improvements, the impact of other industries, and community welfare. In general, people in the mining area enjoy the existence of the mine as long as they get additional economic and living costs that they can bear from their involvement in the mine.

**Keywords:** *living cost, environmental quality, community involvement, infrastructure Improving, impact of others industry, public welfare, mining acceptance.*

## I. PENDAHULUAN

Masalah kerusakan lingkungan di daerah pertambangan terjadi di banyak tempat dan negara, terutama di negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah. Sebagai ilustrasinya adalah salah satu tempat yang memiliki banyak lokasi penambangan di Indonesia adalah Provinsi Bengkulu. Sebagaimana yang dilaporkan dari pemantauan citra satelit dan daftar jenis perizinan untuk tambang batubara, setidaknya tahun 2017 terdapat 22 lubang tambang yang ditinggalkan penambang dan tidak direklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana fungsi awal. Lubang-lubang bekas galian usaha tambang dibiarkan menganga. Hal ini membuktikan ketidakhadiran negara dalam pengelolaan pasca tambang dan menunjukkan pengrusakan ekologi yang dilakukan perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan tambang batubara di Bengkulu, hanya 8 perusahaan yang membayar jaminan reklamasi (senilai 2,7 milyar IDR) dan jaminan pascatambang (senilai 4,766 milyar IDR). Sehingga, negara (pemerintah) dan pelaku usaha wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. “Masyarakat atau lembaga lingkungan hidup berhak memperjuangkan hak tersebut. Bahkan, Pasal 66 UU No 32/2009 menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata (sumber: <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>).



**Gambar 1: The spatial layout of the Lampung Province.**

**Sumber: Provinsi Lampung.**



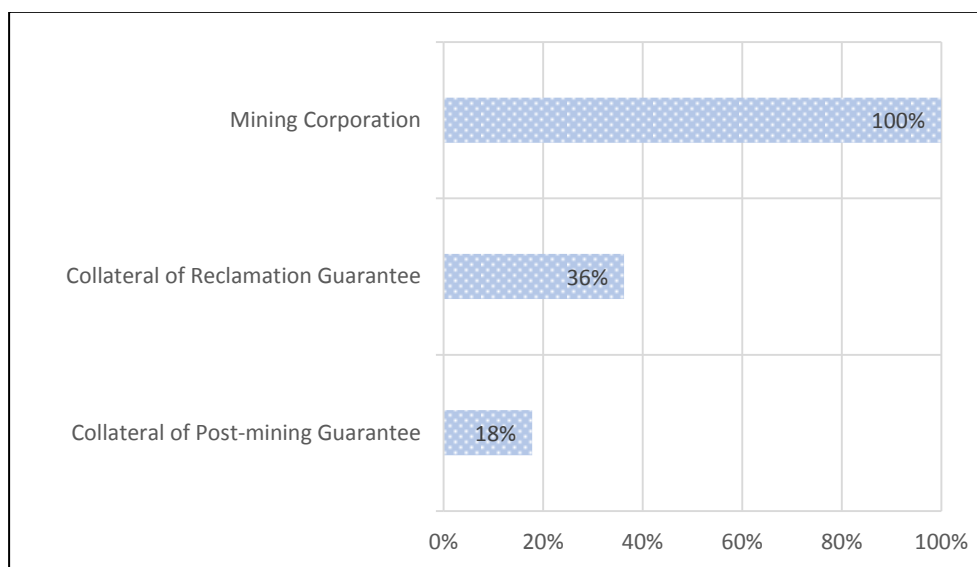
Aturan tata ruang pertambangan Provinsi Lampung telah disusun melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung periode 2017-2037. Lokasi wilayah pertambangan juga sudah ditetapkan seperti pada Gambar 1. Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memnerikan hak atas lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Namun bagaimana realisasi yang terjadi di masyarakat membutuhkan studi yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pada penerimaan masyarakat disekitar pertambangan atas dampak yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan tersebut, yang di nilai dari beberapa karakteristik. *Pertama* adalah Governance, diukur dengan keberadaan aturan dan perundang-undangan yang pemerintah daerah, dapat memastikan perusahaan tambang melakukan kegiatan pertambangan dengan baik dan kemampuan pemerintah dapat menjamin akuntabilitas perusahaan pertambangan. *Kedua* adalah *mining acceptance*, diukur dengan toleransi, accept, agree, dan embrance. *Ketiga* adalah biaya hidup (*living cost*), yaitu berapa besar pengorbanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. *Keempat* adalah biaya lingkungan, diukur dengan kualitas lingkungan (bebas polusi). *Kelima*, peningkatan infrastruktur; yaitu adanya perbaikan dan kemudahan fasilitas dalam menunjang aktifitas perekonomian. *Keenam* adalah dampak industry lain, diukur dengan pertumbuhan sector industry lain. *Ketujuh* adalah peningkatan kesejahteraan, kesejahteraan dan peluang pekerjaan yang lebih besar.

Penelitian ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam menilai pengelolaan lingkungan di daerah pertambangan. Penilaian ini akan memberikan informasi relevan bagi pembuatan kebijakan terkait dengan keberadaan pertambangan. Data jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang yang tercatat di Pemerintah Provinsi dari seluruh perusahaan pertambangan yang aktif di Provinsi Lampung menunjukkan kepatuhan perusahaan pertambangan dalam memenuhi tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan adalah sangat rendah.

Rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk memberikan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Data yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa hanya ada 36% perusahaan

pertambangan dari total sebanyak 168 perusahaan yang membayar jaminan reklamasi. Sementara itu, perusahaan yang membayar jaminan pasca tambang hanya sebesar 18%, dan keseluruhannya berasal dari perusahaan yang juga membayar jaminan reklamasi.



**Gambar 2: Collateral Jaminan Reklamasi dan Pascatambang**

**Sumber: Data dari Provinsi Lampung, 2018.**

Tujuan dialihkannya kewenangan ini ke provinsi adalah untuk mengendalikan konflik yang banyak terjadi ketika hak penguasaan izin pertambangan ada di tangan Kepala Daerah. Saat ini sering terjadi konflik di berbagai dimensi sering terjadi, padahal alasan pemicu konflik tersebut adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa. Pada setiap akhir konflik, masyarakat selalu menjadi korban dan berada dalam kondisi yang dirugikan terutama dalam bentuk kerugian materi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sosial di area lingkungan, sudah lazim menggunakan dua teori ini yaitu teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Kedua teori dapat menjelaskan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

### ***Legitimacy Theory***

Teori-teori yang dapat menjelaskan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan adalah *Legitimacy Theory* dan *Stakeholder Theory*. Legitimasi diperkenalkan Dowling dan Pfeffer (1975), yang menyatakan bahwa legitimasi penting bagi organisasi karena menjelaskan batas penekanan pada norma-norma dan nilai-nilai sosial. Legitimasi juga menjadi respon terhadap pentingnya analisis perilaku organisasi memperhatikan lingkungan. Legitimasi perusahaan dapat diperoleh jika terjadi keseragaman tujuan dan hasil yang diharapkan dari masyarakat dari perusahaan. Mutualisme akan menciptakan harmonisasi dan menghindari tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan aktivitas yang lebih memihak lingkungan sosial sebagai pertanggungjawaban dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat (Deegan dan Tobin, 2002). Untuk tetap mendapatkan legitimasi, perusahaan harus berupaya meningkatkan citra perusahaan (Clarkson *et al.*, 2011) dengan mengkomunikasikan kegiatan lingkungannya dengan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot & Robert, 2011).

### ***Stakeholder Theory***

Secara umum, teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukan entitas yang hanya berkegiatan untuk memenuhi kepentingan perusahaan saja, tetapi juga harus dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan. Teori stakeholder juga menjelaskan bahwa setiap kelompok pemangku kepentingan memiliki dampak yang tidak sama terhadap lingkungan. Penjelasan ini juga mengindikasikan semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan perusahaan sehingga dapat digunakan pengambilan keputusan mereka yang beragam (lihat Lindrianasari *et al.*, 2018; Evana *et al.*, 2020). Ghomi dan Leung (2013) berpendapat bahwa pemangku kepentingan memiliki harapan yang berbeda dari perusahaan. Untuk mengejar harapan ini, para pemangku kepentingan dapat memberikan tekanan pada perusahaan secara langsung atau tidak langsung dalam membuat pengungkapan lingkungan. Untuk menghadapi hal ini, perusahaan dituntut untuk selalu

bekerja sama dengan para pemangku kepentingan sehingga visi perusahaan sejalan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Namun begitu, pemangku kepentingan juga dapat memilih untuk tidak memainkan peranan secara langsung dalam perusahaan (lihat Deegan, 2004).

### **Teori Kepentingan Publik**

Teori kepentingan publik diperkenalkan Arthur C. Pigou dalam bukunya yang berjudul *The Economics of Welfare* tahun 1932 (Hantke-Domas, 2003). Regulasi yang dimaksud di sini mengacu pada tersedianya dan ditegakkannya instrumen hukum, seperti Undang-undang dan aturan pemerintah lainnya. Secara umum, teori kepentingan publik menjelaskan bahwa regulasi memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk kasus pertambangan, teori kepentingan publik menggiring asumsi bahwa instrumen hukum yang dikeluarkan adalah untuk memberikan keseimbangan alokasi sumber daya langka tersebut, untuk semua pihak. Masyarakat yang merupakan powerless stakeholders dan yang tidak boleh terkorbankan dari kegiatan pertambangan. Untuk memberikan perlindungan kepada publik itulah dibutuhkan regulasi.

Tahun 2013, telah terjadi tumpang tindih dalam hal penetapan tarif pungutan pertambangan di Provinsi NAD. Sebagai informasi, berdasarkan rapat paripurna DPR Aceh tanggal 27 Desember 2013, telah disahkan Qanun pungutan tambang di Provinsi NAD sebesar 2,5%-6%. Dengan berlakunya regulasi tersebut, perusahaan-perusahaan tambang wajib membayar pungutan kepada Pemda, sesuai jenis tambang yang dikelolanya. Untuk batubara, kompensasi yang harus dibayarkan berkisar 2,5%-6,6% tergantung dari kalori dan harga jual per ton. Selama ini, tariff untuk jenis alumina adalah sebesar 3,4% dari harga jual, tarif aluminium sebesar 3,4%, tarif bauksit sebesar 4,0%, tarif bijih besi sebesar 3,4%, tarif pasir besi adalah sebesar 4,0%, sponge iron/pig iron sebesar 3,00%, tarif emas sebesar 4,0%, ferronickel sebesar 4,2%, perak sebesar 3,6% pajaknya, tembaga sebesar 4,2%, tarif timah 3,4%, dan tarif zirkonium adalah sebesar 3,0% (<https://setkab.go.id/konflik-tambang-dan-manfaat-dana-desa/>).

Belajar dari NAD, Provinsi Lampung harusnya dapat menghitung berapa pungutan dan berapa nilai jaminan reklamasi dan pasca-tambang yang harus ditagih ke perusahaan pertambang. Jika tidak, perusahaan pertambangan akan mengeksploitasi sumber daya alam Provinsi, tanpa memberikan imbalan yang sepadan untuk pemerintah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan

memberikan jaminan lingkungan hidup yang berkualitas bagi masyarakat. Gambar 2 menunjukkan rendahnya pertanggungjawaban sosial perusahaan pertambangan, khususnya yang terkait dengan perbaikan lingkungan di Provinsi Lampung.

### **Penelitian Terdahulu**

Perusahaan pertambangan adalah jenis perusahaan yang operasionalnya sangat sensitif terhadap lingkungan. Jenis industri ini sangat mudah menghasilkan keuntungan, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Zhang dan Moffat (2015) melakukan studi yang bertujuan untuk menguji bagaimana orang-orang disekitar perusahaan pertambangan mengevaluasi manfaat dan dampak negatif dari pertambangan, dan dari evaluasi ini diperoleh data tentang sejauh mana kegiatan pertambangan di Australia mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan.

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat (termasuk masyarakat adat) adalah bagian yang tak terpisahkan di area pertambangan. Seringnya konflik ini terjadi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat adat pada pemerintah (Akiwumi, 2011). Pusat Tanggung Jawab Sosial dalam Penambangan (CSRSM) juga mengakui bahwa konflik adalah bagian yang melekat dari komunitas pertambangan di seluruh dunia. Selain itu, Bridge (2004) dan Bury (2008) menjelaskan dalam studinya bahwa konflik yang terjadi di wilayah pertambangan terjadi di berbagai unsur masyarakat, pada beberapa skala, mengenai sejumlah masalah; politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Konflik berkepanjangan yang terjadi di area pertambangan salah satunya adalah konflik area pertambangan diamond dan (titanium oxide) di wilayah Sierra Leone. Konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Sierra Leone ini akhirnya berkontribusi pada terbentuknya Revolutionary United Front (RUF) dan perang sipil di Sierra Leone (Akiwumi, 2011). Konflik di area pertambangan menjadi salah satu pusat masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan kunci bagi pembangunan negara, oleh karena itu dampak sektor pertambangan perlu dinilai secara serius (Mazalto, 2009).

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 23 tahun 2014, secara efektif berlaku tahun 2016, pada hakekatnya adalah berpihak kepada kepentingan public (lihat *Public Interest Theory*). Sehingga kebijakan yang mengatur praktik bisnis sudah selayaknya menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kaitannya dengan perusahaan pertambangan, undang-



undangan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Kemp, 2010).

Studi yang dilakukan oleh Zhang dan Moffat (2015) menemukan bahwa peran pemerintah dapat memainkan peranan (memoderasi) dalam penerimaan masyarakat atas dampak kegiatan pertambangan. Literatur yang membahas penilaian dampak khususnya pada penilaian dampak sosial juga menemukan dampak positif dan negatif atas kegiatan pertambangan pada, khususnya di skala kecil (Esteves et al., 2012). Islam (2015: 7) menjelaskan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban social perusahaan dinilai dari kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Boyd and Banzhaf (2007) menjelaskan bahwa penjelasan di dalam *ecosystem services* harus melibatkan biaya lingkungan (*environmental cost*). Penjelasan ini cukup menjadi alasan pentingnya penelitian untuk menilai penerimaan masyarakat disekitar pertambangan atas dampak yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melibatkan pihak Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung. Keterlibatan pemerintah akan sangat mempengaruhi ketercapaian penelitian ini, dikarenakan pihak pemerintah memiliki akses yang mudah untuk bertemu masyarakat di daerah-daerah pertambangan. Selain itu juga, pemerintah juga seyogyanya menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat atas kemungkinan penyimpangan perusahaan pada aturan dan perundangan yang ada. Sehingga, pemerintah memiliki kepentingan untuk pencapaian tujuan penelitian ini.

Survey yang dilakukan bersifat manual (bukan on-line) terkait dengan kondisi masyarakat disekitar perusahaan pertambangan yang mungkin tidak memiliki akses wifi. Kalaupun sekiranya mereka memiliki akses wifi, kepakaran mereka menerima perintah dan mengisi survey online diprediksi tidak sesuai dengan yang diharapkan di penelitian ini. Kuesioner dibangun dengan menggunakan desain penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu (Zhang dan Moffat, 2015), dengan penyesuaian seperlunya. Penyesuaian ini dianggap penting karena kondisi alam dan masyarakat yang berbeda antara Australia dan Indonesia.

Kelompok responden dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan pertambangan. Kelompok kedua adalah pemerintah daerah, di mana perusahaan pertambangan berlokasi. Pertanyaan untuk kedua kelompok

responden tersebut akan difokuskan pada tata kelola pemerintahan terkait dengan pertambangan, dan pendapatan-pendapatan apa saja yang dapat mereka peroleh akibat kegiatan pertambangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Zhang and Moffat (2015). Semua variabel yang digunakan dipenelitian mereka, juga diukur dipenelitian ini, dengan beberapa modifikasi pertanyaan, jika diperlukan. Governance diukur menggunakan dua item pertanyaan yang dikembangkan Cadman and Maraseni (2012), Jepson (2005), dan digunakan Zhang and Moffat (2015). Partisipan diberikan 22 pertanyaan 7-point scale (1= sangat tidak setuju/sangat buruk/sangat tidak memuaskan, 7= sangat setuju/sangat baik/sangat memuaskan). Penerimaan terhadap pertambangan diukur menggunakan 4 item pertanyaan dari Moffat and Zhang (2014): Tolerate/Accept/Approve/Embrace.

Melalui pemerintah daerah, penelitian ini akan menyebar ke masyarakat termasuk masyarakat adat di daerah di mana perusahaan tambang berada. Selain itu, warga di sekitar area penambangan akan sangat menyederhanakan metode survei studi ini. Hingga abad ke-20, masyarakat adat dikeluarkan dari peran penting apa pun dalam pengelolaan lingkungan pengembangan sumber daya untuk tanah tradisional. Oleh karena itu, penelitian terakhir menunjukkan bahwa saat ini masyarakat adat telah berjuang keras untuk membangun peran terhadap lingkungan mereka. Peran ini masyarakat adat mainkan atas dasar bahwa mereka memandang penting untuk memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi tanah leluhur mereka. Dengan demikian identitas, budaya dan masyarakat mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka dengan layak. Di sisi lain, timbul kesadaran bahwa perlindungan atas tanah leluhur mereka tidak dapat dipercayakan kepada pemerintah atau perusahaan dengan begitu saja (lihat O'Faircheallaigh dan Corbett, 2005).

Kuesioner disusun dengan menggunakan kalimat sederhana untuk menghindari kemungkinan pematangan dalam survei yang berkepanjangan. Variabel diukur dalam penelitian ini. Kelompok responden dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Kabupaten / Kota, tempat perusahaan tambang berada, dan juga Provinsi Lampung (variabel pertama). Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan pertambangan (variabel kedua-ketujuh).

Pertama adalah tata kelola, diukur dengan adanya peraturan dan perundang-undangan. Asumsinya adalah bahwa peraturan dan ketentuan ini dapat menjamin akuntabilitas perusahaan pertambangan. Yang kedua adalah

penerimaan pertambangan, diukur dengan toleransi, menerima, menyetujui, dan merangkul. Ketiga adalah hidup, diukur dengan pengorbanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keempat adalah biaya lingkungan, diukur dengan kualitas lingkungan (polusi rendah). Kelima, meningkatkan infrastruktur, diukur dengan peningkatan dan fasilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi. Keenam adalah dampak dari industri lain, diukur dengan pertumbuhan industri, dan ketujuh adalah peningkatan kesejahteraan dan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat.

**Tabel 1**  
**Statistika Deskriptif**

	Mining acceptance	Living Cost	Envi. Quality	Community involvement	Infra-structure	Growth of industrial	Public welfare
	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Average	3.52	4.26	3.15	3.36	3.38	3.09	3.48
StandDev	0.69	0.48	0.96	0.99	0.91	1.30	0.84
Min	2.75	3.67	1.88	2.00	2.00	2.00	2.00
Max	4.75	5.33	4.50	5.00	4.50	5.00	4.50

**Sumber: Data primer, diolah 2020.**

Sebelum mengumpulkan data, tim surveyor diberikan pengetahuan untuk memandu bagaimana mengumpulkan data dan mengapa survei dilakukan oleh tim peneliti. Setiap respon yang diperoleh dari Kabupaten/Kota tidak serupa, tergantung pada perusahaan pertambangan di wilayahnya. Data akhir yang dapat digunakan di dalam penelitian ini adalah sejumlah 78 responden.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai mean dari jawaban responden atas kuesioner penelitian ini menunjukkan nilai yang masuk akal. Nilai mean untuk masing-masing variable penelitian *mining acceptance* sebesar 3,52; *environmental quality* sebesar 3,15; *community involvement* adalah senilai 3,36; *infrastructure improving* sebesar 3,38; mean untuk *impact of others industry* adalah senilai 3,09; dan nilai mean untuk *public welfare* adalah 3,48. Keseluruhan memiliki nilai yang relatif sama, kecuali untuk *living cost* yang memiliki nilai mean yang cenderung tinggi = 4,26.

### Hasil dan penjelasan:

1. Masyarakat akan menolak keberadaan pertambangan ketika kebutuhan hidup semakin tinggi ( $R = -0,531^{**}$ ). Statistika korelasi antara penerimaan pertambangan dengan biaya hidup menunjukkan hubungan yang negative. Temuan ini sekaligus mendikasikan bahwa perusahaan pertambangan perlu memperhatikan elemen-elemen kebutuhan masyarakat disekitar kegiatan pertambangan dilakukan, seperti keberadaan air bersih dan kemudahan serta harga yang relative murah untuk mendapatkan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.
2. Kualitas lingkungan rendah (ditunjukkan dengan buruknya kualitas udara, kebisingan yang tinggi, sampah, kesuburan lahan menurun, kerusakan ekosistem pasca tambang, dan lain-lain), akan mengakibatkan penerimaan masyarakat terhadap perusahaan pertambangan akan semakin denga pula. Statistika menunjukkan nilai korelasi pasitif ( $R = 0,858^{**}$ ). Analisis lainnya menunjukkan bahwa kualitas lingkungan berdampak negatif pada biaya hidup masyarakat ( $R = -0,607^{**}$ ). Artinya adalah semakin rendah kualitas lingkungan, semakin tingginya biaya hidup yang akan dibayar masyarakat.
3. Hubungan antara keterlibatan masyarakat dengan penerimaan perusahaan pertambangan adalah positif ( $R = 0,874^*$ ). Angka ini menindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat pada perusahaan pertambangan, semakin tinggi pula penerimaan mereka atas perusahaan tersebut. Keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan perusahaan pertambangan, akan meningkatkan penghasilan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mampu dan semakin mudah untuk memenuhi biaya hidup. Biaya hidup terasa lebih rendah ketika kemampuan membayar semakin tinggi. Akhirnya, dengan rendahnya biaya hidup, penerimaan masyarakat ke perusahaan pertambangan semakin tinggi ( $R = -0,569^{**}$ ). Keterlibatan masyarakat di dalam pertambangan harus diperhatikan perusahaan. Keterlibatan masyarakat di perusahaan pertambangan dapat sebagai pekerja pertambangan, atau sebagai penyedia kegiatan pendukung perusahaan pertambangan (seperti transportasi, penyedia makanan atau sumber makan, mitra usaha, dan lain sebagainya).
4. Perbaikan jalan yang ada disekitar perusahaan akan mengakibatkan kelancaran proses produksi. Selain itu, masyarakat memperoleh manfaat dari infrastruktur yang dibangun di lingkungan perusahaan. Sesuai

dengan konsep CSR, kepedulian perusahaan pada infrastruktur akan memperoleh simpati masyarakat disekitarnya, sehingga akan memperoleh legitimasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang diprediksi teori legitimasi, di mana hubungan perkembangan infrastruktur berhubungan positif ( $R= 0,875^{**}$ ) dengan penerimaan perusahaan pertambangan. Masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan juga membutuhkan adanya perbaikan infrastruktur, seperti ketersediaan listrik dan jalan utama yang bagus. Sebagaimana kondisi di wilayah desa, ketersediaan listrik masih relatif terbatas. Jika ketersediaan listrik ini sebagian besar diserap kegiatan pertambangan, sudah dapat dipastikan masyarakat akan sering mengalami pemadaman aliran listrik dengan durasi yang lama. Infrastruktur yang tidak berkembang dengan baik akan berdampak pada biaya hidup yang tinggi. Kualitas jalan utama menuju pemukiman masyarakat harus terjaga kualitasnya. Jalan rusak akan menyebabkan pergerakan perekonomian membutuhkan waktu yang relatif panjang, dan akhirnya meningkatkan harga perolehan barang tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa itu semakin buruk infrastruktur, semakin rendah penerimaan terhadap pertambangan ( $R= -0,521^{**}$ ).

5. Hasil uji korelasi antara pertumbuhan industri dan penerimaan perusahaan pertambangan ditemukan positif ( $R= 0,922^{**}$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak industri tumbuh di sekitar perusahaan pertambangan (terlebih jika perusahaan pertambangan yang mendorong pertumbuhan industri baru tersebut), semakin tinggi pula penerimaan masyarakat terhadap perusahaan pertambangan tersebut. Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori stakeholder. Kedua teori tersebut memprediksi bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholdernya. Jika sejalan dengan kepentingan stakeholder maka perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh legitimasi dimasyarakatnya. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan industri menurunkan biaya hidup ( $R= -0,604^{**}$ ). Pertumbuhan industri lain yang ada di sekitar perusahaan pertambangan juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Kehadiran kegiatan pertambangan yang diikuti dengan pertumbuhan kegiatan usaha lain disekitarnya mendindikasikan bahwa kegiatan pertambangan mampu mendorong pertumbuhan



perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Korelasi**

	1	2	3	4	5	6	7
1 Mining_Acceptance	1						
2 Living_Cost	-,531**	1					
3 Environment_Quality	,858**	-,607**	1				
4 Community_Involvement	,874**	-,569**	,688**	1			
5 Infrastucture_Improvement	,875**	-,521**	,714**	,946*	1		
6 Growth_Industry	,922**	-,604**	,900**	,857*	,894**	1	
7 Public_welfare	,759**	-,455**	,445**	,910*	,921**	,712**	1
Mean	3,52	4,26	3,15	3,36	3,38	3,09	3,48
Standard Deviation	0,69	0,48	0,96	0,99	0,91	1,3	0,84

**Sumber: Data primer, diolah 2020.**

6. Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan penerimaan pada perusahaan pertambangan yang ada disekitar mereka ( $R= 0,759^{**}$ ). Secara umum, konsep kesejahteraan masyarakat memang menjadi ukuran utama keberhasilan perekonomian. Hasil penelitian ini juga menemukan adanya korelasi negative antara kesejahteraan masyarakat dengan penerimaan pada perusahaan pertambangan yang ada di daerah mereka ( $R= 0,455^{**}$ ). Kesejahteraan masyarakat yang rendah, akan mendorong sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, ketika biaya hidup semakin terasa berat, semakin rendah pula penerimaan masyarakat terhadap pertambangan.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa penerimaan perusahaan pertambangan sangat kuat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah *living cost*, *evironmental quality*, *community involvement*, *infrastructure Improving*, *impact of others industry*, dan *public welfare*. Semakin menarik ketika dikaitkan dengan peningkatan biaya hidup. Diskusi menjadi lebih tajam dan mendalam karena argumentasi yang diperoleh menjadi lebih logis.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak sejenisnya pertambangan yang menjadi tempat survey di masing-masing Kabupaten/Kota. Tidak sejenisnya usaha pertambangan ini mengakibatkan berbedanya kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, mungkin saja penerimaan masyarakat sedikit berbeda dalam memandang dampak aktivitas pertambangan tersebut.

Implikasi penting penelitian ini adalah perlunya perhatian dari pihak perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan. Karena, penerimaan masyarakat mutlak dibutuhkan perusahaan untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Beberapa keterbatasan penelitian ditemui, terutama ketika tim surveyor ke lapangan untuk mendapatkan responden. Kesulitan untuk mencapai lokasi perusahaan pertambangan dan jadwal riset yang bertepatan dengan situasi wabah COVID-19 menyebabkan rendahnya perolehan responden penelitian ini. Namun begitu, pelaksanaan survey tetap dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.

## Referensi:

- Akiwumi, Fenda A. 2011. Global Incorporation and Local Conflict: Sierra Leonean Mining Regions. *Antipode* 1-18.
- Berthelot and Robert. 2011. Climate change disclosure: An examination of Canadian oil and gas firms. *Issues in Social and Environmental Accounting* 5(1): 106-132.
- Boyd, J. and S. Banzhaf. 2007. What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. *Ecological Economics* 63: 616-626.
- Bridge G. 2004. Contested terrain: Mining and the environment. *Annual Review of Environment and Resources* 29: 205-259
- Bury J. 2008. Transnational corporations and livelihood transformations in the Peruvian Andes: An actor-oriented political ecology. *Human Organization* 67(3): 307-321
- Cadman, T., and Maraseni, T. 2012. The governance of REDD+: an institutional analysis in the Asia Pacific region and beyond. *Journal Environmental Planning Management* 55: 617-635.
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G.D., and Vasvari, F. P. 2011. Does it Really Pay to be Green? Determinants and Consequences of Proactive Environmental Strategies. *Journal Account, Public Policy* 30: 122-144.
- Deegan, C. 2004. Environmental Disclosures and Share Prices—A Discussion about Efforts to Study this Relationship. *Accounting Forum* 28: 87-97.
- Deegan, C., M, R., and J. Tobin. 2002. An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability* 15(3): 312-343.
- Dowling, John and J. Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review* 18(1): 122-136
- Esteves, A.M., D. Franks, and F. Vanclay, 2012. Social impact assessment: the state of the art. *Impact Assess. Project Apprais* 30: 34-42.
- Evana, E., Lindrianasari, H. Ahadis, Y. Asmaranti. 2020. Public acceptance of mining companies in Indonesia. *International Journal of GEOMATE*, 19(72): 159 – 165.
- Ghomi, ZB and P. Leung. 2013. An Empirical Analysis of The Determinants of. *Accounting and Finance Research* 2(1): 110-127.

- Hantke-Domas, Michael. 2003. The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation? *European Journal of Law and Economics* 15(2): 165–194.
- <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>
- Islam, Muhammad Azizul. 2015. *Social Compliance Accounting: Managing Legitimacy in Global Supply Chains*. Springer International Publishing, Switzerland.
- Jepson, P. 2005. Governance and Accountability of environmental NGOs. *Environmental Science Policy* 8: 515–526.
- Kemp, Deanna. 2010. Mining and community development: problems and possibilities of local-level practice. *Community Development Journal* 45(2): 198–218.
- Lindrianasari, M. Kufepaksi, Y. Asmaranti, A. Komalasari. (2018). Social and Environmental Responsibility in Developing Countries: A Theoretical Approach to Regulation. *International Journal of GEOMATE* 15(49): 47–52.
- Marie Mazalto, 2009. Environmental Liability in the Mining Sector: Prospects for Sustainable Development in the Democratic Republic of the Congo. *Mining, Society, and a Sustainable World*. 289–321.
- McKenzie, H. and F., Hoath, A., 2014. The socio-economic impact of mine industry commuting labour force on source communities. *Resources Policy* 42: 45–52.
- Moffat, K., and A. Zhang. 2014. The Path of social license to operate: an integrative model explaining community acceptance of mining. *Resource Policy* 39:61–70.
- O'faircheallaigh, C. and T. Corbett. 2005. Indigenous Participation in Environmental Management of Mining Projects: The Role of Negotiated Agreements. *Environmental Politics* 14(5): 629–647.
- Zhang, A. and K. Moffat. 2015. A balancing act: The role of benefits, impacts and confidence in governance in predicting acceptance of mining in Australia. *Resources Policy* 44: 25–34.

---

# APPLICATION OF PSAK 55 ON RESERVES TO LOSS OF DECREASING FINANCIAL ASSETS IN BANKING INDUSTRIES

---

**Haroida Eka Santri Pakpahan, Lindrianasari, Dewi Sukmasari,  
Fitra Dharma**

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of  
Lampung*

email: [haroidapakpahan13@gmail.com](mailto:haroidapakpahan13@gmail.com)

## ABSTRACT

Instrument of Recognition and Measurement of Allowance for Impairment Losses of Financial Assets in banks listed on Indonesia Stock Exchange. The sampling method used was purposive sampling with a total sample of 5 banks that is BRI, MANDIRI, BCA, BNI and BTN with the highest number of financial assets. This study uses descriptive qualitative research methods with Comparative data analysis techniques on banking financial statements conducted through a comparison of implementation in Banking with PSAK 55 (Recognition and Measurement). The results of the study show that the implementation of PSAK 55 to Allowance for Impairment Losses of Banking Assets is in accordance with applicable standards, that is PSAK 55. In the process of recognition and measurement, banking has been implemented in accordance with applicable standards. Bank can meet the CKPN calculation requirements applied in PSAK 55, but due to different mature of debtors, in its implementation it is difficult for Bank to perform collective calculations.

**Keywords: PSAK 55, Recognition and Measurement, CKPN, Financial Assets.**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK 55 sebagai instrumen Pengakuan dan Pengukuran atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah total sampel sebanyak 5 perbankan yaitu BRI, MANDIRI, BCA, BNI dan BTN dengan jumlah aset keuangan tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Komparatif terhadap laporan keuangan perbankan yang dilakukan melalui perbandingan implementasi di Perbankan dengan PSAK 55 (Pengakuan dan Pengukuran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 55 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan perbankan telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 55. Dalam proses pengakuan dan pengukuran telah diterapkan oleh perbankan sesuai dengan standar yang berlaku. Bank dapat memenuhi syarat perhitungan CKPN yang diterapkan dalam PSAK 55, namun karena jatuh tempo debitur yang berbeda-beda, dalam pelaksanaannya Bank sulit melakukan perhitungan yang bersifat kolektif.

**Kata Kunci: PSAK 55, Pengakuan dan Pengukuran, CKPN, Aset Keuangan.**

## I. INTRODUCTION

Since the Indonesian Accounting Standards Board decided the convergence of Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) to International Financial Reporting Standards (IFRS), which became effective in 2012, the Principles of Indonesian Banking Accounting (PAPI) for bank financial statements follow the applicable SAK. Classification, Recognition, Measurement, Disclosure and Presentation for financial statements, especially for financial assets that generate cash, experience changes and adjustments to the new standards. Financial Accounting Standards (SAK) specifically affecting financial assets are International Accounting Standard (IAS 39) Financial Instrument: Recognition and Measurement, IFRS 7 Financial Instrument: Disclosures and IFRS 9 Financial Instrument. Accounting standards in Indonesia that are used by banks are mainly Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) no. 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK No. 50 Financial Instruments: Presentation and PSAK No. 60 Financial instruments: Disclosures.

In recent developments the Financial Accounting Standards Board (DSAK) has issued Draft Exposures (ED) No. 71 concerning financial instruments to

replace PSAK No. 55 Financial Instruments, where PSAK 55 is one of the main references in the preparation of Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI) 2008 and Accounting Guidelines for Rural Banks (PA-BPR). The main impacts of PSAK 50 and PSAK 55 are in measuring non-performing loans where emphasis on objectivity in determining allowance of impairment losses (Anggraita, 2012; Khotmi and Kiswara, 2015).

In the news article quoted from Kontan.co.id, it was explained that the main difference between the new accounting standards of PSAK 71 and the accounting standard PSAK 55 was in the calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN) previously in PSAK 55, CKPN was formed when a default event had occurred. However, under PSAK 71, CKPNs are formed from the start of the credit given and securities instruments are purchased. According to Armanto (2017), Comparison of financial instruments according to PSAK 55 and ED PSAK 71 is PSAK 55 dividing financial instruments based on management institutions which consist of 4 categories, namely fair value through profit and loss (FVTPL), amortization cost, receivables and loans, available for sale While in ED PSAK 71 divides the categories according to the business model which consists of 3 categories, namely, amortization cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) with recycling, fair value through profit and loss (FVTPL).

One way to reduce losses from bad credit is the actions taken by the bank, namely lowering interest rates, extending the time of sale of assets pledged to customers. Under PSAK 55 both the allowance for impairment losses on assets that are guaranteed has been regulated. Presentation, recognition and measurement are units those are used as a reference for the bank in preparing its financial statements.

The results of the study show that the implementation of PSAK 55 to Allowance for Impairment Losses of Banking Assets is in accordance with applicable standards, that is PSAK 55. Process of recognition and measurement, banking has been implemented in accordance with applicable standards. Bank can meet the CKPN calculation requirements applied in PSAK 55, but due to different mature of debtors, in its implementation it is difficult for Bank to perform collective calculations..

## II. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

### 2.1 Theory

Compliance Theory is an indicator of the level of morality of an individual in terms of compliance with regulations or procedures that apply in general. In this case the compliance theory emphasizes the importance of the socialization process in influencing an individual's compliance behavior. Harahap (2011) states that compliance is one of the factors that play a role in the creation of corporate value so that each company must comply with all applicable rules such as company code of ethics, government regulations, laws, IAI, and others. This theory encourages Banking Companies to report their finances on time.

In connection with the timeliness of financial reporting by companies and banks that are listed on the Indonesia Stock Exchange or Bank Indonesia, the compliance of issuers in reporting financial matters is absolute in fulfilling compliance with the principles of appropriate information disclosure. In the application of PSAK 55 which began to be implemented in January 2012 over time, from the beginning, only four companies were able to implement, at this time all banks applied PSAK 55 financial instruments in their registration and reporting. Wirawan (2011) states that evaluation is a tool of various branches of science to analyze and assess the phenomenon of science and the application of science in the application of science.

### 2.2 Financial Accounting Standards

According to Santoso (2010) Financial Accounting (Financial Accounting) is a process that culminates in the preparation of the company's financial statements in order to make decisions. The first output of financial accounting is financial statements. Financial accounting relates to the problem of recording transactions for a company or organization and the preparation of various periodic reports from these records.

Financial statements are prepared in the public interest and are usually used by the owner of the company to assess the performance of the manager or to be used by the manager as the financial accountability for the shareholders. Martani *et al* (2012) Financial accounting produces financial information about an entity, financial information produced is financial statements. The conclusion of financial accounting is part of accounting that is related to the preparation of financial statements for external parties, such as

shareholders, creditors, suppliers, and the government. The main principle used in financial accounting is the accounting equation:

### **2.2.1 Development of Financial Accounting Standards about Financial Instruments in Indonesia**

Before adopting International Accounting Standard (IAS) 32 and 39 (2009), PSAK 55 (1999) refers to SFAS 115 concerning Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities and SFAS 133 concerning Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities. PSAK 50 (1998) concerning Accounting for certain Securities and PSAK 55 (1999) concerning Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities became effective January 1, 1999. This relates to regulations concerning the measurement and systematic presentation of financial instruments based on fair value issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB). Recognition and Measurement of financial instruments other than guided by PSAK 50 (1998) and PSAK 55 (1999), PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998).

### **2.2.2 PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement**

The Financial Accounting Standards Board has issued a Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 55 (Revised 2014). PSAK 55 concerning financial instruments, namely Recognition and Measurement. The revision of PSAK 55 is the result of adopting all provisions in IAS 39 concerning Recognition and Measurement of Financial Instrument. The issuance of PSAK by the Financial Accounting Standards Board is expected to create a harmonization process for preparing financial statements and encourage market discipline (Widodo, 2013).

### **2.3 Financial Assets**

The financial assets of an entity can be financial assets, tangible assets (tangible assets) and intangible assets (intangible assets), the financial assets of an entity are productive assets that produce cash with other types of assets. Characteristics of different financial assets, for example in form and type, make categories and classifications, recognition and measurements different from the types of assets of other entities.

### **2.3.1 Classification of financial assets**

1. Financial Assets at fair value profit and loss (FVTPL)
2. Held-to-maturity investment (HTM)
3. Loan and Receivables (L & R)
4. Available-for sale financial assets (AFS)

### **2.4 Decreasing the Value of Financial Assets**

According to PSAK 55 (revised 2014) paragraph 59 there are 6 events that cause a decline in value to occur:

1. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
2. Contract violations, such as the occurrence of default or delinquency in principal or interest payments;
3. The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provides relief (concessions) to the borrower, which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
4. There is a possibility that the borrowing party will be declared bankrupt or reorganize another entity; and
5. Loss of active market from financial assets due to financial difficulties.

The observed data indicates a measurable decrease in the estimated future cash flows of the group of financial assets since the initial recognition of the asset, even though the decline has not been identified with individual financial assets in the group of assets.

### **2.5 Establishment of Allowance of Impairment Losses (CKPN)**

According to Ekaputri (2013) Allowance for Impairment Losses is the amount lowered from the carrying value to the amount that can be obtained from the asset. In the Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI, 2008), Allowance for Impairment Losses is allowance that must be formed by banks if there is objective evidence of impairment of financial assets or groups of financial assets as a result of one or more events that occur after initial recognition of the assets and impact on estimating future cash flows.



### **2.5.1 Evaluation Criteria for Allowance for Impairment Losses**

Criteria for evaluating impairment according to the Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI 2008): Individually and Collectively.

### **2.5.2 Techniques for Evaluating Allowance for Impairment Losses**

In PAPI (2008) there are several techniques that can be used to evaluate the decline in value, namely as follows:

1. Banks can use various techniques to evaluate impairment, both individually and collectively;
2. Evaluation of impairment is not only based on a standard approach or method (prescriptive rules / formulae) but also based on experienced credit judgment by parties who have competence and authority considering the experience of historical losses and observable data is limited or possible not fully relevant to current conditions;
3. Individually Banks can use several techniques to evaluate impairment and measure impairment losses; and
4. Collective calculation.

### **2.5.3 Evaluation Period for Allowance of Impairment Losses (CKPN)**

To be able to evaluate the decline in value, we need a period of time, and the evaluation period for impairment is as follows (PAPI, 2008: 186):

1. At the end of each month or at the end of each quarter, banks must evaluate whether there is objective evidence that credit or credit groups experience a decline in value; and
2. In the event that a bank evaluates at the end of each quarter, but there is objective evidence of a decline in value before the next evaluation date, the bank is obliged to estimate the future cash flows and the allowance for impairment losses for the credit.

### III. RESEARCH METHODS

#### 3.1 Research Design

This research is a type of evaluative research. Suharsimi and Arikunto (2014) states that evaluative research is research whose activities collect data or information, to be compared with criteria, then draw conclusions. Evaluative research is a type of research that can be applied to objects if researchers want to know the quality of an activity. This evaluative research requires the requirements that must be met, namely the existence of criteria, benchmarks, or standards, which are used as a comparison for the data obtained, after the data is processed then the results and results are the real conditions of the object under study

The largest portion of financial assets in the banking industry is the loans (credit) given, this study gives special attention to the calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN). In detail, this research can be described as follows:

1. Conduct library research and research journals relating to impairment (impairment) of banking financial assets.
2. Redefine indicators of impairment found in IAS and IFRS and Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).
3. Obtain annual financial reports and accounting policies made by banks.
4. Determine the type of financial assets and criteria in accordance with the provisions contained in IAS 39 (Cash, deposits in orthers entities, receivables, Loans to other entities, Investments in bonds and other debt instruments issued by other entities, investments in shares and other equity instruments issued by other entities).
5. Determine the classification and category of financial assets by looking at whether the financial asset is measured at historical value, amortized cost or fair value in the statement of financial position and whether the loss is recognized immediately in profit or loss or in other comprehensive income. The financial asset categories are classified into: Financial assets at fair value through profit and loss (FVTPL), Held to maturity investments (HTM), Loans and receivables (L & R) and Availbe for sale financial assets (AFS).
6. Obtain a model to determine the calculation of impairment of financial assets.

### **3.2 Population and Samples**

The sample selection is based on Purposive sampling, which is based on the highest total assets in Banking listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample consisted of 5 foreign exchange public banks, namely Bank Rakyat Indonesia (BRI), total assets of Rp1,064.73 trillion, Bank Mandiri total assets of Rp.945.62 trillion, Bank Central Asia (BCA), total assets of Rp.745.04 trillion, Bank Negara Indonesia (BNI) total assets of Rp. 648.57 trillion, and Bank Tabungan Negara (BTN) with total assets of Rp. 258.74 trillion at the end of 2017

### **3.3 Research Approach and Types of Research**

According to Sugiyono (2013) what is meant by research methods is basically a scientific way to obtain data with specific purposes and uses. Research conducted by researchers is a type of qualitative research and descriptive study. Descriptive studies are used because the researcher will describe the recording of financial statements in a banking company with conformity to the Financial Accounting Standards for Financial Instruments (PSAK 55).

### **3.4 Data Sources and Data Collection Techniques**

#### **3.4.1 Data Sources**

The data used in this study is secondary data, which is data available from the source. The data sources used in this study are financial statements both balance sheet and profit and loss, calculation of allowance for impairment losses in 2016-2017 and accounting policies.

#### **3.4.2 Data Collection Techniques**

Data collection techniques used in this study using the documentation method, which is a method of gathering information and data through library study methods and exploration of the literature and financial statements listed on the IDX. Data obtained in the form of financial statements and CALK (Notes to Financial Statements) issued by conventional banking companies in 2016-2017. The data is obtained through the site owned by the IDX, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Literature studies through textbooks, scientific journals and other articles and stationery related to the information needed are also used as sources of data collection.

### 3.5 Data Analysis Techniques

This study uses Comparative data analysis techniques for financial statements of the banking industry listed on the IDX. The author uses the data that has been obtained then compares with existing theories, namely Allowance for Earning Assets Removal (PPAP) and PSAK 55 (Revised 2014) so that the author is able to provide a picture that matches the facts found by the author. According to Ibrahim (2015), data analysis in research is an activity associated with efforts to understand, explain, interpret and look for relationships between the data obtained. The data analysis method used in this study is qualitative analysis.

## IV. RESULTS AND DISCUSSION

### 4.1 Categories, Classification, Recognition and Measurement of Financial Assets

#### 4.1.1. Categories and Classifications

The financial assets of commercial banks mainly consist of cash, current accounts with bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Indonesian banks and other banks, financial assets for trading, acceptances receivables, notes receivable, securities purchased with promises for sale return (with resources agreement), loans (credit) given, consumer financing receivables, net finance lease investments, and securities for investment purposes. The categories and classifications of financial assets of commercial banks that are sampled are basically carried out in accordance with the provisions of PSAK 55 / IAS 39 as shown in table 1.

**Table 1**  
**Categories and Classifications**

Category	BRI	MANDIRI	BCA	BNI	BTN
Measured at fair value through profit or loss	√	√	√	√	√
Available for sale	√	√	√	√	√
Held to maturity	√	√	√	√	√
Loans and receivables	√	√	√	√	√

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

#### 4.1.2. Recognition and Measurement of Financial Assets

Recognition and measurement are also in accordance with the provisions in PSAK 55. Recognition is carried out on a trading date where the bank has a commitment to buy or sell financial assets. At initial recognition, financial assets are measured at fair value plus costs that can be distributed directly to the acquisition of financial assets. Measurement and financial assets after initial recognition depend on the classification of the financial assets. A summary of recognition and measurement of financial assets can be seen in the following table 2.

**Table 2**  
**Recognition and Measurement**

Recognition / Measurement	BR I	MANDIRI	BC A	BNI	BT N
Initial recognition at acquisition date	✓	✓	✓	✓	✓
Measured at fair value and directly attributable costs	✓	✓	✓	✓	✓
Termination of contractual recognition of expired cash flows / transfer / loss of control	✓	✓	✓	✓	✓
Fair value measurement with quotations in active markets and valuation techniques	✓	✓	✓	✓	✓
Reclassification is not permitted except in accordance with PSAK 55 (revision 50-54)	✓	✓	✓	✓	✓

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

Criteria disclosed based on PSAK 55 concerning Recognition and Measurement of CKPN. The following criteria will be described. Table 3 and table 4 shows comparison recognition and measurements of Bank Rakyat Indonesia (BRI).

**Table 3**  
**Comparison of Recognition of CKPN based on PSAK 55 on BRI**

No.	Under PSAK 55	Based on Bank Rakyat Indonesia	Conclusion
1.	Impairment of financial assets recorded at amortized cost is measured using the instrument's original effective interest rate because discounting using applicable market interest rates will have an impact as if the financial asset is measured at fair value rather than based on amortized cost	Impairment of financial assets is recognized as cost using effective interest rates	Corresponding
2.	Calculation of the present value of estimated future cash flows for similar financial assets	Estimated future cash is recognized based on the collateral value less costs incurred in the process of taking over and selling the collateral	Corresponding
3	At each reporting date, the entity evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired	Bank Rakyat Indonesia evaluates objective evidence that financial assets or groups of financial assets experience impairment	Corresponding

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**



**Table 4**  
**Comparison of Measurements of CKPN based on PSAK 55 on BRI**

No.	Under PSAK 55	Based on Bank Rakyat Indonesia	Conclusion
1.	Evaluation of impairment is done individually and collectively	Bank Rakyat Indonesia stipulates that credit must be evaluated for impairment in value individually and collectively in accordance with the criteria met	Corresponding
2.	The basis of measurement in the preparation of these financial statements is the concept of <i>historical cost</i> , except for certain accounts which are prepared on the basis of other measurements as described in the accounting policies of each account.	Bank Rakyat Indonesia determines measurements in the preparation of financial statements using the concept of acquisition costs.	Corresponding
3.	Loans and receivables are as defined in paragraph 7, which are measured at amortized cost using the effective interest method	Financial assets that have been collectively grouped and evaluated are measured based on historical loss of financial assets.	Corresponding

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

#### 4.1.3 Classification of Debtor Quality and Reserve Allowance for Financial Assets in accordance with PBI

Classification of the quality of debtors follows the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) no 14/15 / PBI / 2012 and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) no.15 / 28 / DPNP 2013 and attachment 1 SEBI 15/28/DPNP 2013 concerning Determination of Credit Quality The classification of debtors includes the classification of smooth, special attention, substandard, doubtful and loss. The provisions also regulate the establishment of special and general reserves. The Bank has implemented all of these provisions as in table 5.

**Table 5**  
**Quality of Financial Assets**

No.	Quality of financial assets	BRI	MANDIRI	BCA	BNI	BTN
1	Classification (smooth, special attention, substandard, doubtful, traffic jam)	√	√	√	√	√
2	Determination of the quality of debtors	√	√	√	√	√
3	Making general reserves and special reserves	√	√	√	√	√

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

#### 4.1.4 Calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN) for Financial Assets

The calculation of CKPN required by PSAK 55 / IAS39 can be fulfilled by the bank but in its implementation for the collective calculation the bank has difficulties, because the debtor's maturity is different, there is a time difference between the data identified with the reporting period and the availability of historical data that requires accuracy high data.

**Table 6**  
**Calculation of Financial Assets Impairment Losses (CKPN)**

Item	BRI	MANDIRI	BCA	BNI	BTN
Individual					
Effective interest rates	√	√	√	√	√
Collective					
Migration analysis method and roll rate analysis method	√	√	√	√	√
The estimation for migration analysis method: 9-12 months	-	√	-	-	-
Historical data > 3 years	√	√	√	√	√

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

The calculation of CKPN is based on two calculations, individually and collectively. Based on the table above, individual calculations using effective interest rates have been applied by the five banks. Banking uses a statistical analysis model such as *migration analysis method*, *roll rate analysis method* to assess reserves for impairment losses. To calculate the *Probability of Default (PD)* and *loss of given banking defaults* use historical data of at least 3 years. In *Migration analysis method*, Bank Mandiri determines the estimated period between the occurrence of the event and the identification of losses for each identified portfolio, which is 12 months, except for the micro segment where the estimated period of occurrence and identification of losses is 9 months, while BNI for loans other than bank credit cards applies migration analysis method using 5 years historical data.

#### **4.1.5 Comparison of Allowance for Earning Assets and Allowance for Impairment Losses**

##### **Calculation of Allowance for Earning Assets (PPAP)**

Calculation of Allowance for Earning Assets Removal (PPAP) conducted by banks refers to PBI no. 14/15 / PBI / 2012 concerning valuation of asset quality of Commercial Bank article 42 consists of general reserves, namely 1% of productive assets that have current quality, and special reserves of 5% of quality in special attention, 15% of substandard quality, 50% of doubtful quality

and 100% of the quality of the loss after each is deducted by the value of collateral.

From the comparison results, there is a significant difference between the Allowance for Earning Assets (PPAP) and the Allowance for Impairment Losses (CKPN). The CKPN looks much bigger compared to PPAP. CKPN is formed based on data on incurred loss taken from the previous three years. Significant differences indicate that banks have implemented the formation of CKPN in accordance with the standards.

**Table 7**  
**Comparison of Allowance for Earning Assets and Allowance for Impairment Losses**

<b>Bank name</b>	<b>Number of PPAP 2016</b>	<b>Number of PPAP 2017</b>	<b>Total of CKPN 2016</b>	<b>Number of CKPN 2017</b>
BRI	12,227,490	13,846,049	22.184296	29,423,380
MANDIRI	23,695,026	24,346,240	32,616,760	33,745,345
BCA	8,601,093	9,263,429	11,780,322	12,569,024
BNI	14.166.720	13,206,799	16,680,865	14,523,585
BTN	5,824,475	6,790,032	1,354,863	1,680,625

**Source: Firm's Financial Report, hand-collected, 2019.**

The amount of bank CKPN allowance for the implementation of PSAK 55 is greater than PPAP. The greater the number of CKPN compared to PPAP makes the smaller amount of net credit to be presented because it has been reserved. That can cause fewer total assets in the statement of financial position. In addition, the greater the balance of the CKPN can cause a decrease in the amount of net income in the income statement due to the current allowance for impairment losses.

#### **4.1.6 Discussion**

Classification of Recognition and Measurement of financial assets at BRI, Mandiri, BCA, BNI, BTN banks are mostly in accordance with the revised requirements of PSAK 55 2014. On Recognition Financial assets related to the bank's financial position report point points such as categories measured at fair value through profit and loss, available for sale, held to maturity, and loans and receivables already recognized at initial recognition in accordance with PSAK

55. Then in recognition of the CKPN applied by banks in accordance with PSAK 55. At the point of impairment of financial assets recorded at cost of amortized gains are measured using effective interest rates.

In the measurement category for CKPN applied by banks in accordance with PSAK 55, starting from the evaluation of impairment carried out individually and collectively has been applied by banks. But in the collective calculation, banks experience difficulties due to the maturity of different debtors, differences the time between data that is identified with the reporting period and the availability of historical data that requires high data accuracy. In ED PSAK 71 CKPN will be formed at the beginning of credit recognition given as a reserve based on the Expected Credit Loss methodology which is then termed as expected credit loss (see Witjaksono, 2017).

## **V. CONCLUSION AND SUGGESTIONS**

### **5.1 Conclusions**

This study aims to evaluate the application of PSAK 55 to Reserves for Losses in Declining Value of Financial Assets in banks. This study uses a sample of banks with the highest financial asset value in 2017 consisting of 5 samples of banking companies. Based on the results of the research analysis, it can be concluded as follows:

1. Category, classification, recognition and measurement of the bank samples examined are in accordance with PSAK 55;
2. The requirements of PSAK 55 paragraph 59 concerning the criteria that cause a decline in the value of financial assets have been fulfilled by the bank;
3. Calculation of CKPN required by PSAK 55 can be fulfilled by the Bank but in its implementation for collective calculation, banks experience difficulties, due to different debtor maturities, time differences between data identified and reporting period and availability of historical data that requires data accuracy tall one;
4. There is a difference in the value of the formation of CKPN formed by the Company with the standard applied. The basic difference lies in the method of calculation. Companies in forming CKPN values are based on their collectability. If group 1 CKPN is formed by 1%, if group 2 is 5% if group 3 is 15% if group 4 is 50% if group 5 is 100%. While the formation of PPAP values that are in accordance with the standard are based on historical data related to the related losses seen from the past three years using migration analysis;

5. In calculating the number of CKPN and PPAP banks, the number of CKPNs is greater than PPAP, the greater the number of CKPN compared to PPAP, the smaller the amount of net credit to be presented because it has been reserved. Backup of CKPN that is too large can cause a reduction in fewer total assets in the statement of financial position and a reduction in the amount of net income in the income statement due to the provision for allowance for impairment losses in the current year. The basic difference lies in the way the calculations are made. In PSAK 55, a CKPN is formed that has happened an event default (late debtor pays) resulting in too much backup. In ED PSAK 71 CKPN will be formed at the beginning of credit recognition given as a reserve based on the Expected Credit Loss methodology which is then termed as expected credit loss; and
6. How to improve the formation of a too large CKPN, it can be believed that ED PSAK 71 financial instruments in terms of aspects of credit measurement in the bank's financial statements will be significant, especially in the aspect of forming a Reserve for Impairment Losses in financial assets related to impairments.

## **5.2 Research Limitations**

The limitations of this study are as follows:

1. This study only uses 5 research samples from 43 conventional banking lists listed on the Indonesia Stock Exchange.
2. This study only focuses on one field, namely the Allowance for Impairment Losses, which in fact PSAK 55 has many classifications of financial instruments.

## **5.3 Suggestions**

Based on the results of the study, there are several suggestions that can be considered for further research, namely:

1. It is recommended that further researchers add to the sample of banking research.
2. It is recommended that further researchers examine all financial instrument classifications of PSAK 55 such as hedging instruments.
3. It is recommended that further researchers should directly apply the formula for calculating the Allowance of Impairment Loss (CKPN) by obtaining information directly about the Probability of default and historical loss data of the bank or other types of business.



## REFERENCES

- Anggraita, V. 2012. *Dampak penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan: Peranan mekanisme corporate governance, struktur kepemilikan, dan kualitas audit*, Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2014) Instrumen Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016 *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 Instrumen Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ekaputri, Febriati C. 2013. *Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai*. Jurnal EMBA, Vol.1, No. 3, hal. 207-217.
- Harahap, Sofian Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba empat.
- Khotmi, Herawati dan Kiswara, Endang. 2015. *Evaluasi Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus pada PT. Bank NTB)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 12. No. 3. Hal:333-339.
- Martani, Dwi., Veronica NPS, Sylvia., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria., Tanujaya, Edward. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Berbasis PSAK . Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Suharsimi and Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Team Perumus Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008)*, buku 1 dan buku 2, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia ISBN: 978-979-9020 -31 -4.
- The Global Public Committee, 17 june 2016, "The implementation of IFRS 9 impairment requirements by bank".

Widodo. 2013. *Analisis dampak Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) atas Impairment kredit terhadap industri perbankan*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standarr dan Profesi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Witjaksono, Armanto. 2017 *Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit*. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol, No 1 Juni 2017, hal 35-48.

Kontan.co.id-JAKARTA

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.IFRS.com](http://www.IFRS.com)

---

# FACTOR AFFECTING STOCK RETURN AT BUMN COMPANIES IN INDONESIA

---

**Hasna Athiya Putri, Rindu Rika Gamayuni, Niken Kusumawardani**

Study Program of Accounting, Faculty of Economy and Business,  
University of Lampung

Email: [hasnaathiyaputri@gmail.com](mailto:hasnaathiyaputri@gmail.com)

## ABSTRACT

The study aimed to determine factors that influence stock returns of net income, liabilities, independent commissioners, and foreign ownership. The sample of this study consisted of 16 state- owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2012-2018 period by the use of purposive sampling. Multiple linear regression was used to analyze the data. Other than that, the T- test and F-test were also used to test the hypothesis with 5% level of significance. The study found that partially (T-test), net profit and foreign ownership are the only variables that have a positive effect on stock returns. Then, the simultaneous test (F-test) showed that all independent variables affect stock returns.

**Keyword: Foreign Ownership; Independent Commissioners; Liabilities; Net Profit; Stock Return**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham dari laba bersih, kewajiban, komisaris independen, dan kepemilikan asing. Sampel penelitian ini terdiri dari 16 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2018 dengan menggunakan purposive sampling. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Selain itu, uji-T dan uji-F juga digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Studi ini menemukan bahwa secara parsial (uji-T), laba bersih dan kepemilikan asing adalah satu-satunya variabel yang memiliki efek positif terhadap pengembalian saham. Kemudian, uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi return saham.

**Kata kunci:** *Kepemilikan Asing; Komisaris Independen; Kewajiban; Laba bersih; Pengembalian Saham*

## I. INTRODUCTION

Investors' aim in investing in Investors' purpose of investing in the capital market is to get a return. But getting a return from the investment in the capital market is not easy, because the risk is equivalent to the return that will be obtained. This is because the benefits derived from the investments are directly proportional to the risks to be received. The greater the profit, the greater the risk that will be borne by investors. Thus, the feeling of security in investing is very necessary. In order to make investors feel safe to invest, they are required to be able to measure the risk and estimate the income they will earn.

Companies' information is needed by investors as a consideration for making decisions in capital market activities. Investors need this information to estimate the benefits to be gained and reduce the possibility of risk or uncertainty they will face (Scott, 2015). State-Owned Enterprises (BUMN) included a category of companies on the Indonesia Stock Exchange (BEI) that control vital sectors for the lives of many people. According to Law No. 19 of 2003, BUMN is a business entity whose entire or most of its capital is owned by the state through direct investment from separated state assets. At the time investors are going to make an investment, certainly, they will choose a trusted company that provides profits to them.

State-Owned Enterprises (BUMN) is expected to be able to make valuable contributions to all stakeholders. The implementation of the BUMN role is realized in business activities in almost all economic sectors such as

manufacturing, mining, finance, telecommunications, transportation, electricity, industry, trade, and construction (Rahmawati et al., 2014). According to the Secretary of the Ministry of BUMN, Imam A. Putro said that as many as 24 companies in 2017 experienced a loss whose value reached Rp 5.852 trillion, which is higher than in 2016 where the total loss reached Rp 5.826 trillion.

The losses suffered by BUMN greatly affect the valuation of the stock market. As in PT Indofarma Tbk (INAF), shares dropped by 45.94%. Other than that, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) shares declined by 41, 04%. BUMN, in carrying out its activities, is reflected in one of the performance measurement tools, namely financial statements that show the financial performance of BUMN in each year. It means that related information about financial statements will influence investors' decisions in the capital market. As an appraiser of the company's financial statements that are often seen are net income and liabilities. Net income and liabilities are components in the financial statements that must be considered because they are often used as manipulation practices by the company (Dimitropoulos and Asteriou, 2009).

**Table 1.1**  
**List of BUMN Companies that Suffered Losses**

NO	Company Name
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
2	Perum Bulog
2	PT Indofarma (Persero)
3	PT Energy Management Indonesia (Persero)
4	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
5	PT Indofarma (Persero)
6	PT Pos Indonesia (Persero)
7	Perum PFN
8	PT Aneka Tambang (Persero)
9	PT Balai Pustaka (Persero)
10	PT PAL Indonesia (Persero)
11	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
12	PT Krakatau Steel (Persero)
13	PT Boma Bisma Indra (Persero)
14	PT INTI (Persero)

15	PT Dirgantara Indonesia
16	PT Amarta Karya (Persero)
17	PT PDI Pulau Batam (Persero)
18	Perum Damri
19	PT Garuda Indonesia (Persero)
20	PT Danareksa (Persero)
21	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
22	PT Iglas (Persero)
23	PT Istaka Karya (Persero)
24	PT Berdikari (Persero)

**Source: PB FEMMI in [www.pojoksatu.id](http://www.pojoksatu.id)**

BUMN performance has not been optimal due to the weak oversight so that the principles of Good Corporate Governance (GCG) have not been fully implemented in all BUMN companies even though it has been clarified in Minister of BUMN Decree No. PER- 01/MBU/2011 concerning on the Implementation of Good Governance in BUMN ([www.detik.com](http://www.detik.com)). According to Oemar (2014), BUMN performance has not been optimal due to the inefficient use of capital and the lack of attention to the application of the principles of Good Corporate Governance. While the other factors are that the funding through excessive debt and increasing business competition, companies are competing to generate high profits so that they do everything that will lead to the low performance of BUMN which will affect investors' valuation in investing their shares.

Net profit contained in the income statement can describe company's performance and ability in providing returns from the investments with the amount of funds that have been used. The success of a company can be seen from the profits generated each year. If the company generates high profits, it can be interpreted that the company is able to provide large dividends for investors. Therefore, investors will be interested in investing because basically investors want to get high returns (Hery, 2013). Research results from Trisnawati and Wahidahwati (2013), Putriani and Sukartha (2014), Kurniawan and Yuli awati (2013), Meythi and Hartono (2012), Febrianto and Widiastuty (2006) and Ismail (2006) revealed that net income had a significant positive influence on stock returns . However, different results revealed by Dimitropoulus and Asteriou (2009) that earnings do not affect stock returns .



Aside from net profit information, other information needed is liabilities. In certain condition, a company can fulfill their funding needs by using internal funds sources. Along with the company's growth, the greater funding is needed. In this condition, company needs to fulfill their funding from the external sources of funding, namely liability or debt. Liabilities or debts are all company financial obligations to other parties that have not been fulfilled where the debt is a source of funds or company capital that comes from outside parties or creditors (Sjahrial, 2011). According to Sugiarto (2011) the use of debt for a company resulted in risks that will later be borne by shareholders. When the amount of the debt increases, it will reduce the company's ability to fulfill all of their obligations and then subsequently resulted in a decrease in the company's stock return. This result is supported by research conducted by Gunadi and Kesuma (2015), Arista and Astohar (2012), Sakti (2010) and Astohar (2010) that debt negatively affects stock returns. However, different results revealed by Dermansyah (2014) that debt has no effect on stock prices.

Other factors that need attention are the company's performance. Good corporate governance is an assessment of financial performance that contains a set of regulations governing the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other stakeholders, so that all of the rights and obligations are balanced (Widoatmodjo, 2015). The company's performance is expected to improve the quality of financial statements which ultimately increases the confidence of users of financial statements including investors. The trust obtained from the market is expected to maximize the level of shareholder or company's owner prosperity, determine the amount of remuneration, determine stock prices and returns , and assess the company's performance to predict the future state of the company for shareholders and prospective shareholders ( Tertius and Christiawan, 2015) . In this study, good corporate governance is represented by independent commissioners and foreign ownership. Research from Muryati and Suardhika (2014) about the effect of good corporate governance showed that the independent commissioner variable influences the value of the company which will have an impact on stock prices and affect stock returns. This result is supported by research that is carried out by Putra (2015), Widayati (2013), and Purwatini (2011) which found that the independent commissioner variable influences stock returns . On the other hand, different results were found in the research of Ramdiani and Yadnyana (2013) and Arisanti (2019). These research resulted that the independent commissioner variable did not

affect the stock price. According to Chen et al. (2013), partially foreign ownership has a significant positive effect on changes in stock returns . This result is supported by research from Astuti (2014), Wiranata and Nugrahanti (2013), Kumar et al. (2001), Chen (2008), Gul (2010) and Wen (2013). However, different results are shown by Irawan and Murhadi (2012) research that foreign ownership has no effect on stock returns.

## II. LITERATUR REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

### **Stock Return**

According to Jogiyanto (2014), returns are the results obtained from investments made in companies. Return might be reflected as a return realization which has been occurred and might be reflected as return expectation that has not happened yet but expected in the future. Return realization is the return that has occurred and is being calculated by the use of historical prices. Return realization is considered important because it is used as a basis for determining return expectations and risks that might occur in the future. Stock return, according to Widoatmodjo (2015), is the rate of return obtained by investors on the investments made. Thus, without any benefits that can be received from its investments, investors will not want to invest. Return is important in determining investment. Assessment of the return received must be analyzed through analysis of the return received in the previous period (historical return). The analysis' results then being used to analyze the expected return.

### **Net profit**

Kieso et al. (2014) revealed that net income is the net result of the company's performance which has been reduced by all existing expenses including taxes. Net results are often said as net income when the income was greater than the expenses. Hery (2013) said that net profit or loss is the profit or loss that coming from the continuing operations that is added or subtracted by operations that are terminated and deducted by extraordinary losses. It all are giving the user of a financial statement a summary of the company's overall performance over a certain period (either originating from continuing operations or not). So it can be concluded that net income comes from transactions of income, expenses, profits and losses. Profit is generated from the difference between incoming resources (income and finance) and outgoing resources (expenses and losses) for a certain period of time.

## **The Liability**

According to Samryn (2011), liability is an obligation that still has to be paid off to a third party. Rahmانيar and Soegijanto (2016) stated that it is the obligation to pay an amount of money at the agreed time. Liabilities or debt are all of the company's money obligations to other parties that have not been fulfilled where the debt is a source of funds or company capital that comes from creditors. According to Samryn (2011) liability is grouped into:

### **1. Current Liabilities (Short-term liabilities)**

Current liabilities or current debts (short-term debts) are liabilities which are paid in full using current assets. The period used in settling current debts is between one year or one company operations' cycle. The company classifies current liability into non-current if the company is interested in refinancing with long-term sources and can demonstrate its ability to do so. This type of liability includes trade payables, money orders, taxes, accrued expenses, long-term debt that will soon be due and income received in advance.

### **2. Long- term Liabilities**

Long-term liability is an obligation that has a maturity of more than one year or one operation's cycle. This liability includes bond debt, mortgage debt and other long-term loan liability .

## **Independent Commissioner**

Independent commissioners are members of the commissioners board who are not affiliated with directors, other members of the commissioners board, and controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that can affect their ability to act independently or act solely in the interests of the company (Arisanti, 2019)

. Independent Commissioner should encourage the implementation of the principles and practices of good corporate governance ( GCG ) at the company in Indonesia. The objective of the independent commissioner is to guarantee the disclosure of the company's financial statements, to treat them fairly with minority shareholders and other stakeholders. Independent commissioner has the primary responsibility to promote the implementation of the principles of good corporate governance ( GCG ) in the company through the empowerment of the board of commissioners in order to be able to perform the task of monitoring and providing advice to the board of directors effective and provide added value for the company (Arisanti, 2019).

## **Foreign Ownership**

Foreign ownership is the number of shares owned by foreign parties (Irawan & Murhadi, 2012). There are several reasons for companies that have foreign share ownership to disclose more than those who do not. The first reason is because foreign companies get better training in accounting from parent companies abroad. The two companies may have more efficient information systems to meet internal needs and the needs of the parent company. Third is the possibility of greater demand for foreign-based companies from customers, suppliers and the general public (Gul, 2010).

## **State-owned Enterprises (BUMN)**

State-Owned Enterprises (BUMN) are business entities that contain two essential elements; the Government (*public*) and business (*enterprise*). Thus, BUMN is one of public sectors that have special characteristics that are not owned by other public institutions, that is the nature of flexibility and initiative that can also play a role as a private company (Avianti, 2006). BUMN themselves have different forms based on their functions and the amount of share ownership from the Government. Therefore, in Law No. 19 of 2003 concerning BUMN stated there are 2 forms of BUMN, those are:

1. Persero is a state-owned company in the form of a limited liability company whose capital is divided into shares which are all or at least 51% (fifty one percent) of its shares owned by the Republic of Indonesia whose main purpose is to pursue profit.
2. Public Company is a state - owned enterprise whose entire capital is owned by the state and is not divided into shares, aiming at public benefit in the form of providing high quality goods and or services and at the same time pursuing profits based on the principle of company management.

## **Hypothesis Development**

### **Effect of Net Profit on Stock Returns**

The increased of net profit provides important information to the investors and potential investors that the company has more ability in investing in the future (Subramanyam, 2013). An increase in net profit provides information to investors that the investment has increased. The increase indicates the ability of companies to provide higher stock returns and the market will respond to it (Husnan, 2009). Trisnawati and Wahidahwati (2013)

found the evidence that net profit has an influence to stock returns . The same research results obtained by Putriani and Sukartha (2014), Kurniawan and Yuliawati (2013), Meythi and Hartono (2013), Febrianto and Widiastuty (2006) and Ismail (2006) that net profit has a positive effect on returns stock. Based on the explanation that has been presented, the hypotheses in this study are:

*H 1 : Net income has a positive effect on stock returns.*

### **Effect of Liabilities on stock returns**

Managers can use liabilities which later can act as a sign that the company is more trusted. However, too high liabilities indicate the greater dependence of the company on external parties (creditors) so that the risk level of the company is greater as well. The use of liabilities for a company will result in increased risk borne by shareholders. When the amount of debt increases, it will reduce the company's ability to fulfill all its obligations and then subsequently result in a decrease in the company's stock return (Raningsih & Putra, 2015). It is in line with Gunadi and Kesuma (2015), Arista and Astohar (2012) and Sugiarto (2011) research results that liabilities negatively affects stock returns. It was explained that increasing debt to equity ratio had an impact on the decreasing of stock returns. Similar results were also obtained by Sakti (2010) and Astohar (2010) that liabilities negatively affect stock returns because investors still consider the company to be safe if the composition of debt to own capital is within reasonable limits. Based on the explanation that has been presented, the hypotheses in this study are:

*H 2: Liabilities negatively affect stock returns.*

### **Effect of Independent Commissioner on stock returns**

The existence of many independent directors in the company will increase supervision of directors on behalf of the company's management. The high independence in the company through the existence of an independent commissioner will create appropriate and independent company decisions. The presence of an independent commissioner will guarantee management in preparing and submitting financial statements in a timely manner so that the information presented is credible and can be relied on by stakeholders (Saputra, 2016). Effective supervision of a company is thought to increase investor interest in buying company's shares. Studies from Putra (2015), Widyati (2013), and Purwatini (2011) concluded that the size of the independent board of

commissioners had a positive effect on company performance which affected the stock price so that it affected stock returns. Based on the explanation above, the hypotheses in this study are:

*H 3 = Independent commissioner has a positive effect on stock return*

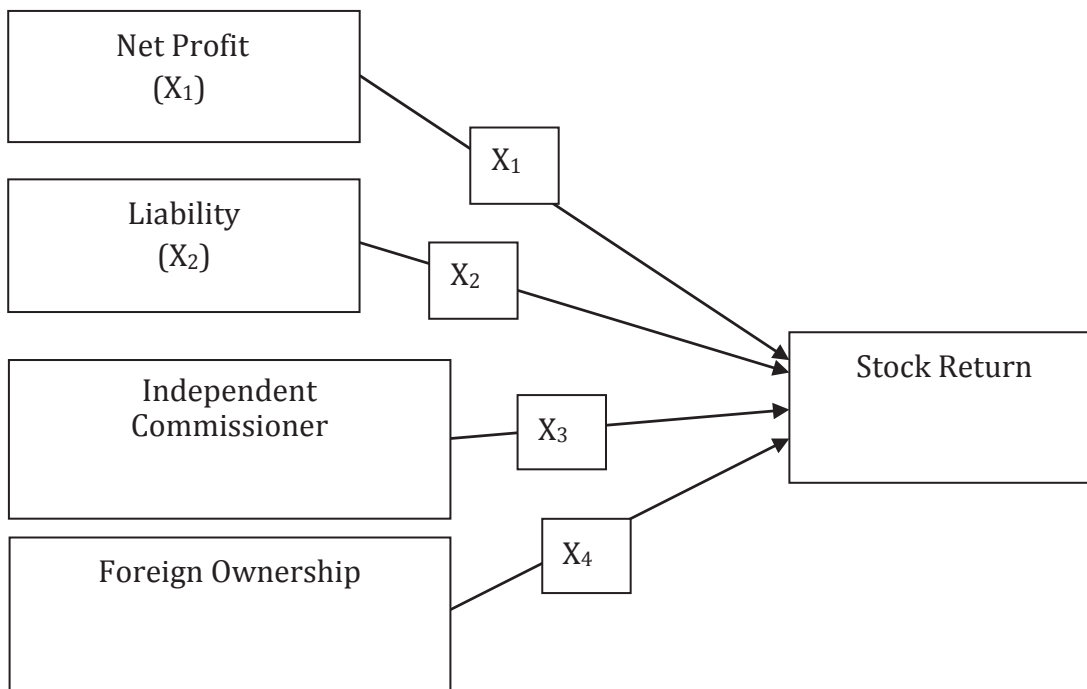
### **Effect of Foreign Ownership on stock returns**

Foreign ownership in a company, both institutional and individual, is considered as an important thing. This is because the purchase of shares by foreign parties gives a signal that the company is experiencing stable revenue growth. Then it becomes a benchmark for other investors to investing in the company as well. Foreign investors are believed to be able to estimate stock returns and indirectly increase supervision of the company, so that the company will has a satisfying performance (Irawan and Murhadi, 2012). This is in accordance with the research result of Chen *et al.* (2013) with the title *Does foreign institutional ownership increase return volatility? Evidence from China* found that partial foreign ownership has a significantly positive effect on the volatility of returns stock. The same research results were also shown by Astuti (2014), Wiranata and Nugrahanti (2013), Kumar *et al.* (2001), Chen (2008), Gul (2010) and Wen (2013) that foreign ownership has a positive effect on company performance so that investors can estimate the stock returns they will receive if invest in the company. Based on the description, the hypotheses proposed in this study are as follows:

*H 4 : Foreign ownership has a positive effect on stock returns*



**Figure 1**  
**Framework**



### III. RESEARCH METHODS

#### Data Types and Sources

This study used secondary data types or indirect data, namely annual reports of BUMN companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2012 - 2018. It was obtained through the website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and each company's official website.

#### Population and Sample

The population used in this study is all BUMN companies from 2012 to 2018 which are listed on the Indonesia Stock Exchange. Purposive sampling method was used in the study by determining several sample selection criteria:

- BUMN companies listed in the Stock Exchange Indonesia 2012 - 2018.
- State-owned companies which disclose annual reports in a row during the study period are 2012 - 2018.
- BUMN companies that do not suffer during the study period the year 2012 - 2018

### **Measurement of Independent Variabel Variable (X) Net Profit**

In this study using a measurement of changes in net income. Net profit indicators used in this study are:

$$\Delta \text{Laba Bersih} = \frac{\text{Net Profit (t)} - \text{Net Profit (t - 1)}}{\text{Net Profit (t - 1)}}$$

Information:

$\Delta$ Net profit : Changes of profit Net profit (t) : Net profit in year(t)

Net profit (t-1): Net profit before(t)

### **The Liability**

The measurements on the variables were used *Debt Equity Ratio* to see the level of the use of the debt to equity owned by the company.

The indicators of the liability used in this study are:

$$\text{Liability} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

### **Independent Commissioner**

Indicators for measuring independent commis are:

$$\text{Independent Commissioner} = \frac{\text{Total Independent Commissioner}}{\text{Total Company Commissioner}}$$

### **Foreign Ownership**

Indicators for measuring foreign ownership are:

Foreign Ownership = Total Foreign Shares x Closing Stock Price

### **Dependent Variabel (Y) Stock Return**

$$\text{Stock Return} = \frac{\text{Pt} - (\text{Pt} - 1)}{(\text{Pt} - 1)}$$

The measurement of stock returns in this study used a ratio scale that can be calculated with the following indicators:

Information :

Pt = Current year's stock price Pt - 1 = Stock price 1 year before

## Data Analysis Method

To manage secondary data obtained, the authors use the help of SPSS 21 software. Data processing activities with SPSS 21 are used to conduct testing with multiple linear regression analysis. The analysis method used in this study consists of:

## Descriptive Statistical Analysis

Descriptive statistics are used to describe the variables in the study. The variables examined in this study are the net income, liabilities and good corporate governance represented by variable independent commissioner and foreign ownership. Description of the variable is presented to find out the mean, minimum, maximum and standard deviation of the variables studied.

## Classic assumption test

As an analysis tool, this study used multiple linear regression models so it must pass the classic assumption test so that the assumptions in the regression conditions are fulfilled (Ghozali, 2013). The classic assumption test was used to see the results of the regression estimation which were free from symptoms of normality, multicollinearity, heterokedaticity, and autocorrelation.

## Multiple Linear Regression Analysis

Multiple regression analysis is the relation between two or more independent variables with the dependent variable. The purpose of multiple regression analysis is to find out the direction of the relation between the independent and dependent variables, whether each independent variable is positively or negatively related. It also needed to predict the value of the dependent variable if the value of the independent variable has increased or decreased.

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Information:

Y = Stock return

a = Constanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Regression coefficient

$X_1$  = Net Profit

$X_2$  = Liability

$X_3$	= Independent Commissioner
$X_4$	= Foreign Ownership
$e$	= Error term

### **R<sup>2</sup> Determination Coefficient Test**

The coefficient determination ( $R^2$ ) were assessed to measure how large a proportion of the influence of all independent variables on the dependent variable. The coefficient of determination is between zero and one. The smaller the value of  $R^2$ , the more limited the ability of independent variables in explaining the dependent variable (Ghozali, 2013).

### **Feasibility Test Regression Model (Statistical Test F)**

Simultaneous significant test or F-test can be done by looking at the significant F value on the output of the regression results with a significance level of 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). F-test is used to test whether all independent variables included in the regression model have a joint (simultaneous) effect on the dependent variable or not (Ghozali, 2013). The testing criteria (Test F) are as follows:

- $H_a$  is rejected if the significant value  $F > 0.05$  which means that the regression model in this study is not suitable to be used in the study.
- $H_a$  is accepted if the significant value  $F < 0.05$  which means that the regression model in this study is suitable to be used in research.

### **Significance Test of Individual Parameters (Statistical Test t)**

Testing the significance of these individual parameters was used to determine whether the independent variables individually affect the dependent variable with the assumption that other independent variables are constant (Ghozali, 2013). The hypothesis testing criteria are as follows:

- $H_a$  is rejected, if the probability value  $t > 0.05$  or if the probability value is more than  $\alpha 0.05$ , it means that the independent variable individually independently has no effect on the dependent variable.
- $H_a$  is accepted, that is if the probability value  $t < 0.05$  or if the probability value is less than or equal to  $\alpha 0.05$ , it means that the independent variable individually influences the dependent variable.

#### IV. RESULT AND DISCUSSION

##### Descriptive Statistical Analysis

Descriptive statistics in this study were used to provide a description of the research variables. The following is the output table of the descriptive statistical test which shows that the amount of data in this study was 77.

**Table 4.1 Descriptive Statistics Result**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laba Bersih	77	-,4613	,7307	,122073	,2542391
Liabilitas	77	,0770	11,3958	2,880610	2,9854253
Komisaris Independen	77	,1667	,7143	,396253	,0984075
Kepemilikan Asing	77	6333542250 0	85078654497 900	1426216731 5773,73	213403891890 81,090
Return Saham	77	-,6839	,7919	,034173	,3264515
Valid N (listwise )	77				

##### Classical Assumption Test Normality Test

**Table 4.2 Normality Test Result  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
	N	77
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30950200
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,052
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Based on Table 4.2 that the number of the data was becoming 77 because it has eliminated *outlier data* so Asymp values are obtained. Sig . (2-tailed) of 0.200 which is more than 0.05. So it can be concluded that the data are normally distributed.

## Multicollinearity Test

**Table 4.3 Multicollinearity Test Result Coefficients<sup>a</sup>**

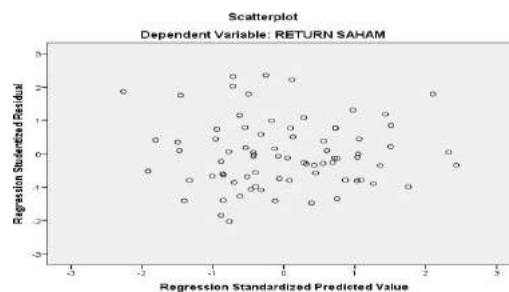
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,110	,157		-,703	,484		
Laba Bersih	,294	,131	,267	2,249	,028	,871	1,148
Liabilitas	,004	,009	,055	,453	,652	,825	1,212
Komisaris	,062	,298	,025	,208	,836	,872	1,147
Independen							
Kepemilikan Asing	3,338	,000	,290	2,425	,018	,857	1,167

a. Dependent Variable: Stock Return

According to Table 4.3, it is known that the tolerance value of all independent variables was greater than 0.10 and the VIF value was less than 10 which means that the model does not contain multicollinearity problems or the assumption that there is no multicollinearity in the model was fulfilled.

## Heteroscedasticity Test

**Figure 4.1**



Sumber : SPSS 21

Based on Figure 4.1, it can be seen that there were no clear patterns and points spread randomly above and below the number 0 on the Y axis. Thus, it can be concluded that there was no heterokedasticity in the data used in this study.

### Autocorrelation Test

**Table 4.4 Autocorrelation Test Result Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,04804
Cases < Test Value	38
Cases >= Test Value	38
Total Cases	76
Number of Runs	39
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Based on Table 4.4, the Asymp value . Sig . 1,000 for meaning greater than 0.05. Thus it can be concluded that no autocorrelation symptoms occur.

### Multiple Regression Analysis

**Table 4.5  
Multiple Regression Analysis Result Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-,110	,157		-,703	,484
	Laba Bersih	,294	,131	,267	2,249	,028
	Liabilitas	,004	,009	,055	,453	,652
	Komisaris Independen	,062	,298	,025	,208	,836
	Kepemilikan Asing	3,338	,000	,290	2,425	,018

a. Dependent Variable: Stock Return



Based on Table 4.5, the regression equation in this study is as follows:  
 $Stock\ Return = (-0,110) + 0,294\ Net\ Profit + 0.004\ Liabilities + 0.062\ Independent\ Commissioner + 3,338\ Foreign\ Ownership + e$

The regression equation above showed that the value of the constant of -0.110, which means that if all variables remain, the great value of the dependent variable (*stock return*) amounted to - 0.110 units. The value of net profit showed a positive direction with a beta coefficient of 0.294, which means that if net income increased 1% then the *return* of the stock will increase 0.294. The value of the liability shows a positive direction with a beta coefficient of 0.004 which means that if the liability has increased 1% then the *stock return* will increase 0.004. The value of the independent commissioner shows a positive direction with a beta coefficient of 0.062, which means that if the independent commissioner has increased 1% then the *stock return* will increase by 0.062. The value of salty ownership g shows a positive direction with a beta coefficient of 3.338 which means that if foreign ownership increases by 1% then *stock returns* will increase by 3.338.

### Hypothesis Testing Determination Coefficient Test

**Table 4.6 Determination Coefficient Test Result Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,361 <sup>a</sup>	,130	,081	,2943	1,943

- a. Predictors: (Constant), net profit, liabilities, independent commissioners, foreign ownership
- b. Dependent Variable: Stock Return

Based on Table 4.6, the Adjusted R Square value of 0.081, which means that the variable of net profit, liabilities, independent commissioners and foreign ownership as an independent variable was able to explain the *stock return* variable as a dependent variable of 8.1% and the rest is influenced by other variables not examined.

## Feasibility Test Regression Model (Statistical Test F)

**Table 4.7**  
**Feasibility Test Regression Model Result ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,920	4	,230	2,654	,040 <sup>b</sup>
	Residual	6,151	71	,087		
	Total	7,071	75			

a. Dependent Variable: Stock Return

b. Predictors: (Constant), net profit, liabilities, independent commissioners, foreign ownership

Based on Table 4.7 the calculated F value of 2.654 with a significance value of 0.040. Significant value of  $0.040 < 0.05$ , it can be concluded that the regression model of all variables in this study, namely net income, liabilities, independent commissioners and foreign ownership together affect the dependent variable, namely stock returns.

## Significance Test of Individual Parameters (Statistical Test t)

**Table 4.8 Hypothesis Testing Result Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,110	,157		-,703	,484
Laba Bersih	,294	,131	,267	2,249	,028
Liabilitas	,004	,009	,055	,453	,652
Komisaris Independen	,062	,298	,025	,208	,836
Kepemilikan Asing	3,338	,000	,290	2,425	,018

a. Dependent Variable: Stock Return

Based on Table 4.8, it can be seen that:

- a. The net income variable has a positive direction with a significance value of 0.028 which means it is greater than 0.05 ( $0.028 > 0.05$ ). Thus it can be concluded that net income has a positive effect on stock returns. (H 1 supported).
- b. The liability variable has a positive direction with a significance value of 0.652 which means it is greater than 0.05 ( $0.652 > 0.05$ ). Thus it can be concluded that liabilities have no effect on stock returns. (H 2 is not supported).
- c. The independent commissioner variable has a positive direction with a significance value of 0.836 which means it is greater than 0.05 ( $0.836 > 0.05$ ). Thus it can be concluded that the independent commissioner has no influence on stock returns. (H 3 is not supported).
- d. The foreign ownership variable has a positive direction with a significance value of 0.018, which means it is smaller than 0.05 ( $0.018 < 0.05$ ). Thus it can be concluded that foreign ownership has a positive influence on stock returns. (H 4 supported).

## Hypothesis Discussion

### The Effect of Net Profit toward Stock Returns

Based on the results of the hypothesis testing in Table 4.8 can be reflected that the hypothesis, which stated that "net profit had a positive effect on stock returns", in this research is supported. From the results of this study it can be said that net income is a predictor that can affect stock returns in a company. It is in line with previous research conducted by Trisnawati and Wahidahwati (2013), Putriani and Sukartha (2014), Kurniawan and Yuliahwati (2013), Meythi and Hartono (2012), Febrianto and Widiastuty (2006) and Ismail (2006) who stated that net income affect stock return. This means that this study supports the results of several research coming from Trisnawati and Wahidahwati (2013), Putriani and Sukartha (2014), Kurniawan and Yuliahwati (2013), Meythi and Hartono (2012), Febrianto and Widiastuty (2006) and Ismail (2006) which show that net profit is a predictor that can affect stock returns on state-owned companies. But these results contradict the research of Dimitropoulus and Asteriou (2009).

The increased of net income provides important information to investors and potential investors. It means that the company has more ability in investing in the future (Husnan, 2009). An increase in net income provides information to

investors that the investment has increased. The increase indicates the company's ability to provide higher stock returns and the market will respond to it.

### **The Effect of Liabilities on Stock Returns**

Based on the results of hypothesis testing in Table 4.8, the hypothesis stated that "liabilities have a negative effect on stock returns" in this study is not supported. From the results of this study it can be said that liability is not a predictor that can affect stock returns in a company. This is in line with previous study conducted by Dermansyah (2014) which stated that liabilities have no effect on stock returns. This means that this study supports the results of Dermansyah's research (2014) and shows that liabilities are not a predictor that can influence stock returns on BUMN companies. But these results contradict the research of Gunadi and Kesuma (2015), Arista and Astohar (2012), Sugiarto (2011), Sakti (2010), and Astohar (2010).

The high DER calculation shows that the company's performance is getting worse, because the level of capital dependence of the company on outsiders is greater. With such a high level of dependency, the company makes a profit if it makes a profit, the company tends to use that profit to pay its debt compared to dividing the dividend (Dermansyah, 2014). However, with the majority share ownership of BUMN companies owned by the government, investors need to think that there is a government guarantee on the company and making debt is not a basis for information for investors in making decisions.

### **The Influence of the Independent Commissioner on Stock Returns**

Based on the results of hypothesis testing in Table 4.8, the hypothesis which states that "independent commissioners have a positive effect on stock returns" in this study is not supported. From the results of this study it can be said that the independent commissioner is not a predictor that can influence stock returns in a company. This is in line with previous research conducted by Ramdiani and Yadnyana (2013) and Arisanti (2019) which states that independent commissioners have no effect on stock returns. This means that this research supports the results of the research of Ramdiani and Yadnyana (2013) and Arisanti (2019) which shows that independent commissioners are not predictors that can influence stock returns on SOE companies.

However, this result is contrary to the research of Muryati and Suardhika (2014), Putra (2015), Widyati (2013) and Purwatini (2011).

Based on the results of the analysis that the independent commissioner has no effect on stock returns shows that many or at least the number of independent commissioners does not affect the company's stock returns (Ramadiani and Yadnyana, 2013). These results indicate that investors do not assume that the number of independent commissioners in a company will be able to provide high returns to investors so that the number of independent commissioners does not become information for investors in making investment decisions.

### **The Effect of Foreign Ownership on Stock Returns**

Based on the results of hypothesis testing in Table 4.8, the hypothesis, which stated that "foreign ownership has a positive effect on stock returns" in this research, is supported. From the results of this study it can be said that foreign ownership is a predictor that can affect stock returns in a company. This is in line with previous studies conducted by Chen et al . (2013), Astuti (2014), Wiranata and Nugrahanti (2013), Kumar et al. (2001), Chen (2008), Gul (2010) and Wen (2013) which state that foreign ownership has a positive effect on stock returns . It means that this study supports the results of Chen et al . (2013), Astuti (2014), Wiranata and Nugrahanti (2013), Kumar et al . (2001), Chen (2008), Gul (2010) and Wen (2013) which show that net income is a predictor that can influence stock returns on SOE companies. But these results contradict Irawan and Murhadi's (2012) results.

Foreign ownership in a company both institutional and individual is considered as an important thing. This is because the purchase of shares by foreign parties gives a signal that the company is experiencing stable revenue growth so that it becomes a benchmark for other investors to participate in investing, where foreign investors are believed to be able to estimate stock returns and indirectly increase oversight of the company in order to have satisfactory performance (Chen et al., 2013).

## V. CONCLUSIONS

Based on the hypothesis testing of the independent variables of net profit, liabilities, independent commissioners and foreign ownership, the results obtained that the variable net profit and foreign ownership had a significant positive effect on the level of stock returns on state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2018. This study provided evidence that the increased of net income will provide information to investors that the investment has increased, affecting the company's ability to provide higher stock returns and the market will respond to it. Then this study also provided evidence that the high number of foreign ownership indicated that the company was experiencing stable revenue growth. Thus, it became a benchmark for other investors to participate in investing. While the level of liability and independent commissioners did not significantly influence the level of stock returns on state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2018. Investors assumed that the level of liability and independent commissioners were not taken into consideration in making investment decisions.

## REFERENCES

- Arisanti, Ike. 2019. *Analysis on Earnings Persistence, Independent Commissioner and Herding Behavior on Earnings Quality*. Journal of Accounting and Business Education Vol. 3 No. 2.
- Arista, Desy dan Astohar. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham*.  
Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 3 No. 1.
- Astohar. 2010. *Pengaruh Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Price Book to Value dan Erning Per Share terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 5 No. 2.
- Astuti, Fitria Puji. 2014. *Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan*. Accounting Analisis Journal, Vol. 3 No. 4.
- Avianti, Ilya. 2006. *Privatisasi BUMN dan Penegakan Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN*. Jurnal Kinerja, Volume 10, No.1, Thn 2006 : Hal 57-56.

- Chen, Yem-Ru. 2008. *Corporate Governance and Long-Run Performance of Equity Issues: The Role of Foreign Ownership in Taiwan*. Asia Pacific Management Review Vol. 14 No. 1.
- Chen, Zhian, Jinmin Du, Donghui Li, & Rui Ouyang. 2013. *Does foreign institutional ownership increase return volatility? Evidence from China*. Journal of Banking & Finance.
- Dermansyah, H.S. 2014. *Pengaruh Hutang dan Ekuitas Terhadap Harga Saham (Studi Em;iris Pada Perusahaan Food Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Forum Ilmiah Vol. 11 No. 1.
- Dimitropoulos, Panagiotis dan Dimitrios Asteriou. 2009. *The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Prices (Evidence Greece)*. Managerial Auditing Journal Vol. 24 No. 3 pp. 248-265.
- Febrianto, Rahmat dan Erna Widiastuty. 2006. *Tiga Angka Laba Akuntansi; Mana Yang Lebih Bermakna Bagi Investor*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 9, No.2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Gul, Ferdinan. 2010. *Ownership Concentration, Foreign Shareholding, Audit Quality and Stock Price Synchronicity: Evidence from China*. Journal of Financial Economics Vol 95.
- Gunadi, Gd Gilang dan I Ketut Wijaya Kesuma. 2015. *Pengaruh ROA, DER, EPS Terhadap Return Saham Perusahaan Food And Beverage BEI*. E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 4 No. 6
- Hery. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2009. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- <http://www.detik.com/> Accessed on April 07, 2020.
- <http://www.idx.co.id/> Accessed on September 10, 2019.
- <http://www.pojoksatu.com/> Accessed on Oktober 28, 2019.
- Irawan, Richard dan Werner R. Murhadi. 2012. *Analisis Pengaruh Three Factor Model Dan Persentase Kepemilikan Asing Terhadap Tingkat Return Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen & Bisnis. Vol.10, No. 2.
- Ismail, Ahmad. 2006. *Is economic value added more associated with stock return than accounting earnings? The UK evidence*. International Journal of Managerial Finance Vol. 2 No. 4.



- Jogiyanto. 2014. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi Edisi ke sepuluh*. BPFE Yogyakarta. Kieso, Donald E. Weygandt J. Jerry dan Warfield, Terry D. 2014. *Intermediate Accounting 2nd Edition*. USA: John Wiley & Sons.
- Kumar, K., Subramanian, R., and Strandholm, K. 2001. *Competitive Strategy, environmental scanning and performance: a context specific analysis of their relationship*. *International Journal of Commerce and Management*, 11(1), 1-33.
- Kurniawan, Juliana dan Yuliawati. 2013. *Prediksi Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Deviden Badan Usaha Sektor Manufaktur di BEI Periode 2008-2011*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Sirabaya* 2(1).
- Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN.
- Meythi dan Selvy Hartono. 2012. *Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* No. 7 hal: 1-17.
- Muryati, Ni Nyoman dan I Made Suardhika. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. *E-Jurnal Akuntansi: Universitas Udayana*.
- Oemar, Fahmi. 2014. *Pengaruh Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan Perusahaan Terhadap Kinerja Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Harga Saham*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2.
- Purwantini, V. T. 2011. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, 19.
- Putra, Broyen Prastika Dwi. 2015. *Pengaruh Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* Vol. 8 No. 2.
- Putriani, Ni Putu dan I made Sukartha. 2014. *Pengaruh Arus Kas dan Laba Bersih Pada Return Saham Perusahaan LQ-45*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (3) hal: 390-401.
- Rahmaniar, Ani dan Soegijanto. 2016. *Pengantar Akuntansi Dasar I Siklus Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmawati, Ning Dwi, Ivone S. Saerang, dan Paulina Van Rate. 2014. *Kinerja Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal EMBA*, Vol. , No. 2

- Ramdiani, Ni Nyoman & I Ketut Yadnyana. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Pada Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011*. E-Jurnal Akuntansi Volume 2: Universitas Udayana
- Raningsih, Ni Kadek dan I Made Pande Dwiana Putra. 2015. *Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Pada Return Saham*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13 No. 2 hal: 528-598.
- Sakti, Tutus Alun Asoka. 2010. *Pengaruh Return On Aset dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kasus Pada Sektor Manufaktur Periode Tahun 2003-2007)*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 19 No.
- Samryn, L.M. 2011. *Pengantar Akuntansi Edisi Pertama*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saputra, Setyaka Abi. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Growth Opportunity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014*. E-Jurnal Akuntansi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Canada: Pearson Prentice Hall.
- Sjahrial, Dermawan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan: Cara Mudah dan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subramanyam. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto, Agung. 2011. *Analisis Pengaruh Beta, Size Perusahaan, DER dan PBV Ratio Terhadap Return Saham*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 3 No. 1 pp 8-14
- Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Chistiawan. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Keuangan*. Jurnal Akuntansi Bisnis Universtitas Kristen Petra Vol. 3 No. 1.
- Trisnawati, Widya dan Wahidahwati. 2013. *Pengaruh Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan Serta Laba Bersih Terhadap Return Saham*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 No. 1.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Wen, He. 2013. *Large foreign ownership and stock price informativeness around the world*.  
Journal of International Money and Finance Vol 36.

- Widoatmodjo, Sawidji. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta : Gramedia
- Widyati, Maria Fransisca. 2013. *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*. *Jurnal Manajemen*, Vol. 1 No. 1.
- Wiranata, Yulius Ardi dan Yaterina Widi Nugrahanti. 2013. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 No. 1.

---

# PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

---

Muhammad Julio Cahaya Hartawan, Sudrajat, Widya Rizki Eka Putri,

Ratna Septianty

*Jurusan AKuntansi, FEB Universitas Lampung*

email: [juliocahaya@gmail.com](mailto:juliocahaya@gmail.com)

## ABSTRACT

The research aims to determine the impact of investment decisions, dividend policy, and debt policy on firm value. The dependent variable is firm value in this research measured by Price to Book Value. This research also uses Price to Earning Ratio, Dividend Yield and Debt to Equity Ratio as an independent variable. The population of the research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange in 2016-2018. The sample selection using purposive sampling method with predetermined criteria. This research uses secondary data with total sample in Indonesia is 45 sample, in Malaysia is 117 sample, and the total sample of 2 countries is 162 sample.

The results of this research indicate that in Indonesia, investment decisions and dividend policy have a positive effect on value of the firm and debt policy has positive not significant on firm value. Whereas in Malaysia, investment decisions had a significant positive effect, dividend policy had positive not significant effect, and debt policy had a significant negative effect on firm value. Based on the differences of the two countries experienced significant results.

**Keywords:** *Price to Book Value, Price to Earning Ratio, Dividend Yield, Debt to Equity Ratio.*

## I. PENDAHULUAN

Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan para pemilikinya dalam hal ini pemegang saham. Banyak hal yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan nilai ekuaitas perusahaan. Apabila harga saham perusahaan naik, maka akan meningkatkan pendapatan (return) pemegang saham secara maksimum dalam nilai perusahaan. Sebagaimana harapan para pemegang saham, di mana semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka para pemegang saham juga berharap return yang mereka peroleh akan naik dan berdampak baik pula meningkatkan nilai perusahaan (Triyono, et al., 2015).

Bagi perusahaan, nilai perusahaan merupakan ukuran penting karena dapat menunjukkan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap citra dan harapan mereka pada perusahaan. Fenandar dan Surya (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, semakin sejahtera pula para shareholdersnya. Jadi, apabila nilai suatu perusahaan meningkat, maka harga saham semakin tinggi dan semakin besar tingkat kemakmuran yang diperoleh pemilik saham.

Terkait dengan naik turunnya harga saham dalam pasar modal yang dapat menjadi sebuah fenomena yang berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Dalam kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2018. Dalam kinerja pasar saham di Indonesia dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tahun 2014-2018 yang mengalami penurunan sebesar 12,13% di tahun 2015 dan 2,54% di tahun 2018. Dalam tahun 2015, kinerja ini merupakan tahun yang hectic, dalam eksternal yang ditunjukkan dengan volatilitas harga bunga yang tinggi karena ketidakpastian yang terjadi. Melambatnya ekonomi dunia terutama Republik Rakyat Tiongkok, dan keluarnya dana asing ikut menekan pasar saham. Sementara itu, dalam internal yaitu kurang mulusnya penyerapan anggaran, rendahnya penerimaan pajak, melemahnya rupiah, dan melambatnya ekonomi di Indonesia (juruscuan.com). Dalam kasus ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki kerentanan tinggi pada arus keluar masuk modal karena terkendala oleh defisit transaksi berjalan. Mata uang rupiah menjadi semakin rapuh, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan porsi aset negara yang berada di tangan asing relatif besar (indonesia-investments.com) menjadi tantangan besar dalam perekonomian Indonesia.

Di tahun 2018 juga Indonesia terkoreksi mengalami penurunan sebesar 2,54% tetapi berhasil mencatat kinerja yang positif dengan kenaikan ke posisi 6.194,49 pada penutupan perdagangan di tahun 2018. Sejumlah sentimen akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tahun 2019. Yang menjadi sentimen utama dalam ekonomi global yakni keputusan Federal Reserve atau The Fed yang telah menaikkan suku bunga acuannya dan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Imbas dari ekonomi global tersebut mengakibatkan pelemahan rupiah. Kemudian, rilis negatif defisit neraca pembayaran dan perdagangan. Meningkatnya harga komoditas juga berdampak pada defisit neraca perdagangan (Republika.co.id). Tabel 1 berikut level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

**Tabel 1**  
**Level Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)</b>	<b>Return (%)</b>
2014	5.226,95	22,29
2015	4.593,01	-12,13
2016	5.296,71	15,32
2017	6.355,65	19,99
2018	6.194,49	-2,54

Sumber: Bursa Efek Indonesia dalam *cnbcindonesia.com*.

Adapun juga dalam perekonomian di beberapa negara yang tpada awalnya mengalami pertumbuhan yang rendah, melalui kebijakan tertentu mulai menunjukkan peningkatan dan bahkan dapat melampaui pertumbuhan Indonesia, diantaranya adalah Malaysia dan Singapura. Yang menjadi pembeda utamanya, negara-negara itu memiliki skenario kebijakan di sektor industri manufaktur yang jauh lebih berdaya peranannya dalam pertumbuhan bangsa (lihat Nasution, 2018).

**Tabel 2**  
**Porsi Industri Manufaktur Dalam PDB pada**  
**Tahun 2014-2018 di Indonesia dan Malaysia**

<b>Tahun Porsi Industri Manufaktur Dalam PDB</b>	<b>Indonesia (%)</b>	<b>Malaysia (%)</b>
2014	21,08	22,87
2015	20,99	22,71
2016	20,52	22,22
2017	20,16	22,27
2018	19,86	21,95

*Sumber : World Bank dalam cnbcindonesia.com.*

Pada sektor industri manufaktur seperti yang dijelaskan pada Tabel 2, terlihat adanya kebijakan untuk diarahkan ke ekspor kebutuhan global. Namun, jika sektor industri manufaktur di Indonesia hanya mampu melakukan ekspor kebutuhan dasar dalam negeri, maka sebenarnya pertumbuhan ekspor Indonesia kurang bertumbuh (tipis) (CNN Indonesia). Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian di Indonesia mengalami penurunan (deindustrialisasi). Selama periode 2014-2018, industri manufaktur RI telah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1,21 persen poin, yaitu dari 21,07% menjadi 19,86%. Di Malaysia, manufaktur dalam PDB juga mengalami penurunan dalam periode yang sama. Namun, penurunan tersebut berada dalam laju yang lebih lambat yaitu sebesar 0,92% poin dari 22,87% menjadi 21,95% (CNBC Indonesia). Tabel 2 menggambarkan penjelasan yang dimaksud, yaitu Industri manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014-2018 di Indonesia dan Malaysia. Tabel 2 menunjukkan bahwa Malaysia mengalami naik turunnya di tahun 2014-2017 dan penurunan dengan laju yang lebih lambat di tahun 2018 tetapi Malaysia masih unggul dalam perolehan porsi industri manufaktur. Sedangkan, Indonesia mengalami penurunan yang lebih besar dari tahun ke tahun.

Terkait dalam implikasi pada kebijakan perusahaan, yaitu perusahaan akan sulit menerapkan kebijakan dividen karena laba yang diperoleh lebih kecil atau tidak ada. Kondisi ini tentunya membuat perhatian stakeholders khususnya para pemegang saham (shareholders) menjadi tidak memuaskan. Perusahaan juga akan sulit apabila pengeluaran investasi yang dilakukan dalam kinerja



perusahaan yang kurang baik atau bahkan buruk, maka nilai perusahaan akan rendah.

Keputusan investasi merupakan keputusan dalam mengalokasikan sejumlah dana pada jenis investasi tertentu supaya dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang dengan jangka waktu tertentu. Prasetyo (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu membuat keputusan investasi yang tepat akan menghasilkan aset perusahaan berada dalam kinerja yang optimal. Hal ini selanjutnya akan memberikan sinyal positif bagi investor, hingga pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Kepercayaan pada investor terhadap perusahaan dikarenakan akan menunjukkan pertumbuhan dalam investasi yang akan dianggap sebagai kabar yang baik bagi perusahaan. Penelitian yang dikemukakan oleh Prasetyorini (2013), Winarto (2015) dan Fenandar dan Surya (2012), keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Adiputra (2016) menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia

Kebijakan dividen merupakan suatu pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan pada pemegang saham sebagai dividen dan berapa banyak yang harus diinvestasikan kembali atau laba ditahan sebagai pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Brigham dan Houston (2011) menjelaskan bahwa investor memperhatikan kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan dimasa depan. Informasi pembayaran dividen dapat mengurangi ketidakpastian dan mengurangi konflik keagenan yang selama ini terjadi antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, investor akan semakin tertarik melakukan investasi melalui pembelian saham sehingga harga saham tersebut akan meningkat dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dikemukakan oleh Winarto (2015) dan Fenandar dan Surya (2012), kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Hermuningsih dan Dewi (2009) bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia.

Kebijakan hutang yang dilakukan perusahaan merupakan sebuah keputusan penting karena kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan ini adalah kebijakan untuk memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan

operasional perusahaan. Ross (1977) mengungkapkan bahwa dana yang diperoleh melalui hutang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hutang juga merupakan sinyal bagi investor. Perusahaan yang memiliki hutang atau jika perusahaan berani mengambil risiko melalui hutang hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja produktifitas dan pertumbuhan yang baik. Dana yang diperoleh melalui hutang akan digunakan perusahaan dalam melakukan ekspansi usahanya. Penelitian yang dikemukakan dari Abidin, dkk. (2014) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut didukung juga oleh hasil penelitian dari Sak, et al. (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia.

Terkait argumen dan beragamnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu maka penelitian di area topik ini masih menarik untuk dikaji ulang. Pertanyaan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya melalui riset ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan Malaysia? 2) Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? 3) Bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan?, dan 4) Bagaimana perbandingan nilai perusahaan di Indonesia dan Malaysia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai 1) pengaruh keputusan investasi pada nilai perusahaan, 2) pengaruh kebijakan dividen pada nilai perusahaan, 3) pengaruh kebijakan hutang pada nilai perusahaan, dan 4) perbedaan nilai perusahaan antara Indonesia dan Malaysia

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Sinyal

Teori sinyal (*signalling theory*) umumnya menjelaskan pada adanya tindakan manajemen perusahaan yang memberikan sinyal (petunjuk) bagi investor tentang prospek yang dapat menguntungkan investor jika mereka berinvestasi di perusahaan (lihat Brigham dan Houston, 2006). Memberikan informasi ke pihak investor adalah upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan khususnya informasi terkait dengan laporan keuangan. Adanya asimetri informasi sudah disadari banyak pihak. Himawan dan Christiawan (2016) menjelaskan bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terdapat lag atau perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dan investor.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Cara untuk mengurangi informasi asimetri (salah satunya) adalah dengan memberikan informasi dan (paling tidak) sinyal kepada pihak luar. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang adalah informasi penting yang ditunggu pihak investor (lihat Prapaska, 2012).

## **2.2 Nilai Perusahaan**

Persepsi investor pada berapa besar tingkat keberhasilan perusahaan menjadi indikasi nilai perusahaan dan nilai ini sering dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan juga merupakan nilai jual sebuah perusahaan pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi sebagai suatu bisnis. Jika terdapat kelebihan nilai jual dibandingkan dengan nilai likuidasi saat likuidasi terjadi, maka ini merupakan nilai organisasi yang dijalankan manajemen (Sartono, 2010). Meningkatkan nilai perusahaan merupakan prestasi pihak manajemen dan peningkatan ini menjadi efisiensi kontrak dan sesuai dengan ekspektasi pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan berarti bagi kesejahteraan para pemegang saham juga meningkat.

## **2.3 Keputusan Investasi**

Keputusan investasi merupakan keputusan dalam mengalokasikan sejumlah dana pada jenis investasi tertentu supaya dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Jika keputusan investasi mengalami peningkatan dalam nilai perusahaannya, maka akan meningkatkan kepercayaan pada investor terhadap perusahaan karena menunjukkan pertumbuhan dalam investasi yang akan dianggap sebagai kabar baik bagi perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kesalahan dalam pemilihan investasi, maka keberlangsungan hidup perusahaan akan terganggu dan tentunya akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini manajer hendak menjaga pertumbuhan investasi dalam perusahaan tersebut supaya mencapai tujuan perusahaan dengan kesejahteraan para pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan. Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Fenandar dan Surya (2012), Prasetyorini (2013) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Adiputra (2016) menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Berdasarkan dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1A : Keputusan investasi berpengaruh positif pada nilai perusahaan di Indonesia.

H1B : Keputusan investasi berpengaruh positif pada nilai perusahaan di Malaysia.

## **2.4 Kebijakan Dividen**

Kebijakan dividen merupakan kebijakan perusahaan terkait dengan pencapaian laba yang diperoleh, apakah akan menjadi hal dan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan diakumulasikan ke dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut teori sinyal dalam *information content of dividend theory* yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2011), investor akan menginformasikan berapa nilai dividen yang akan mereka bagi sebagai sinyal positif pada prospek perusahaan dimasa depan. Pembayaran dividen ini mengurangi ketidakpastian dan mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Semakin besar dividen yang dibagikan kepada investor, maka banyak investor yang akan tertarik melakukan pembelian saham sehingga harga saham tersebut akan meningkat dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Disisi lain, apabila perusahaan tidak membagikan dividen maka akan memberikan sinyal negatif yang berdampak pada prospek perusahaan. Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Fenandar dan Surya (2012) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan atas dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Hermuningsih dan Dewi (2009) bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Berdasarkan dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2A : Kebijakan dividen berpengaruh positif pada nilai perusahaan di Indonesia.

H2B : Kebijakan dividen berpengaruh negatif pada nilai perusahaan di Malaysia.

## 2.5 Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena kebijakan ini diambil oleh manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Teori sinyal yang dikemukakan oleh Ross (1977) menjelaskan bahwa hutang perusahaan dapat menjadi faktor yang mendorong meningkatkan nilai perusahaan karena di dalam komposisi hutang terdapat sinyal bagi investor. Perusahaan yang berani mengambil risiko dengan memperbesar hutang mengisyaratkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang baik. Perusahaan yang memperoleh pinjaman pihak luar adalah perusahaan yang bereputasi dan dianggap mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Pendanaan hutang dibutuhkan karena perusahaan akan melakukan ekspansi usahanya dan ini menjadi sinyal positif bagi investor.

Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi hutang perusahaan, semakin tinggi pula harga saham perusahaan. Penggunaan hutang sebagai sumber kegiatan perusahaan diharapkan dapat menambah return masa depan. Return yang meningkat menjadi indikator positif bagi kesejahteraan investor dan akan meningkatkan harga saham. Apabila perusahaan mendapat kesempatan investasi yang menguntungkan, maka perusahaan membutuhkan dana tambahan supaya prospek perusahaan dinilai bagus jika harga saham perusahaan di dalam pasar modal mengalami peningkatan. Bagi pemegang saham, berinvestasi di perusahaan yang pembiayaannya menggunakan komponen hutang menjadi daya tarik tersendiri, karena jika pendanaan dilakukan melalui penerbitan saham baru maka akan membagi jumlah deviden pada saat pembagiannya nanti, hal ini menjadi sinyal negatif bagi investor.

Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Abidin, dkk. (2014) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut didukung juga oleh hasil penelitian dari Sak, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Berdasarkan dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3A : Kebijakan hutang berpengaruh positif pada nilai perusahaan di Indonesia.

H3B : Kebijakan hutang berpengaruh negatif pada nilai perusahaan di Malaysia.

## **2.6 Perbandingan Nilai Perusahaan antara Indonesia dan Malaysia**

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diteliti untuk memberikan informasi kepada para calon investor melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Dalam teori sinyal, perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan kepada stakeholdersnya melalui minimalisasi informasi asimetri. Satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan informasi pada pihak luar. Salah satu informasi yang bermanfaat adalah informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang (Prapaska, 2012). Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Cecilia, dkk. (2015) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perusahaan perkebunan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Terdapat perbedaan nilai perusahaan di Indonesia dan Malaysia

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data laporan keuangan tahunan perusahaan di Indonesia yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))
2. Data laporan keuangan tahunan perusahaan di Malaysia yang diperoleh melalui situs Bursa Malaysia ([www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com))
3. Data laporan keuangan perusahaan sampel di Indonesia dan Malaysia yang diperoleh dari situs Investing.com ([www.investing.com](http://www.investing.com)) pada tahun 2016-2018.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM) pada tahun 2016-2018. Sedangkan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling.

Dengan cara pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang sesuai dengan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2016-2018;
2. Perusahaan yang memiliki periode akuntansi yang berakhir pada tanggal per 31 Desember dengan alasan laporan tahunan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada tahun 2016-2018;
3. Perusahaan dapat mengumumkan dividen tunai pada tahun 2016-2018;
4. Perusahaan manufaktur tidak memperoleh jumlah laba dan dividen tunai bersifat negatif pada tahun 2016-2018;
5. Perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian yang signifikan atau pailit pada tahun 2016-2018.
6. Perusahaan tidak mengalami overpricing di tahun 2016-2018.

**Tabel 3**  
**Pengambilan Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Indonesia	Malaysia
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada Tahun 2016-2018	139	399
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 1 :</b> Perusahaan yang memiliki periode akuntansi yang berakhir pada tanggal per 31 Desember dengan alasan laporan tahunan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada Tahun 2016-2018	(15)	(130)
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 2 :</b> Perusahaan tidak mengumumkan dividen pada tahun 2016-2018	(97)	(177)
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 3 :</b> Perusahaan manufaktur memperoleh hasil negatif dalam jumlah laba dan dividen pada tahun 2016-2018	(1)	(7)
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 4 :</b> Perusahaan mengalami kerugian atau pailit pada tahun 2016-2018	(0)	(1)
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 5 :</b> Perusahaan mengalami Overpricing	(11)	(37)
<b>Total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel</b>	<b>15</b>	<b>39</b>
<b>Total sampel (Dikali 3 tahun)</b>	<b>45</b>	<b>117</b>

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)., [www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com)., dan [www.investing.com](http://www.investing.com).



Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Sampel Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2016-2018**

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
3	BISI	Bisi International Tbk.
4	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
5	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
6	EKAD	Ekadharma International Tbk.
7	ELSA	Elnusa Tbk
8	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.
9	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.
10	LSIP	PT London Sumatra Indonesia
11	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk.
12	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk.
13	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.
14	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.
15	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 5**  
**Sampel Perusahaan Manufaktur di Malaysia Tahun 2016-2018**

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	APMA	APM Automotive Holdings Bhd.
2	BPPL	BP Plastics Holding Berhad
3	CBIP	CB Industrial Product Holding Berhad
4	CCKH	CCK Consolidated Holdings Berhad
5	CCLD	Cocoaland Holdings Berhad
6	CHIU	Chin Hin Group Bhd.
7	CHRB	Chuan Huat Resources Bhd.
8	CNON	Can-One Bhd.
9	CSCB	Classic Scenic Bhd
10	CSTH	CSC Steel Holdings Berhad

---

11	ETEX	Engtex Group Berhad
12	FPIB	Formosa Prosonic Industries Bhd
13	FVCO	Favelle Favco Berhad
14	GNCH	Guan Chong Bhd
15	HILI	Hili Industries Bhd
16	JHTN	Johore Tin Berhad
17	KUBM	KUB Malaysia Bhd
18	LCBH	Luxchem Corporation Berhad
19	LEON	Leon Fuat Bhd.
20	LHEN	Lii Hen Industries Berhad
21	LYSA	Lysaght Galvanized Steel Bhd.
22	MFMS	Malayan Flour Mills Bhd
23	MUDA	Muda Holdings Berhad
24	MSTP	Master Pack Group Bhd
25	NHFH	New Hoong Fatt Holdings Berhad
26	ORPA	Ornapaper Berhad
27	OTLS	Oriental Holdings Bhd
28	PCGB	Petronas Chemical Group Bhd.
29	PEPT	PPB Group Bhd
30	PTAR	Prestar Resources Bhd.
31	PWCF	PWF Corporation Bhd
32	RGBI	RGB International Bhd
33	RUMM	Rubberex Corporation M Bhd.
34	SWAY	Sunway Bhd.
35	TGIB	Thong Guan Industries Berhad
36	THEA	Three A Resources Bhd
37	UMEC	Unimech Group Bhd.
38	UPAB	UPA Corporation Bhd
39	YLEE	Yee Lee Corporation Bhd

---

**Sumber : [www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com) dan [www.investing.com](http://www.investing.com)**

### 3.3 Definisi Operasi Variabel

#### 3.3.1 Variabel Dependen

##### 3.3.1.1 Nilai Perusahaan

Penelitian ini menggunakan rumus *Price to Book Value* (PBV) sebagai proksi dari nilai perusahaan. *Price to Book Value* (PBV) adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor untuk menentukan nilai perusahaan dengan membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Menurut Fenandar dan Surya (2012), rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *Price to book value* adalah sebagai berikut :

$$\text{Price to Book Value (PBV)} = \frac{\text{Harga saham per lembar saham biasa}}{\text{Nilai buku per lembar saham biasa}}$$

##### 3.3.2 Variabel Independen

###### 3.3.2.1 Keputusan Investasi

Dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan *Price Earning Ratio* (PER). *Price Earning Ratio* (PER) digunakan sebagai proksi untuk memperlihatkan seberapa besar harga yang para investor bersedia untuk membayar setiap laba yang dilaporkan. PER yang menunjukkan perbandingan antara harga saham penutup dengan laba per saham (EPS). Menurut Brigham dan Houston (2011), PER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Earning Per Share (EPS)}}$$

###### 3.3.2.2 Kebijakan Dividen

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Dividend Yield* (DY). *Dividend Yield* dalam proksi sebagai suatu ukuran yang menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham jika dilihat dari closing price saham perusahaan saat ini. Rasio DY diperoleh membagi dividen per lembar saham atau DPS dengan Closing Price. Menurut Abidin, dkk. (2014), rasio DY dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dividend Yield (DY)} = \frac{\text{Dividend Per Share (DPS)}}{\text{Closing Price}}$$

### 3.3.2.3 Kebijakan Hutang

Proksi yang digunakan untuk mengukur kebijakan hutang dalam penelitian ini menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio (DER)* maka diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Menurut Abidin, dkk. (2014), rasio DER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = (\text{Total Liabilitas}) / \text{Total Ekuitas}$$

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji beda. Dalam penelitian ini, analisis data yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik dan statistika deskriptif.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam uji analisis regresi linier berganda digunakan dalam hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian. Model regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi adanya kenaikan dan penurunan variabel dependen atas keadaan dari prediktornya. Untuk mengetahui model analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PBV = \alpha + \beta_1 PER + \beta_2 DY + \beta_3 DER + e$$

Keterangan:

PBV	= Price to Book Value
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \text{ dan } \beta_3$	= Koefisien regresi
PER	= Price Earning Ratio
DY	= Dividend Yield
DER	= Debt to Equity Ratio
e	= Standard Error

### Uji Beda (Independent Sample t-Test)

Dalam uji beda independent sample t-test digunakan dalam hipotesis ke-4 dalam penelitian. Independent sample t-test adalah alat uji (uji t) untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda dengan data yang berdistribusi normal dalam statistik uji parametrik. Rumus Independent sample t-test adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Keterangan :

("x" \_"1" )" = rata-rata data pada sampel 1 (nilai perusahaan di Indonesia)"

("x" \_"2" )" = rata-rata data pada sampel 2 (nilai perusahaan di Malaysia)"

n1 = jumlah anggota sampel 1 (nilai perusahaan di Indonesia)

n2 = jumlah anggota sampel 2 (nilai perusahaan di Indonesia)

S<sub>1</sub><sup>2</sup> = varians sampel 1 (nilai perusahaan di Indonesia)

S<sub>2</sub><sup>2</sup> = varians sampel 2 (nilai perusahaan di Indonesia)

Pengambilan keputusan akan menggunakan nilai signifikansi (nilai probabilitas) (Priyatno, 2010) untuk menentukan keberartian predictor pada variabel dependennya.

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka Ho diterima.

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak.

## IV. HASIL

### 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Pengujian statistik penelitian ini adalah PBV (*Price to Book Value*), DY (*Dividend Yield*) dan DER (*Debt to Equity Ratio*). Hasil uji statistik deskriptif di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat data pada Tabel 6.

Berdasarkan dari data Price to Book Value (PBV) selama tahun 2016-2018, dari hasil rata-rata ada sebanyak 17 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan 44 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia yang diatas nilai rata-rata yang menyatakan bahwa harga saham meningkat di periode tersebut. Untuk perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat Price to Book Value (PBV) maksimum adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) tahun 2018 dan di Malaysia adalah Luxcem Corporation Bhd. (LCBH) tahun 2017 karena hal ini

disebabkan nilai ekuitas yang didapat mengalami peningkatan laba yang signifikan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan harga saham juga semakin meningkat dan nilai minimum adalah PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. (DPNS) tahun 2018 dan di Malaysia adalah Chuan Huat Resources Bhd. (CHRB) tahun 2018 karena hal ini perusahaan mengalami penurunan harga saham sehingga harga saham berada dibawah nilai buku atau nilai sebenarnya. Standar deviasi pada tingkat Price to Book Value (PBV) sebesar 1,31 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia bersifat h dan sebesar 0,55 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Indonesia**

<i>Descriptive Statistics</i>										
Mode	Indonesia					Malaysia				
l	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PBV	45	,43	6,11	1,78	1,31	117	,17	2,47	,99	,55
PER	45	4,69	42,21	14,36	7,51	117	3,50	24,17	11,65	4,42
DY	45	,77	7,50	2,68	1,57	117	,81	6,96	3,43	1,43
DER	45	,17	1,90	,78	,55	117	,04	1,78	,60	,43

**Sumber: Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23.**

Kemudian, untuk hasil data Price to Earning Ratio (PER) dari hasil rata-rata ada sebanyak 16 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan 46 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia yang diatas nilai rata-rata yang menyatakan bahwa pengeluaran modal yang tinggi. Untuk perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat Price to Earning Ratio (PER) maksimum adalah PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) pada tahun 2016 dan di Malaysia adalah Muda Holdings Bhd. (MUDA) tahun 2016 karena hal ini mengindikasi bahwa besarnya pengeluaran modal yang digunakan guna meningkatkan harga saham perusahaan dan tingkat minimum adalah PT Ekadharna International Tbk. (EKAD) tahun 2016 dan di Malaysia adalah Leon Fuad Bhd. (LEON) tahun 2017 karena modal yang didapat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menyebabkan harga saham juga ikut menurun. Standar deviasi pada tingkat Price to Earning Ratio (PER) sebesar 7,51 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan sebesar 4,42 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia.

Hasil untuk data Dividend Yield (DY), dari hasil rata-rata ada sebanyak 18 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan 56 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia yang diatas nilai rata-rata yang menyatakan bahwa dividen yang dihasilkan meningkat. Untuk perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat Dividend Yield (DY) maksimum adalah PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) tahun 2017 dan di Malaysia adalah Master Pack Group Berhad (MSTP) tahun 2018 hal ini dikarenakan bahwa dividen kas yang dibayar perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya maka harga saham perusahaan juga akan meningkat dan nilai minimum adalah PT Champion Pacific Indonesia Tbk. (IGAR) tahun 2016 dan di Malaysia adalah Johore Tin Berhad (JHTN) tahun 2016 karena hal ini dividen kas yang dibayar perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan harga saham juga ikut turun. Standar deviasi pada tingkat Dividend Yield (DY) sebesar 1,57 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan sebesar 1,43 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia.

Untuk hasil data Debt to Equity Ratio (DER) dari hasil rata-rata ada sebanyak 15 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan 46 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia yang diatas nilai rata-rata yang menyatakan bahwa tingkat penggunaan hutang yang tinggi dan juga risiko yang tinggi. Untuk perusahaan yang memiliki tingkat Debt to Equity Ratio (DER) maksimum adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk, (WTON) tahun 2018 dan di Malaysia adalah Chin Hin Group Bhd. (CHIU) tahun 2017 dalam hal ini mengindikasi bahwa peningkatkan hutang lebih besar dibandingkan peningkatan nilai ekuitas yang berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dengan menggunakan ekuitas semakin menurun dari tahun sebelumnya dan nilai minimum adalah PT Bisi International Tbk. (BISI) tahun 2016 dan di Malaysia adalah Lysaght Galvanized Steel Bhd. (LYSA) tahun 2018 karena kemampuan perusahaan dalam membayar hutang semakin baik dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Standar deviasi pada tingkat Debt to Equity Ratio sebesar 0,55 dari 45 sampel perusahaan di Indonesia dan sebesar 0,43 dari 117 sampel perusahaan di Malaysia.



## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnof (K-S) dan analisis grafik P-P Plot untuk mengetahui normalitas data. Berikut adalah hasil uji normalitas data.

Figure 7

#### Hasil Uji Normalitas di Indonesia dengan Uji Kolmogorov Smirnov (K-S) di Indonesia dan Malaysia.

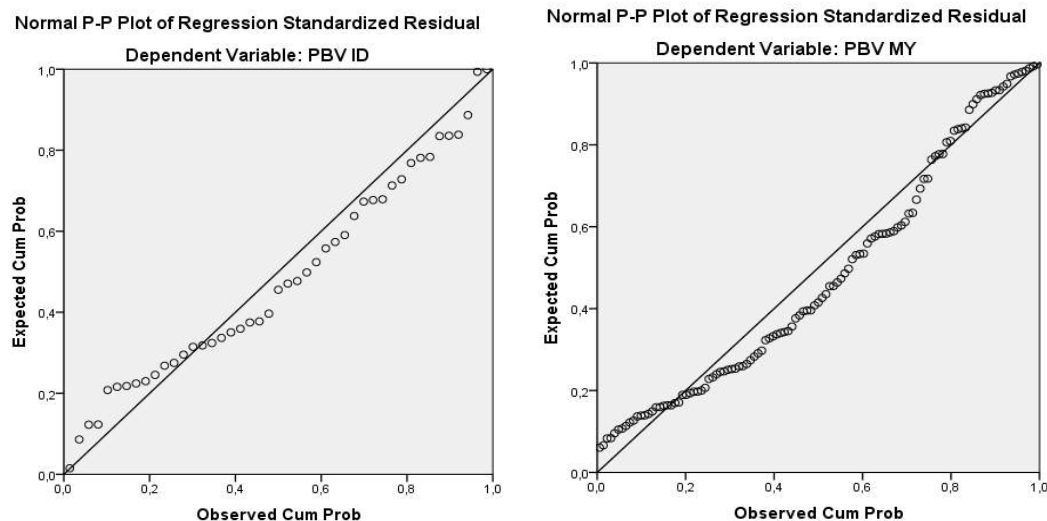
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Negara	N (Total Sampel)	Asymp. Sig. (2-tailed)
Indonesia	45	,200
Malaysia	117	,079

Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnof (K-S) di tabel 7 menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) di Indonesia sebesar 0,200 dan di Malaysia sebesar 0,079. Artinya, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal. Selain itu, normalitas juga dapat dilihat dengan normal probability plot. Berikut ini adalah hasil uji normalisasi dari grafik P-P plot:

Figure 1

#### Grafik Uji Normalitas Indonesia dan Malaysia



Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23

Figure 1 menunjukkan nilai P-P Plot pada Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini terlihat dari pola yang terbentuk dengan titik-titik yang mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, variabel-variabel dalam model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi uji normalitas.

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factors (VIF). Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas di Indonesia dan Malaysia:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas di Indonesia dan Malaysia**

Model	<b>Coefficients</b>			
	<i>Collinerarity Statistics</i>			
	Indonesia		Malaysia	
	<i>Tolerance</i>	VIF	<i>Tolerance</i>	VIF
PER	,889	1,125	,982	1,019
DY	,926	1,080	1,000	1,000
DER	,956	1,044	,982	1,019

**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data pada table 8 dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel di Indonesia dan Malaysia lebih dari 0,1 dan nilai VIF di Indonesia dan Malaysia kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.2.3 Uji Autokorelasi

Penelitian dalam uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin Watson Test (DW-Test) yang mensyaratkan nilai  $du < d < 4 - du$  untuk model yang tidak mengalami autokorelasi. Berikut tabel 9 yang menyajikan hasil uji autokorelasi.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Autokorelasi di Indonesia dan Malaysia**

<b>Model Summary</b>	
Negara	Durbin-Watson
Indonesia	1,921
Malaysia	1,756

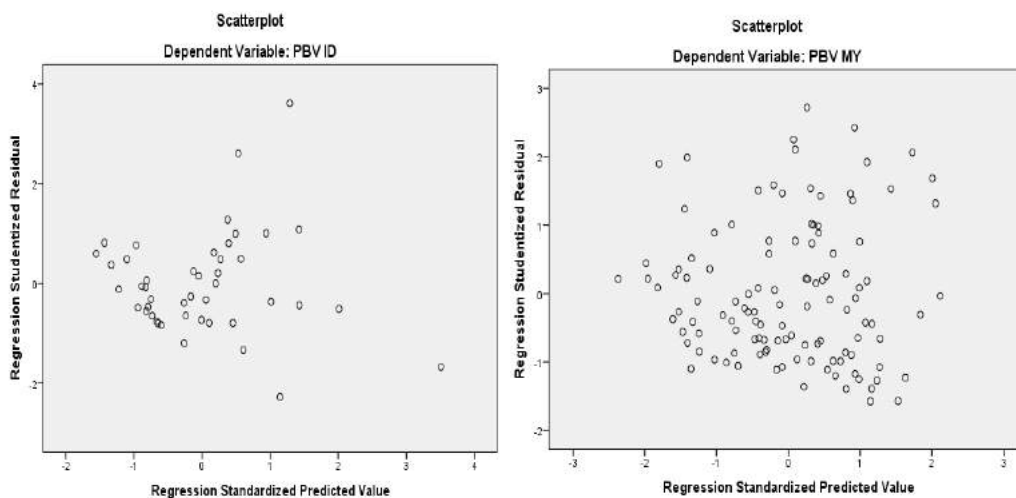
**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data pada tabel 9 diketahui bahwa nilai Durbin Watson Test (DW-test) di Indonesia adalah sebesar 1,921 yang memiliki batas atas (du) sebesar 1,6662 dan batas bawah (dL) sebesar 1,3832 lebih kecil dari  $(4 - du)$  sebesar yang bernilai 1,38 (diperoleh dari  $4 - 1,6662$ ) sehingga memenuhi syarat  $du < d < 4 - du$ . Nilai Durbin Watson Test (DW-test) di Malaysia adalah sebesar 1,756 yang memiliki batas atas (du) sebesar 1,7512 dan batas bawah (dL) sebesar 1,6462 lebih kecil dari  $(4 - du)$  sebesar yang bernilai 2,2488 (diperoleh dari  $4 - 1,7512$ ) sehingga memenuhi syarat  $du < d < 4 - du$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

#### 4.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan scatter plot dalam pengujian heteroskedastisitas, seperti terlihat pada figure 2 berikut ini.

**Figure 2**  
**Hasil Deteksi Heteroskedastisitas Indonesia dan Malaysia**



**Sumber: Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan dari Figure 6 terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titiknya menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dalam pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur sejauh mana variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variasi variabel terikat (dependen), baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Indonesia dan Malaysia**

<i>Model Summary</i>			
Negara	R	R Square	Adjusted R Square
Indonesia	,766	,586	,555
Malaysia	,298	,089	,064

**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data pada Tabel 10 model regresi dalam ini dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yaitu Adjusted R Square (Adj R<sup>2</sup>) memiliki nilai 0,555 atau 55,5% di Indonesia dan 0,064 atau 6,4% di Malaysia. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 55,5% di Indonesia dan 44,5% di Malaysia , sedangkan sisanya sebesar 44,5% di Indonesia dan 93,6% di Malaysia dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini.

#### 4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dalam pengujian signifikansi simultan untuk melihat fit atau tidak layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Statistik F Indonesia dan Malaysia**

ANOVA		
Negara	F	Sig
Indonesia	19,036	,000
Malaysia	4,968	,003

**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data pada tabel 11 dapat diketahui bahwa model regresi memiliki nilai F sebesar 19,036 dengan signifikansi 0,00 di Indonesia dan nilai F sebesar 4,968 dengan signifikansi 0,03 di Malaysia. Nilai tersebut menunjukkan nilai signifikansi  $F < 0,05$ , artinya baik model regresi bersifat fit dan layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

#### 4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dalam uji statistik t dilakukan untuk mengetahui signifikansi secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya konstan. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

**Table 12**  
**Hasil Uji Statistik t Indonesia dan Malaysia**

Model	Coefficients			
	Indonesia		Malaysia	
	B	Sig.	B	Sig.
PER	,141	,000	,022	,047
DY	,217	,017	,039	,253
DER	,363	,147	-,325	,006

**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data dari hasil uji statistik t di Indonesia dan Malaysia dapat diketahui bahwa:

1. Variabel PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV di Indonesia maupun Malaysia. Untuk Indonesia dan Malaysia, hal ini mengindikasikan bahwa apabila harga saham meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkatkan kepercayaan pada investor terhadap perusahaan karena

- menunjukkan pertumbuhan dalam investasi yang akan dianggap sebagai sinyal positif bagi perusahaan. Dengan demikian H1A dan H1B diterima.
2. Variabel DY berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, variabel DY berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PBV di Malaysia. Untuk Indonesia dalam hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dividen yang diperoleh, maka para investor pun akan tertarik dengan pembelian saham pada perusahaan tersebut dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan untuk Malaysia, hal ini mengindikasikan bahwa dividen yang dihasilkan cenderung tidak konstan yang menyebabkan para investor menentukan perusahaan dari aspek lainnya. Dengan demikian H2A diterima dan H2B ditolak.
  3. Variabel DER berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PBV di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, variabel DER berpengaruh negatif signifikan terhadap PBV. Untuk Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi karena memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sedangkan di Malaysia, hal ini cenderung investor mengambil risiko yang tinggi untuk tingkat hutang yang tinggi juga dan apabila melakukan kesalahan dalam hal ini yang menyebabkan suatu harga saham di perusahaan menjadi menurun. Dengan demikian H3A ditolak dan H3B diterima.

#### **4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Dalam pengujian 1,2 dan 3 menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda di Indonesia, maka model regresi yang digunakan:

$$\text{PBV} = -2,259 + 7,543 \text{ PER} + 2,484 \text{ DY} + 1,476 \text{ DER}$$

Berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda di Malaysia, maka model regresi yang digunakan:

$$\text{PBV} = 3,984 + 2,007 \text{ PER} + 1,149 \text{ DY} - 2,794 \text{ DER}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 keputusan investasi yang diprosikan dengan Price to Earning Ratio (PER) dapat meningkatkan nilai perusahaan yang diprosikan dengan Price to Book Value (PBV) sebesar 7,543 di Indonesia dan 2,007 di Malaysia. Kemudian, untuk

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Yield (DY) dapat meningkatkan nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) sebesar 2,484 di Indonesia dan 1,149 di Malaysia. Dalam kenaikan 1 kebijakan hutang yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dapat meningkatkan nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) sebesar 1,476 di Indonesia. Sedangkan, dalam kenaikan 1 kebijakan hutang di Malaysia yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dapat menurunkan nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value sebesar 2,794 apabila variabel lain dianggap konstan.

#### 4.3.5 Hasil Uji Independent Sample t-test

Dalam hipotesis keempat menggunakan uji Independent Sample t-test. Independent sample t-test. Dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur antara Indonesia dan Malaysia. Berikut adalah hasil independent sample t-test pada Tabel 13.

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Independent Sample t-test**

<i>Independent Sample Test</i>			
Keterangan	Mean	Mean Different	p-value
PBV Indonesia	1,78	0,79	0,000
PBV Malaysia	0,99		

**Sumber : Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 23**

Berdasarkan data dari tabel 13 menunjukkan bahwa pada uji independent sample t-test dalam perbedaan nilai perusahaan antara Indonesia dan Malaysia memperoleh nilai signifikan sebesar 0,00. Jadi, untuk nilai Sig. (2-tailed)  $0,00 < 0,05$ , maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan di Indonesia dan nilai perusahaan di Malaysia.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan dari hasil pengujian pertama, kedua negara memiliki hasil yang sama yaitu pada penelitian ini diketahui bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan



dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Semakin besar peluang investasi yang akan direalisasikan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Keuntungan yang besar disertai dengan risiko yang dapat diharapkan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang artinya memakmurkan para pemegang saham. Sedangkan, dalam sinyal negatif, semakin sedikit peluang investasi yang diperoleh maka kebutuhan dana juga akan menurun atau rendah.

Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fenandar dan Surya (2012), Prasetyorini (2013) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Menurut Fenandar dan Surya (2012), hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran modal perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sedangkan di Malaysia, kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Adiputra (2016) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Menurut Adiputra (2016), nilai perusahaan-perusahaan yang memiliki peluang investasi yang tinggi akan memberikan sinyal positif untuk dimasa yang akan datang dan terlihat berbeda terhadap nilai perusahaan yang memiliki peluang investasi yang rendah sebagai sinyal negatif. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil pengujian dari keputusan investasi di Indonesia dan Malaysia dalam hal ini dikarenakan dengan adanya dana perusahaan yang dikelola dengan baik maka keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati oleh para investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

#### **4.4.2 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian kedua, di negara Indonesia kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, di negara Malaysia pada kebijakan dividen positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dalam kebijakan dividen terkait teori sinyal, investor akan melihat kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan dimasa depan, karena pembayaran dividen ini dapat mengurangi ketidakpastian dan mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Apabila semakin besar dividen yang dibagikan kepada investor, maka banyak investor yang akan tertarik melakukan pembelian saham sehingga harga saham tersebut

akan meningkat dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Disisi lain, apabila perusahaan tidak membagikan dividen maka akan memberikan sinyal negatif yang berdampak pada prospek perusahaan.

Kondisi tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Fenandar dan Surya (2012) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Menurut Fenandar dan Surya (2012), hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan merencanakan untuk membagikan labanya kepada para pemegang saham dalam dividen daripada menahannya dalam bentuk capital gain maka para investor akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang membagi labanya secara konsisten. Pernyataan sesuai dengan hasil pengujian dari kebijakan dividen di Indonesia karena para investor ingin mendapatkan hasil dividen yang setinggi mungkin. Sedangkan, kondisi tersebut bertolakbelakang oleh hasil penelitian dari Hermuningsih dan Dewi (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Menurut Hermuningsih dan Dewi (2009) yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak lagi melihat kebijakan dividen sebagai sinyal positif bahwa perusahaan dalam keadaan baik. Beberapa perusahaan berusaha tetap memberikan dividen walaupun dalam keadaan rugi dan impas agar dapat mempertahankan nilai perusahaannya. Pernyataan ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dividen yang dihasilkan cenderung tidak konstan yang menyebabkan para investor menentukan perusahaan dari aspek lainnya.

#### **4.4.3 Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian ketiga, di negara Indonesia kebijakan dividen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan di negara Malaysia pada kebijakan hutang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dalam kebijakan hutang apabila terjadi positif dan signifikan maka semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham karena penggunaan hutang diharapkan dapat menambah return perusahaan sehingga mampu meningkatkan harga melalui pemenuhan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Apabila perusahaan mendapat kesempatan investasi yang menguntungkan, maka perusahaan membutuhkan dana tambahan supaya prospek perusahaan dinilai bagus jika harga saham perusahaan di dalam pasar modal mengalami peningkatan. Bagi

pemegang saham juga akan sangat menguntungkan untuk menggunakan hutang dibandingkan pengaruh kebijakan hutang yang berpengaruh secara negatif yaitu menerbitkan saham baru yang dianggap sebagai sinyal negatif sehingga dapat menurunkan harga saham .

Hasil dari pengujian ini menunjukkan tidak konsisten bahwa penelitian dari Abidin, dkk. (2014) dan Winarto (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Menurut Abidin, dkk (2014), hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan keuntungan yang didapat perusahaan dari penggunaan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan, dalam pengujian ini menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam penggunaan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaan mengalami keuntungan yang kurang maksimal sehingga para investor juga lebih memperhatikan kembali penggunaan hutang yang dikelola perusahaan dalam keadaan yang baik dan stabil.

Kondisi hasil dari pengujian ini tidak konstan dengan hasil penelitian dari Sak, et al (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Malaysia. Menurut Sak, et al (2018) menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki banyak hutang, mereka dapat melepaskan peluang investasi baru yang menguntungkan yang membutuhkan hutang tambahan, sehingga menyebabkan kekurangan investasi yang menyebabkan nilai perusahaan ikut menurun. Hal ini tidak konstan dengan pengujian yang menyatakan bahwa dalam penggunaan hutang dengan kondisi buruk dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami kerugian hingga kebangkrutan dan juga para investor cenderung tidak memperhatikan dengan baik kondisi hutang yang dikelola oleh perusahaan. Dengan begitu juga para investor mengalami kerugian.

#### **4.4.4 Perbedaan Nilai Perusahaan di Indonesia dan Malaysia**

Berdasarkan dari pengujian keempat menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan di Indonesia dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia yang sedang melemah dan tidak stabil sehingga investor cenderung menanamkan modalnya dan mengharapkan keuntungan melalui dari melihat harga saham di masa lalu untuk mengestimasi harga saham yang akan datang dan kurang intensifnya para investor di Indonesia dalam memperhatikan pergerakan saham melalui

aspek tertentu untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan di Malaysia, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian mengalami naik turun tetapi tetap stabil sehingga para investor cenderung mengambil langkah yang tepat untuk memilih perusahaan yang ingin diinvestasikannya dan para investor di Malaysia juga cenderung mengamati berita terkait pergerakan saham sehingga tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Cecilia, dkk (2015) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap antar negara. Menurut Cecilia, dkk (2015), Hal ini diakibatkan karena perbedaan letak geografis, kultur budaya, sosial, ekonomi, dan politik serta regulasi di masing-masing negara

## **V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari keputusan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam keputusan investasi di Indonesia dan Malaysia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan adanya dana perusahaan yang dikelola dengan baik maka keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati oleh para investor sehingga akan mempengaruhi keputusan investasi dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Dalam kebijakan dividen di Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena para investor ingin mendapatkan hasil dividen yang setinggi mungkin. Sedangkan, kebijakan dividen di Malaysia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan karena dividen yang dihasilkan cenderung tidak konstan yang menyebabkan para investor menentukan perusahaan dari aspek lainnya.
3. Dalam kebijakan hutang di Indonesia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa investor lebih memperhatikan kembali penggunaan hutang yang dikelola perusahaan

dalam keadaan yang baik dan stabil. Sedangkan, kebijakan hutang di Malaysia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan karena suatu perusahaan mengalami kerugian hingga kebangkrutan dan juga para investor cenderung tidak memperhatikan dengan baik kondisi hutang yang dikelola oleh perusahaan.

4. Dalam nilai perusahaan antara Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan kurang intensifnya para investor di Indonesia dalam memperhatikan pergerakan saham melalui aspek tertentu untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan para investor di Malaysia juga cenderung mengamati berita terkait pergerakan saham sehingga tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen sehingga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas.
2. Periode penelitian ini yang tidak panjang, yakni hanya 3 tahun sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini sedikit jumlahnya.
3. Dalam penelitian ini, kurangnya informasi pada perusahaan di Malaysia terkait dengan laporan keuangan, dan tidak menerbitkan tanggal listing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia sehingga informasi sulit untuk diperoleh.

## **5.3 Saran**

Saran penelitian ini adalah:

1. Untuk calon investor yang ingin berinvestasi pada saham, sebaiknya lebih mempertimbangkan faktor keputusan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang karena faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada Tahun 2016-2018.
2. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan dengan menambah variabel lain dan menambah periode dalam nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dkk. 2014. "Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Size Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Wawasan Manajemen*. Vol. 2 No. 3.
- Adiputra, I Gede. 2016. *The Effect of Internal and External Factors on the Value of a Firm Through its Investment Opportunities on the Stock Exchange of the Southeast Asian Countries*. *International Business Management*. Vol. 10 No. 4.
- Brigham, Eugene & Joel F. Houston. 2006. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh: Ali Akbar Yulianto. Jakarta : Salemba Empat.
- Cecilia, dkk. 2015. "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Perkebunan yang Go Public di Indonesia, Malaysia dan Singapura". Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fenandar, Gany Ibrahim & Surya Raharja. 2012. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 1.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasnawati, Sri. 2005. Dampak Set Peluang Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta. *JAAI*. Vol. 9 No. 2.
- Hermuningsih, Sri & Dewi Kusuma Wardani. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Malaysia dan Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 13 No.2.
- Himawan, Mey Rianaputri & Yulius Jogi Christiawan. 2016. "Pengaruh Kebijakan Deviden dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)". *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 4 No. 1.
- Horne, James C. Van & Wachowicz, John M. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Keown, et al. 2000. *Manajemen Keuangan*. Edisi 7. Diterjemahkan oleh : Djakman dan Sulistiyorini. Jakarta: Salemba Empat.



- Lestari, Siti Ayu & Mursalim Armayah. 2016. "Profitability and Company Value : Empirical Study of Manufacture Companies in Indonesia Period 2009-2014". *Information Management and Business Review* (ISSN 2220-3796) Vol. 8 No. 3.
- Nasution, Darmin. 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170505134808-78-212549/menko-darmin-tak-puas-dengan-pertumbuhan-ekonomi-501-persen?/>
- Ningsih, Putri Prihatin & Indiarti Iin. 2012. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)". *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Hal. 1-23.
- Prapaska, Johan Ruth & Siti Mutmainah. 2012. "Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2009-2010". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 1, Hal. 1-12.
- Prasetyo, Aries Heru. 2011. *Valuasi Perusahaan*. PPM. Jakarta.
- Prasetyorini, Bhukti Fitri. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 1 No.1.
- Priyatno, Duwi. 2010. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 19*. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, Adhitya. 2015. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang, Keputusan Investasi dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 2 No. 2.
- Rizqia, Dwita Ayu, et al. 2013. "Effect of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity on Dividend Policy and Firm Value". *Research Journal of Finance and Accounting* (ISSN 2222-2847). Vol. 4 No. 11.
- Ross, S.A., 1997. "The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*". Vol. 8 No. 1
- Sak, et al. 2018. *The Effect of Corporate Financing Decision on Firm Value in Bursa Malaysia*. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 11 No.3.
- Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.



- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Empat*. Yogyakarta : BPFE.
- Soliha, Euis & Taswan, 2002. "Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Serta Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 9 No.2. Semarang : STIE STIKUBANK.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Badan Penerbit Alfabeta.
- Sukirni, Dwi. 2012. "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan". *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1. No. 2.
- Sutrisno, 2003. *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi)*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, EKONISIA, Yogyakarta.
- Suwardika, I Nyoman Agus & I Ketut Mustada. 2017. "Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Properti". *E-Jurnal Manajemen*. Vol. 6 No. 3.
- Triyono, Kharis Raharjo dan Rina Arifati. 2015. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Journal of Accounting*. Vol. 1 No.1. Universitas Pandanaran, Semarang.
- Wahyudi, Untung, Dan Pawestri H. P. 2006. "Implikasi Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX. Hal 23-26. Padang.
- Winarto, Jacinta. 2015. "The Determinants of Manufacture Firm Value in Indonesia Stock Exchange". *International Journal of Information, Business, and Management*. Vol. 7 No. 4.
- [www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com).
- [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com).
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- [www.indonesia-investment.co.id](http://www.indonesia-investment.co.id).
- [www.investing.com](http://www.investing.com).
- [www.jurusuan.com](http://www.jurusuan.com).
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).
- [www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com).

---

# THE COMPARATIVE ANALYSIS OF AGRICULTURE SECTOR REGULATIONS BEFORE AND AFTER IMPLEMENTATION OF PSAK 69 AGRICULTURE

---

**Samuel Simanjuntak, Lindrianasari,  
Ninuk D. Kesumaningrum, dan Reni Oktavia**  
*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of  
Lampung*  
email: [lindrianasari@feb.unila.ac.id](mailto:lindrianasari@feb.unila.ac.id)

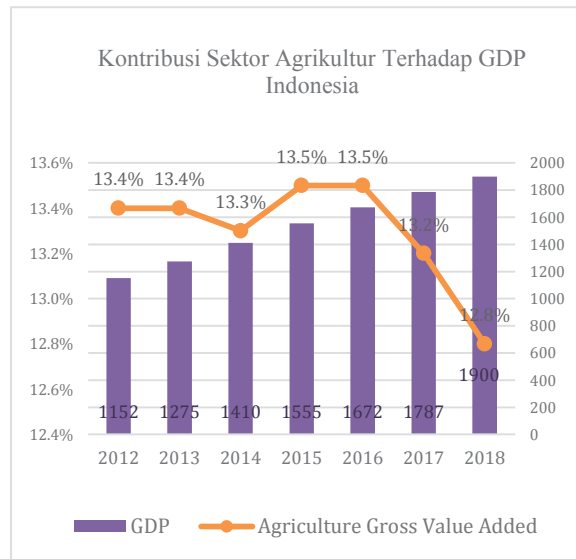
## ABSTRACT

Implementation of PSAK 69 Agriculture was second year implemented, since 1 January 2018. Mostly, every new regulation have a pro and contra for assumed this regulation. PSAK 69 is the hope of agriculture business actors regarding the clarity of regulations that accommodate agricultural business activities. Because before PSAK 69 was inforced, there is no regulation can accommodate the agriculture business on specific. So, this study wants to explain how implementation PSAK 69 for annual report in many agriculture companies, and give an explains what's the difference of the regulation before implementation PSAK 69 and after implementation PSAK 69.

**Keywords:** *Earnings response coefficient, agriculture, implementation PSAK 69, and regulation.*

## I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian secara historis berfungsi sebagai pilar ekonomi Indonesia. Menyediakan pekerjaan untuk sekitar 25.01% dari populasi total tenaga kerja dan berkontribusi 13% dari PDB negara dan menyediakan 35,7 juta orang dengan lapangan kerja (Badan Pusat Statistik, 2018), sektor ini dipandang oleh pemerintah sebagai hal yang penting secara strategis. Setiap tahun tingkat produk domestik Indonesia meningkat, dapat dilihat pada gambar 1. Namun nilai *gross value added* sektor agrikultur terhadap GDP Indonesia mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (dalam Simanjutak dkk., 2020).



Gambar 1. Tingkat produk domestik Indonesia  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Gambar 2. Nilai pasar Agrikultur Indonesia  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Perbedaan nilai produk agrikultur Indonesia di pasar, dapat dilihat pada gambar 2. Pertumbuhan nilai produk agrikultur terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Eksistensi sektor agrikultur dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dikesampingkan dengan tingkat *gross value added* 12,8% pada tahun 2018 terhadap *gross domestic product* dan nilai tingkat pertumbuhan *products market value* 16,5% pada sektor agrikultur. Ketidakseiramaan antara nilai produk agrikultur dengan kontribusi sektor agrikultur terhadap peningkatan PDB Indonesia ini dipengaruhi banyak hal. Salah satu yang paling signifikan adalah sebuah peraturan atau kebijakan dalam hal ini yakni standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan PSAK 69 agrikultur merupakan bentuk usaha untuk mengembangkan dan memajukan sektor agrikultur. Implementasi PSAK 69 berusaha mengakomodir dalam segala pelaporan laporan keuangan perusahaan dan mampu mendorong minat investor atas pelaporan keuangan yang baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Regulasi

Di dalam Scott (2015, teori regulasi dapat dijelaskan dalam dua sisi yaitu *public interest theory* (PIT) dan *interest group theory*. PIT hadir sebagai kebijakan yang merespon dari permintaan publik untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Sementara itu yang dimaksud di dalam *interest group theory* merupakan kebijakan berdasarkan hasil negosiasi yang disampaikan dan dilakukan individu atau kelompok untuk mempertahankan dan kepentingan mereka kepada pihak penguasaan (pemerintah). Teori regulasi menjadi model yang digunakan dalam literatur ekonomi keuangan, selanjutnya menjadi salah satu teori yang menjadi asumsi dasar studi ini. Di mana, kebijakan yang dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan standar atau regulasi yang telah ditetapkan dan disepakati, sehingga tercapainya kesamaan standar yang dipatuhi demi mencapai tujuan industri dan bisnis.

### 2.2. Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002

Dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 (lampiran 8) yang berisi tentang perlakuan akuntansi untuk sektor agrikultur dengan mengatur tanaman semusim dan tanaman bukan semusim dengan mengkategorikan tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Dalam tanaman semusim dimasukkan pada akun inventory, dan sedangkan yang tidak semusim atau jangka panjang dimasukkan pada akun aset tetap.

### 2.3. PSAK 69 Tentang Agrikultur

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 69 (selanjutnya disingkat menjadi PSAK 69) adalah standar yang mengatur aset biologis atau produk agrikultur. Standar ini menjelaskan bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset sudah terpenuhi. Aset biologis atau produk agrikultur diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan pada proses penjualan. PSAK 69 mengatur bagaimana perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang harus dilakukan pada aktivitas agrikultur hasil panen dari aset biologis.

Martani (2018) menjelaskan bahwa aktivitas agrikultur merupakan suatu manajemen transformasi biologis dan panen pada aset biologis yang dilakukan oleh entitas dalam tujuan penjual atau untuk tujuan dikonversi kembali menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Dengan kata lain PSAK 69 ini menjelaskan bahwa aset biologis atau produk agrikultur ini diukur menggunakan nilai wajar pada saat panen dilakukan, untuk tujuan penjualan maupun untuk tujuan dikonversi menjadi produk agrikultur yang akan dilanjutkan proses produksinya di perusahaan. Selain itu, PSAK 69 juga mengatur pengakuan dalam proses transformasi biologis sejak proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, hingga proses prokreasi yang mengakibatkan adanya perubahan kualitatif atau kuantitatif pada aset biologis tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (2016), PSAK 69 dapat diaplikasikan untuk akun-akun berikut, terkait aktivitas agrikultur:

- a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif,
- b. Produk agrikultur pada titik panen,
- c. Hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35.

Akan tetapi PSAK 69 tidak dapat diaplikasikan untuk:

- a. Tanah, terkait dengan aktivitas agrikultur,
- b. Tanaman produktif, terkait dengan aktivitas agrikultur,
- c. Hibah pemerintah, terkait dengan tanaman produktif
- d. Aset tak berwujud, terkait dengan aktivitas agrikultur.

Pernyataan dalam PSAK 69 ini diterapkan untuk produk agrikultur, yaitu produk yang dihasilkan (dipanen) dari aset biologis milik entitas tertentu, pada titik panen tertentu.

### **2.3.1. Pengakuan**

Di laporan keuangan, aset biologis diakui sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam transformasi biologis aset biologis yang bersangkutan. Aset biologis diakui (dikelompokkan) sebagai aset lancar ketika masa manfaat biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun. Sementara itu, jika aset biologis itu memiliki masa manfaat/masa transformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun maka aset biologis dikelompokkan ke dalam aset tidak lancar jika. Menurut PSAK 69, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur ketika, dan hanya:

- a. Ketika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- b. Ketika terdapat probabilitas aset biologis memiliki manfaat ekonomik masa depan untuk entitas; dan
- c. Ketika nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis tertentu dapat diukur secara andal.

Dengan tiga kriteria tersebut, aktivitas agrikultur membutuhkan pengendalian yang baik untuk dapat membuktikan (sebagai contoh) kepemilikan legal pada ternak dan merek atau penilaian atas ternak pada saat akuisisi terjadi, saat kelahiran, atau saat penyapihan. Dengan kata lain, sepanjang pertumbuhan yang membutuhkan penilaian, PSAK 69 mengatur pengukuran nilai aset biologis dan produk agrikultur ini. Sehingga, entitas akan berhati-hati dalam pengendalian untuk memperoleh nilai pengukuran atribut fisik yang signifikan atas manfaat masa depan.

### **2.3.2. Pengukuran**

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa PSAK 69 bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar yang selanjutnya dikurangi biaya untuk proses penjualan, kecuali untuk kasus agrikultur yang nilai wajar tidaknya dapat diukur secara andal (dideskripsikan dalam paragraf 30 pada PSAK 69). Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya

untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan standar yang diakui.

Pengukuran nilai wajar aset biologis/produk agrikultur dapat dilakukan melalui pengelompokan aset biologis/produk agrikultur sesuai dengan atribut yang berarti atau signifikan, misal pengelompokan berdasarkan pada usia atau kualitas aset biologis/produk agrikultur. Selanjutnya perusahaan dapat menentukan pemilihan atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar untuk selanjutnya menentukan harga pasar yang sesuai yaitu menggunakan nilai wajar (*fair value*).

### 2.3.3. Pengungkapan

PSAK 69 menjelaskan bahwa entitas harus melakukan disclosure (pengungkapan) atas (1) keuntungan atau kerugian gabungan yang muncul pada periode berjalan saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan (2) dari perubahan yang terjadi sebagai akibat dari nilai wajar dikurangi biaya dalam proses penjualan aset biologis. Entitas juga diwajibkan untuk menyajikan penjelasan aset biologis yang dimiliki. Dengan pengelompokan aset biologis tersebut, entitas dapat dengan mudah melakukan pengelompokan antara aset biologis menghasilkan (*mature*) dan aset biologis yang belum menghasilkan (*immature*) sesuai dengan kondisi sebenarnya dari aset biologis tersebut.

Entitas selanjutnya diminta untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menjelaskan bahwa rekonsiliasi harus mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Menjelaskan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya menjual;
- b. Mencatat kenaikan yang terjadi karena pembelian;
- c. Mencatat terjadinya penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan untuk dimiliki untuk dijual;
- d. Mencatat penurunan nilai yang terjadi saat panen;
- e. Mencatat kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis ;
- f. Mencatat selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang dalam penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelapor; dan
- g. Mencatat terjadinya perubahan lain.



Perubahan yang terjadi akibat perubahan fisik maupun perubahan harga pasar dapat mempengaruhi nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari aset biologis. Pengungkapan yang dilakukan akibat adanya perubahan fisik dan harga sangat dibutuhkan untuk menunjukkan kinerja periode berjalan dan prospek masa depan entitas, terutama jika siklus produksinya lebih dari satu tahun. Pertumbuhan, degenerasi, dan prokreasi, masing-masing bisa diobservasi merupakan bentuk transformasi biologis yang akan berdampak pada perubahan fisik. Pengukuran setiap perubahan sangat dibutuhkan untuk dapat menetapkan nilai aset biologis dan produk agrikultur yang mendekati kebenaran. Karena setiap perubahan fisik tersebut memiliki hubungan langsung terhadap keuntungan ekonomi masa depan sebuah entitas.

#### **2.4. Perkembangan Pedoman Akuntansi Terkait Aktivitas Agrikultur**

PSAK 32 tentang Akuntansi Kehutanan dan Pedoman Pelaporan Keuangan Perusahaan Hutan (PPKPH) ini salah satu dari standar akuntansi dan pedoman yang berkaitan dengan sektor agrikultur. Namun PSAK 32 ini lebih *concern* kepada pengelolaan hutan tanaman industri dan konservatif hutan. PPKPH dan PSAK 32 merupakan dua ketentuan yang saling bertentangan dalam pencatatan aset. Maka Kementerian Kehutanan mengeluarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) yang disahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.69/Menhut-II/2009. (DOLAPKEU-PHP2H) merupakan bentuk revisi dari PPKPH dan PSAK 32 (Martani, 2010), Kegiatan pemanfaatan hutan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lain tanpa melakukan kerusakan lingkungan dan tidak pula mengurangi fungsi pokok hutan sebagai konservasi dan penyeimbang alam.

Karakteristik khusus pemanfaatan hutan antara lain adalah adanya transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Namun selama ketentuan tersebut berlaku, semua kegiatan yang berkaitan dengan transformasi biologis tidak terekam oleh pencatatan, pengakuan, pengungkapan dan penyajian akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi agrikultur yang ada pada saat itu di dunia.

Selain PSAK 32 tentang Akuntansi Kehutanan dan Pedoman Pelaporan Keuangan Perusahaan Hutan (PPKPH) terdapat ketentuan dalam perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan sektor agrikultur yakni Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002. Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 ini mengatur tentang tanaman semusim dan bukan semusim. Tanaman

semusim menggambarkan tanaman yang masa produksinya hanya 1x panen lalu tanaman itu mati atau ditebang, tanaman bukan semusim menggambarkan tanaman yang masa produksinya lebih dari satu musim. Nilai pengakuan tanaman semusim akan dimasukkan ke dalam inventory dan nilai pengakuan tanaman bukan semusim masuk ke dalam aset tetap. Dalam tanaman bukan semusim ini terdapat dua klasifikasi dalam pengakuannya yakni tanaman menghasilkan dan belum bukan menghasilkan. Dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam perekaman transformasi biologis.

Proses transformasi biologis terdapat masa pertumbuhan, perkembangbiakan, menghasilkan produk,, dan masa pertumbuhan titik tertentu. Semua itu tidak terekam oleh SE Bapepam, PPKPH dan PSAK 32 tentang Akuntansi Kehutanan. Output dari transformasi biologis adalah produk agrikultur dan aset biologis. Martani (2018), pada masa ketentuan sebelum PSAK 69 ini berlaku yang terjadi adalah transformasi biologis dinilai berdasarkan tumpukan-tumpukan harga perolehan. Lalu ada juga ketentuan yang diadopsi oleh Indonesia yaitu IAS 41. PSAK 69 terbit di tahun 2015 namun masih menjadi ED PSAK 69 dan berlaku per tanggal 1 Januari 2018. PSAK 69 merupakan pengadopsian dari IAS 41

## **2.5. Pengembangan Hipotesis**

Sebuah pemahaman dan pengertian akan sebuah regulasi atau peraturan yang tepat dan baik memiliki dampak terhadap *output* yang dihasilkan, apakah itu *output* yang positif ataupun *output* yang negatif. Tergantung pada pemahamannya ketika mendapatkan informasi yang jelas. Umumnya peraturan atau ketentuan dibuat memiliki tujuan yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya menfokuskan pada hal yang minor, melainkan terhadap yang lebih luas. Dalam dunia usaha sebuah kebijakan atau ketentuan memiliki andil yang cukup besar terhadap respon para pemangku kepentingan, contohnya dalam hal ini adalah PSAK 69 agrikultur. PSAK 69 merupakan terobosan dan solusi dalam penyelesaian terkait praktik akuntansi agrikultur dan aset biologis yang masih bias (Martani, 2018). Pemahaman yang baik terhadap PSAK 69 agrikultur memungkinkan untuk tersampainya informasi keuangan yang jelas dan teliti pada perusahaan sektor agrikultur.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami bagaimana perbandingan penerapan sebelum dan setelah penerapan PSAK 69 agrikultur pada perusahaan sektor agrikultur. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif. Analisis kualitatif komparatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu variabel yang berpasangan dengan perbedaan faktor yang mempengaruhi suatu variabel, baik itu perbedaan waktu, tempat, dan sebagainya yang bisa memberikan dampak perbedaan (Thiem, Spöhel, dan Dusa, 2016; Dusan dan Thiem, 2019).

Dalam penelitian ini berusaha memaparkan perihal perbedaan atau perbandingan dalam penyusunan laporan keuangan khususnya masalah pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan atas akuntansi agrikultur. Data dalam penelitian ini berupa studi literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya serta data sekunder berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Data studi literatur merujuk pada surat edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002, PSAK 32 tentang kehutanan dan PSAK 69 tentang agrikultur, dan data penyajian laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergolong sektor agrikultur selama periode penelitian yakni tahun 2017 hingga tahun 2019 pada kuartal ke 3. Analisis yang dilakukan dalam studi kualitatif ini adalah dengan melakukan perbandingan antara laporan keuangan perusahaan dengan perlakuan akuntansi menggunakan PSAK 69 tentang akuntansi agrikultur, terutama terkait dengan penerapan fair value terhadap aset biologis. Analisis kualitatif dilakukan untuk memberikan informasi penjelasan dampak dan penerapan PSAK 69 tentang akuntansi agrikultur pada semua perusahaan di industri agrikultur Indonesia.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Kualitatif Komparatif

Dalam penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 69 tentang akuntansi agrikultur dengan cara membandingkan sebelum dan setelah diterapkan PSAK 69. Penelitian ini terjadi dengan perbedaan periode waktu penerapan dimana PSAK 69 berlaku secara efektif 1 Januari 2018. Secara garis besar PSAK 69 membahas tentang perlakuan aset biologis yang masih penuh pertimbangan dalam penerapannya. Dengan analisis kualitatif komparatif studi ini menjelaskan perbedaan PSAK 32 Kehutanan, surat edaran ketua Bapepam SE-

02/PM/2002 serta PSAK 69 tentang akuntansi agrikultur. Studi ini juga melakukan menjelaskan secara terpisah (namun dalam table yang sama, lihat pada table 1) berdasarkan (a) ruang lingkup dan format pelaporan, (b) deskripsi tentang aset biologis, (c) pengakuan aset biologis, (d) pengakuan aset selain aset biologis, (e) pengakuan nilai wajar, (f) hibah pemerintah, (g) keuntungan/kerugian, (h) laporan laba/rugi, dan (i) laporan arus kas (lihat tabel 2).

**Tabel 1.**  
**Perbandingan PSAK 69, SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan PSAK 32**

Keterangan	Dasar Ketentuan	Isi Analisis
Jenis	PSAK 69	Aset biologis & produk agrikultur
	SE Bapepam No. SE-02/PM/2002	Tanaman semusim dan tanaman tidak semusim. Tanaman semusim terdiri tanaman menghasilkan & tanaman belum menghasilkan (plasma & inti) yang tergolong dalam persediaan, sedangkan tanaman bukan semusim digolongkan dalam aset tetap.
	PSAK 32	Hutan Alam & Hutan Tanaman Industri
Pengakuan	PSAK 69	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, sehingga nilai <i>present value</i> aset biologis didapat dari akumulasi biaya selama proses pertumbuhan hingga masa <i>harvest</i></li> <li>b. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas</li> <li>c. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal dengan pendokumentasian proses transformasi biologis berlangsung.</li> </ul>
	SE Bapepam No. SE-02/PM/2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanaman diakui sebagai persediaan adalah tanaman yang akan dijual</li> <li>b. Tanaman diakui sebagai tanaman menghasilkan ketika reklasifikasi tanaman belum menghasilkan</li> </ul>

		<p>c. Tanaman belum menghasilkan dicatat sebagai aktiva tidak lancar dan tidak disusutkan</p>
	<b>PSAK 32</b>	<p>a. Biaya tangguhan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan hutan tanaman produksi harus dipisahkan pengakuannya dengan biaya tangguhan lainnya.</p> <p>b. Ketika tidak didapati pohon yang siap ditebang, maka biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan proses penanaman akan dikapitalisasi dan diakui ke dalam akun terpisah yakni hutan tanaman industri dalam pengembangan.</p> <p>c. Ketika telah didapati pohon yang siap ditebang maka seluruh biaya selama proses produksi akan dibukukan sebagai biaya produksi.</p>
Pengukuran	<b>PSAK 69</b>	<p>a. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan dengan nilai wajar aset biologis dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar merupakan pengukuran yang andal</p> <p>b. Namun nilai wajar aset biologis dapat diukur secara tidak andal, ketika pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan yang alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Maka dalam kasus ini pengukuran nilai wajar digantikan dengan nilai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.</p> <p>Produk agrikultur yang dipanen dari hasil aset biologis milik entitas diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi</p>

		seluruh biaya untuk menjual pada titik panen/harvest.
	<b>SE Bapepam No. SE-02/PM/2002</b>	<p>a. Tanaman belum menghasilkan diukur berdasarkan biaya perolehan ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pembibitan hingga tahap sebelum dipanen yang mana seperti barang setengah jadi (<i>work in process</i>)</p> <p>b. Tanaman menghasilkan terdiri dari hasil akhir produksi perkebunan atau peternakan, tanaman atau hewan itu sendiri dan bahkan bibit tanaman atau hewan itu sendiri.</p>
	<b>PSAK 32</b>	Untuk hutan alam, perusahaan diberikan hak untuk mengelola hutan yang tanamannya siap ditebang. Perusahaan tidak melakukan proses transformasi tanaman sampai dengan pohon tersebut siap tebang. Konsekuensinya, nilai tanaman tidak dapat dihitung karena diserahkan pengelolaannya oleh negara bersamaan dengan pemberian izin. Sebagai gantinya, negara mewajibkan entitas untuk membayar iuran wajib dan melakukan penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Beban yang timbul–terkait dengan kegiatan penanam dan pemeliharaan kembali hutan serta pembayaran iuran–diakui sebagai harga pokok produksi pada saat terjadinya.
Keuntungan atau kerugian	<b>PSAK 69</b>	<p>Pengakuan keuntungan dan kerugian merupakan penjumlahan antara produk agrikultur dan aset biologis yakni ;</p> <p>a. Pada produk agrikultur pengakuan kerugian atau keuntungan didapat dari pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual</p> <p>b. Pada aset biologis pengakuan kerugian atau keuntungan pengakuan awal aset</p>

		biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis
	<b>SE Bapepam No. SE-02/PM/2002</b>	Selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dan diluar usaha dikurangi beban dan biaya yang berkaitan usaha dan non-usaha perusahaan.
	<b>PSAK 32</b>	Pada prinsipnya PSAK 32 mengatur tentang keuntungan dan kerugian berdasarkan pada PABU (prinsip akuntansi berterima umu). Hanya saja pada PSAK 32 menitik beratkan pada klasifikasi harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan. Harga pokok penjualan kayu tebangan dan kayu olahan harus dipisahkan.
Penyusutan	<b>PSAK 69</b>	PSAK 69 mengikuti berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum perihal penyusutan yang diatur dalam pasal 11 undang-undang PPh dan prinsip akuntansi berterima umum
	<b>SE Bapepam No. SE-02/PM/2002</b>	Penyusutan pada tanaman menghasilkan tergantung pada jenis tanaman, umumnya menggunakan garis lurus; sedangkan tanaman belum menghasilkan tidak disusutkan.
	<b>PSAK 32</b>	Dalam PSAK 32 mengenai ketentuan penyusutan pada aset, hanya memberi penjelasan terkait amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production, selebihnya berdasarkan pasal 11 undang-undang PPh dan prinsip akuntansi berterima umum
Pengungkapan	<b>PSAK 69</b>	Pengungkapan secara khusus tidak ada, namun dalam penjelasan PSAK 69 terdapat pengungkapan umum, berikut penjelasannya :



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan terkait keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.</li> <li>2. Pendeskripsian setiap kelompok aset biologis (berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif) sesuai dengan keadaan aset biologis.</li> <li>3. Pengungkapan jika tidak diungkapkan informasi pada bagian lain pada laporan keuangan maka perusahaan harus mengungkapkan berdasarkan sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis dan ukuran atau estimasi nonkeuangan dari kuantitas spesifik</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>SE Bapepam No. SE-02/PM/2002</b></p>	<p>Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan dan pengungkapan lainnya secara gambaran besar memiliki kesamaan dengan industri lainnya. Namun hanya saja dalam industri perkebunan terlebih dalam SE Bapepam No SE-02/PM/2002 memberi rincian pada pengungkapan tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan</p> <p>a). Pengungkapan tanaman telah menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi perincian nilai tercatat dan akumulasi penyusutan menurut jenis tanaman</li> <li>2. Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun tanaman untuk setiap kelompok selama paling tidak 2 tahun terakhir.</li> <li>3. Status tanah yang digunakan untuk menanam.</li> <li>4. Nilai tanaman telah menghasilkan</li> </ol>

		<p>berdasarkan area/lokasi penanaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Perbandingan saldo tanaman belum menghasilkan selama paling tidak 2 tahun.</li> <li>6. Tanaman yang dijamin.</li> </ol> <p>b). Pengungkapan tanaman belum menghasilkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutasi tanaman belum menghasilkan</li> <li>2. Nilai tanaman dalam Perkebunan Inti Rakyat / Perkebunan Inti Plasma yang menjadi milik perusahaan (inti) dan tanaman yang bukan milik perusahaan (perkebunan rakyat/perkebunan plasma).</li> <li>3. Cadangan kerugian yang mungkin timbul pada plasma.</li> </ol>
	<b>PSAK 32</b>	<p>Pengungkapan PSAK 32 kehutanan tidak memberikan pemahaman yang jelas, hanya saja memberi penjelasan terkait perusahaan hutan baik hak yang diperoleh entitas dan kewajiban yang harus dilaksanakan entitas untuk negara.</p>

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 (Simanjutak dkk., 2020).

**Tabel 2.**  
**Analisis Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 69 Tentang Akuntansi Agrikultur pada Perusahaan di Industri Agrikultur**

No	Indikator	Subjek	Analisis
1	Dasar Ketentuan	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 (Lampiran 12 & 13) dan PSAK 32 tentang Kehutanan
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	PSAK 69 tentang Akuntansi Agrikultur dan PSAK 16 tentang Aset Tetap (Amandemen)

		Kesimpulan Analisis	Antara PSAK 69 dengan regulasi atau ketentuan standar akuntansi sebelum diterapkan PSAK 69 (SE Bapepam & PSAK 32) memiliki perbedaan yang mendasar yakni dalam PSAK 69 mengakui proses transformasi biologis pada aset biologis
2	Ruang Lingkup Pelaporan	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Perusahaan tidak hanya mengatur dan mengungkapkan aset biologis saja, tetapi juga sampai menjadi produk jadi. Untuk produk yang sampai pada titik panen contohnya seperti produk sawit berupa CPO ( <i>Crued Palm Oil</i> ) dan inti sawit pada industri perkebunan sawit.
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	PSAK 69 banyak membahas aset biologis dan produk agrikultur, meskipun secara keseluruhan hewan dan tanaman adalah aset biologis, namun PSAK 69 memiliki pengecualian pada tanaman hidup yang disebut tanaman produktif PSAK 16 Aset Tetap. Pengecualian tersebut memiliki kriteria; digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, tanaman hidup diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sulit untuk dijual sebagai produk agrikultur (kecuali penjualan sisa <i>incidental</i> ).
		Kesimpulan Analisis	Periode sebelum PSAK 69 diterapkan klasifikasi mesamaratakan baik tanaman produktif atau bukan. Sedangkan dalam PSAK 69 klasifikasi sangat jelas mengklasifikasikan tanaman produktif dan produk agrikultur walaupun awalnya dari sebuah aset biologis. Jadi sebaiknya entitas dalam penyusunan pelaporan keuangan harus menentukan apakah suatu tanaman atau hewan merupakan tanaman produktif atau bukan (terlebih pada tanaman perkebunan). Karena

			penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapannya amat berbeda. Tanaman produktif diatur PSAK 16 sedangkan produk agrikultur diatur PSAK 69.
3	Format pelaporan keuangan yang digunakan	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Laporan keuangan terdiri dari : a. Laporan posisi keuangan konsolidasi b. Laporan laba rugi komprehensif c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas konsolidasi e. Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Laporan keuangan terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan konsolidasi b. Laporan laba rugi komprehensif c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas konsolidasi e. Catatan atas laporan keuangan konsolidasi
		Kesimpulan Analisis	Secara umum format pelaporan keuangan yang digunakan tidak ada perbedaan yang mencolok . PSAK 69 tentang akuntansi agrikultur tidak mengatur mengenai format pelaporan keuangan.
4	Deskripsi tentang aset biologis	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Pada periode sebelumnya, aset biologis meliputi tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan masuk ke dalam aset tetap
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Entitas memberikan deskripsi yang dihitung berdasarkan kelompok aset biologisnya untuk membedakan aset biologis berdasarkan umur, level atau tingkatan klasifikasian baik itu untuk tanaman atau pun hewan
		Kesimpulan Analisis	Setelah diterapkan tentang deskripsi aset biologis yang tercatat dalam catatan laporan keuangan. Deskripsi ini berguna untuk mengetahui tanaman apa saja yang dimiliki serta berapa umur dan luasnya.

			Sebelumnya tidak ada spesifikasi yang jelas pada pengelompokan aset biologis. Aset biologis menjadi lebih ketika dikelompokkan berdasarkan umur, luas wilayah, dan jumlah produksinya. Namun beberapa perusahaan sebelum PSAK 69 ini diterapkan telah melakukan klasifikasi tersendiri dalam asetnya seperti perusahaan berkode INDF, SGRO, dan beberapa perusahaan lainnya
5	Pengukuran	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Pengukuran dilakukan berdasarkan biaya perolehan ditambah seluruh biaya selama proses pengusahaan aset biologis hingga dipanen.
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Pengukuran berdasarkan pengakuan awal nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pendokumentasian transformasi biologis mendukung pelaporan nilai aset perusahaan
		Kesimpulan Analisis	Pengukuran terkait aset biologis setelah penerapan PSAK 69 begitu berbeda dengan sebelum penerapan PSAK 69 dikarenakan sebelum PSAK 69 berdasarkan nilai biaya perolehan sedangkan setelah diterapkan PSAK 69 berdasarkan nilai wajar. Pendokumentasian transformasi biologis membantu perusahaan dalam melaporkan aset biologis secara rinci yang sesungguhnya.
6	Pengakuan	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Pengakuan aset biologis diklasifikasikan berdasarkan tanaman semusim dan tanaman bukan semusim. Tanaman semusim nilainya akan diakui sebagai persediaan yakni tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, sedangkan tanaman bukan semusim akan dimasukkan ke dalam aset tetap. Pengakuan awal aset biologis berdasarkan

			biaya perolehan dan pengakuan biaya yang dikeluarkan hanyalah berdasarkan akumulasi-akumulasi saja yang belum dipastikan menrefleksikan nilai yang dikapitalisasi pada aset tersebut
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Pengakuan aset biologis mengklasifikasikan antara produk agrikultur dan tanaman produktif yang diatur PSAK 16 Aset Tetap. PSAK 69 mendokumentasikan dalam mengakui biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses transformasi biologis. Sehingga nilai yang digambarkan pada laporan keuangan merupakan nilai <i>real</i> .
		Kesimpulan Analisis	Perbedaan pengakuan terjadi sangat lah jelas, ketika sebelum diterapkannya PSAK 69 perusahaan aset biologis hanya didasari pada biaya perolehan dan pengakuan nilai aset tersebut berdasarkan akumulasi-akumulasi biaya belum tentu menggambarkan keadaan sesungguhnya. Sedangkan dengan diterapkannya PSAK 69, seluruh proses transformasi terdokumentasikan dengan melalui klasifikasi aset dengan jelas dan pengakuan aset berdasarkan nilai wajar.
7	Hibah Pemerintah	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Dalam SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan PSAK 32 Kehutanan tidak mengatur hibah pemerintah yang diterapkan perusahaan
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Hibah pemerintah terkait aset biologis terbagi menjadi dua yakni bersyarat dan tanpa syarat. Dikatakan hibah tanpa syarat terkait aset biologis ketika aset biologis diakui dalam laba rugi ketika dan hanya ketika menjadi piutang. Sedangkan hibah pemerintah yang bersyarat terkait aset biologis ketika aset biologis nilai ukur aset biologis tidak diakui dalam laporan

			laba rugi.
		Kesimpulan Analisis	Pada laporan keuangan sebelum penerapan PSAK 69 tidak mengatur secara jelas pengungkapan hibah pemerintah, namun pada PSAK 69 diterapkan pengungkapan tentang hibah pemerintah dijelaskan pada paragraf 34-38 dan sangat berhubungan dengan PSAK 61 tentang hibah pemerintah
8	Keuntungan / kerugian	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan PSAK 32 Kehutanan tidak mengatur secara jelas dan rinci.
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Pengakuan keuntungan dan kerugian merupakan penjumlahan antara produk agrikultur dan aset biologis yakni; a. Pada produk agrikultur pengakuan kerugian atau keuntungan didapat dari selisih pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual b. Pada aset biologis pengakuan kerugian atau keuntungan selisih dari pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis
		Kesimpulan Analisis	Pengakuan keuntungan dan kerugian sebelum penerapan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sedangkan PSAK 69 memiliki karakteristik yang unik terlebih pada pengakuan keuntungan atau kerugian terkait aset biologis dan produk agrikultur dengan berdasarkan nilai wajar atas aset biologis dan produk agrikultur.
9	Laporan laba/rugi	Menurut Perusahaan (Sebelum	Secara penyajian tidak jauh berbeda hanya saja yang membedakan adalah biaya terkait produksi tanaman semusim



		Penerapan PSAK 69)	dan tanaman bukan semusim yang pengklasifikasiannya yang berbeda yakni, segala sesuatu dalam proses produksi yang berkaitan tanaman semusim maka akan menjadi harga pokok penjualan sedangkan tanaman bukan semusim akan dikapitalisasi ke dalam aset tetap
		Menurut Perusahaan (Sesudah Penerapan PSAK 69)	Perubahan nilai pada aset biologis dan produk agrikultur merupakan pendapatan utama pada laporan laba rugi. Sedangkan atas penjualan yang berkaitan atau dengan tanaman produktif maka diakui sebagai pendapatan atau biaya kerugian atas pelepasan aset. Seluruh biaya transformasi biologis bisa meningkatkan nilai aset biologis dan nilai produk agrikultur.
		Kesimpulan Analisis	Diterapkannya PSAK 69 terkait laporan laba rugi begitu <i>concern</i> terhadap aset biologis, produk agrikultur dan tanaman produktif. Tanaman produktif diatur PSAK 16 sedangkan PSAK 69 aset biologis dan produk agrikultur, penentuan klasifikasi tanaman atau hewan tergolong tanaman produktif atau tidak akan menjadi penentu besaran laba rugi periode berjalan.
11	Laporan Arus Kas	Menurut Perusahaan (Sebelum Penerapan PSAK 69)	Berdasarkan penerapan Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 pada perusahaan agrikultur, Arus kas disusun berdasarkan konsep biaya historis dengan menggunakan metode langsung. Sedangkan pada masa berlakunya PSAK 32 Kehutanan, arus kas tidak diatur dengan jelas, hanya saja berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU)
		Menurut Perusahaan (Sesudah	Dalam PSAK 69 tidak dijelaskan mengenai konsep laporan arus kas secara jelas, beberapa perusahaan menggunakan

		Penerapan PSAK 69)	metode fair value yaitu nilai yang saat ini sedang berlaku, untuk metode yang digunakan tidak ada ketentuan secara pasti dan ada juga yang menggunakan biaya historis.
		Kesimpulan Analisis	Dalam PSAK 2 yang mengatur tentang laporan arus kas mensyaratkan menggunakan metode langsung dan tidak langsung pada aktivitas operasi entitas.

**Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019 (Simanjutak dkk., 2020).**

## V. SIMPULAN

Sektor agrikultur merupakan sektor harus dipandang penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. PSAK 69 tentang agrikultur merupakan bentuk upaya mendorong kemajuan sektor agrikultur untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih jelas dan tertata. Pencatatan secara *accrual* dalam pengakuan aset berdasarkan nilai wajar dan bersifat informatif terhadap perkembangan nilai atas proses transformasi biologis pada aset biologis dan produk agrikultur terdokumentasi dengan jelas adalah manfaat implementasi PSAK 69 ini.

Hal yang paling mendasar pada PSAK 69 tentang agrikultur ini adalah pengklasifikasian aset tanaman sejak dari bibit hingga panen (*harvest*) dan dokumentasi pencatatan yang baik. Penerapan PSAK 69 tentang agrikultur, khususnya terkait dengan pengungkapan atas laporan keuangannya dapat dinilai secara *adequate disclosure* (pengungkapan yang memadai), *fair disclosure* (pengungkapan wajar) dan *full disclosure* (pengungkapan penuh) (Soewardjono, 2010). Oleh karena itu, kemanfaatn PSAK 69 ini sangat besar dalam menjelaskan kandungan informasi agrikultur kepada pihak luar perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2002. *Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data Statistik Sektor Pertanian*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Brigham, Eugene F., dan Houston, Joul F. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dusa, Adrian., dan Thiem, Alrik. 2019. *Qualitative Comparative Analysis with R; A User's Guide*. New York Heidelberg Dordrecht London: Springer
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 32 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 Tentang Agrikultur*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Kehutanan PSAK 32. *Economic Business & Accounting Review Volume III No. 1* 2010
- Martani, Dwi. 2010. *Dampak Pencabutan PSAK: akuntansi*
- Martani, Dwi. 2018. *Pemahaman Akuntansi Agrikultur PSAK No.69, Workshop Pendidikan Profesi Lanjutan Akuntansi*. Bandarlampung. 1-2 November 2018.
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory 7th Edition*. Canada: Pearson.
- Simanjuntak, S., Lindrianasari, Kesumaningrum, N.D., Oktavia, R. 2020. Analisis Perbandingan Regulasi di Sektor Pertanian Sebelum dan Setelah Implementasi PSDAK 69 Agrikultur. *CURRENT, Jurnal Kajian AKuntansi dan Bisnis Terkini* Volume 1, No. 2: pp.23-264.
- Soewardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF
- Thiem, A., R. Spöhel and A. Duşa. 2016. Enhancing Sensitivity Diagnostics for Qualitative Comparative Analysis: A Combinatorial Approach. *Political Analysis* Volume 24, Issue 1 Winter: pp. 104-120.

---

# THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONER, AUDIT COMMITTEE, FINANCIAL DISTRESS, AND DEBT RATE ON ACCOUNTING CONSERVATISM

---

**Rizki Pangestuti, Usep Syaipudin, Widya Rizki Eka Putri**

Faculty of Economics and Business University of Lampung

Email: [rizkypangestuti250@gmail.com](mailto:rizkypangestuti250@gmail.com)

## ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of independent commissioners, Audit committee, Financial Distress, and Debt Level on Accounting Conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. Data analysis used in this research is descriptive statistics, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and for hypothesis testing using T test and F test. The results of this research indicate that of independent commissioners and financial distress has a positive and significant effect on the level of accounting conservatism. While audit committee and the level of debt (leverage) have no significant effect on the level of conservatism.

**Keywords:** *Accounting Conservatism, Good Corporate Governance Mechanisms, financial distress, Debt Level*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite Audit, Financial Distress, dan Tingkat Hutang dalam Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sedangkan komite audit dan tingkat hutang (leverage) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme.

**Kata kunci:** *Konservatisme Akuntansi, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kesulitan keuangan, Tingkat Utang*

## I. INTRODUCTION

Every company must meet the objectives regarding the rules and accounting principles in accordance with generally accepted standards in order to produce financial statements that can be accounted for and beneficial to each of its users. However, to achieve these objectives requires an accounting principle that can be applied to every management in the company. One of the principles in financial reporting is the principle of accounting conservatism. Watts (2003) defines conservatism as an act of management by slower recognizing earnings. If this principle is applied it will cause profit and income figures to tend to be low while cost figures tend to be higher. Basu (1997) interprets conservatism as an accountant's tendency to acknowledge good news as an advantage over recognizing bad news as a disadvantage.

The principle of accounting conservatism is controversial because there are many criticisms that arise over the application of this principle, but there are also those who support it (Mayangsari and Wilopo, 2002). Those who oppose the conservatism principle argue that the application of the accounting conservatism principle in preparing financial statements will be able to produce financial statements that tend to be biased because they do not reflect the actual financial condition of the company (Kiryanto and Supriyanto, 2006). But on the other hand those who support the conservatism principle argue that the application of the accounting conservatism principle in preparing financial

statements will be useful to avoid the opportunistic behavior of managers who want to manipulate earnings (Fala, 2007). Despite all the pros and cons that surround it, conservative accounting principles are still being used. The reason this principle is still used is because the tendency to overestimate profits in financial reporting can be reduced by adopting an attitude of pessimism to compensate for the optimism of managers. In addition, overstatement is more dangerous than understated earnings because the risk of legal claims will be greater when presenting financial statements that are far higher than they really are (Noviantari and Ratnadi, 2015).

The reason this principle is still used is because the tendency to overestimate profits in financial reporting can be reduced by adopting an attitude of pessimism to compensate for the optimism of managers. In addition, overstatement is more dangerous than understated earnings because the risk of legal claims will be greater when presenting financial statements that are far higher than they really are (Noviantari and Ratnadi, 2015). The reason this principle is still used is because the tendency to overestimate profits in financial reporting can be reduced by adopting an attitude of pessimism to compensate for the optimism of managers. In addition, overstatement is more dangerous than understated earnings because the risk of legal claims will be greater when presenting financial statements that are far higher than they really are (Noviantari and Ratnadi, 2015).

Accounting conservatism in companies is applied at different levels. One of the factors that determine the level of conservatism in a company's financial reporting is the commitment of the management and internal company in providing transparent, accurate and not misleading information for investors. This is a part of the implementation of good corporate governance. The implementation of corporate governance is carried out by all parties in the company including the existence of a board of directors whose job is to manage and oversee the company's performance, an independent commissioner and an audit committee.

Financial distress conditions can encourage shareholders to replace company managers because managers are considered unable to manage the company properly. This will encourage managers to turn profits into one of the benchmarks of manager performance by regulating the level of accounting conservatism. If a company does not have a financial problem, managers will not face the pressure of breach of contract. So the higher financial distress will

encourage managers to present financial statements that are not conservative (Lo, 2005).

Another factor that influences the level of accounting conservatism is the level of debt. The level of debt (leverage) is the use of assets and sources of funds by companies that have a fixed burden with the aim of increasing the profitability of potential shareholders (Sartono, 2002). Usually, the higher the level of debt the more likely the company will violate the credit agreement, so the company will try to report higher profits now that can be done by reducing existing costs.

**Table 1**  
**Number of Research Journals**

Variable	Take effect	%age	No effect	%age	Gap Research (%)	Journal Total
Managerial ownership	3	33%	6	67%	34%	9
Institutional Ownership	3	37%	5	63%	26%	8
<b>Financial distress</b>	<b>6</b>	<b>46%</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>	<b>8%</b>	<b>13</b>
Dividend payout ratio	1	100%	0	0%	100%	1
Company Size	3	42%	4	58%	16%	7
<b>Independent Commissioner</b>	<b>9</b>	<b>60%</b>	<b>6</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>15</b>
Capital Intensity	3	75%	1	25%	50%	4
<b>Audit Committee</b>	<b>8</b>	<b>61%</b>	<b>5</b>	<b>39%</b>	<b>22%</b>	<b>13</b>
Sales growth	2	100%	0	0%	100%	2
Cash Flow	1	100%	0	0%	100%	1
Litigation Risk	1	100%	0	0%	100%	1
<b>Debt Rate (Leverage)</b>	<b>6</b>	<b>42%</b>	<b>8</b>	<b>58%</b>	<b>16%</b>	<b>14</b>
Board of Directors	2	67%	1	33%	34%	3

Research on the principle of conservatism have produced mixed findings. Made (2015) states that the level of financial distress of the company (financial distress) is not significant to accounting conservatism. Rivandi (2019) in his research found that financial distress influences accounting conservatism. Fitriani (2014) states that the mechanism of Good Corporate Governance as measured through independent directors, institutional share ownership, and the audit committee significantly influence the level of accounting conservatism. Ramadona (2016) found that the level of debt (leverage) has a



significant effect on accounting conservatism. Suharni (2019) in his research found that the level of debt (leverage) had no effect on accounting conservatism. Based on the background that has been described above attracts researchers to make research under the title "Influence of independent Commissioner, Audit Committee, Financial Distress, and debt level against the conservation of accounting.

There were 551 journal search results for 2018 regarding Accounting Conservatism from <https://scholar.google.co.id>. There are several independent variables that affect debt policy with results such as Table 1 Financial Distress variable, company size and Debt Level are the top variables that have the smallest gap in research results even though there have been more than 12 research journals that have been conducted. Variable factors Sales growth is the only variable that has a gap research of 0 with a total of 2 research journals.

## **II. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT**

### **a. Theoretical basis Agency Theory**

Agency Theory states that if there is a separation between owners as principals and managers as agents who run companies, agency problems will arise because each party will always try to maximize their utility functions (Jensen & Meckling, 1976 in Wardhani, 2008). Agency theory is a theory that arises because of a conflict of interest between the principal and the agent. Agency theory has the assumption that each individual is solely motivated by his own interests, causing a conflict of interest between the principal and the agent.

Principals are motivated to enter into contracts to prosper themselves with ever-increasing profitability, while agents are motivated to maximize the fulfillment of their economic and psychological needs in terms of obtaining investments, loans, and compensation contracts. Conservatism is one of the most important tools in a company's accounting system that can help the board of commissioners in reducing agency costs and improving the quality of financial statement information (Ahmed and Duellman, 2007). Financial statements that use the conservatism principle can prevent managers' actions in manipulating earnings as a result of information asymmetry. Information asymmetry is a condition where there is an imbalance in information acquisition, where management has more information than investors.

## **b. Prior Research**

The concept of accounting conservatism is controversial because there are many pros and cons that arise over the application of this principle. Various definitions of experience regarding accounting conservatism have also been formulated by several previous researchers. Basu (1997) interprets conservatism as the tendency of accountants to recognize good news as an advantage compared to recognizing bad news as a loss. Watts (2003) defines conservatism as an act of management by slower recognizing earnings or earnings. If this principle is applied it will cause profit and income figures to tend to be low while cost figures tend to be high.

According to Harahap (2008) Conservatism is a condition in which financial statements will inform by choosing unfavorable figures. Indrayati (2010) defines the principle of conservatism as the precautionary principle of an uncertain situation to avoid excessive optimism from management and company owners. According to Aristiyani & Wirawati (2013) conservative accounting is a principle used in the preparation of financial statements, recognizing estimates that there will be losses but if there are gains that have not been realized, these benefits cannot be recognized.

In contrast to the previous definition of accounting conservatism, According to Hery (2017) accounting conservatism is when a loss occurs then all losses will be immediately recognized even though it has not been realized, but when a profit occurs the unrealized gains will not be recognized. Sulastri and Anna (2018) define that the principle of conservatism is an action that adheres to the precautionary principle of an uncertain condition to avoid excessive optimism from the company owner.

Based on the description above, accounting conservatism is a principle of prudence that can be done by companies by recognizing costs faster and by gently acknowledging profits as an alternative to dealing with uncertainty conditions that occur in companies. The influence of accounting conservatism can be measured through many factors including company size, company risk, capital intensity, taxes, litigation risk, leverage, financial distress, GCG mechanisms which include audit committees, managerial ownership, institutional ownership, and independent commissioners.

Increasing debt ratio causes the company to drive profitability, thus making the financial statements more conservative. This is reflected in the results of Noviantari and Ratnadi's research (2015). This finding was also supported by Oktomegah (2012), Zuhriyah (2014), Viola and Diana (2016), and

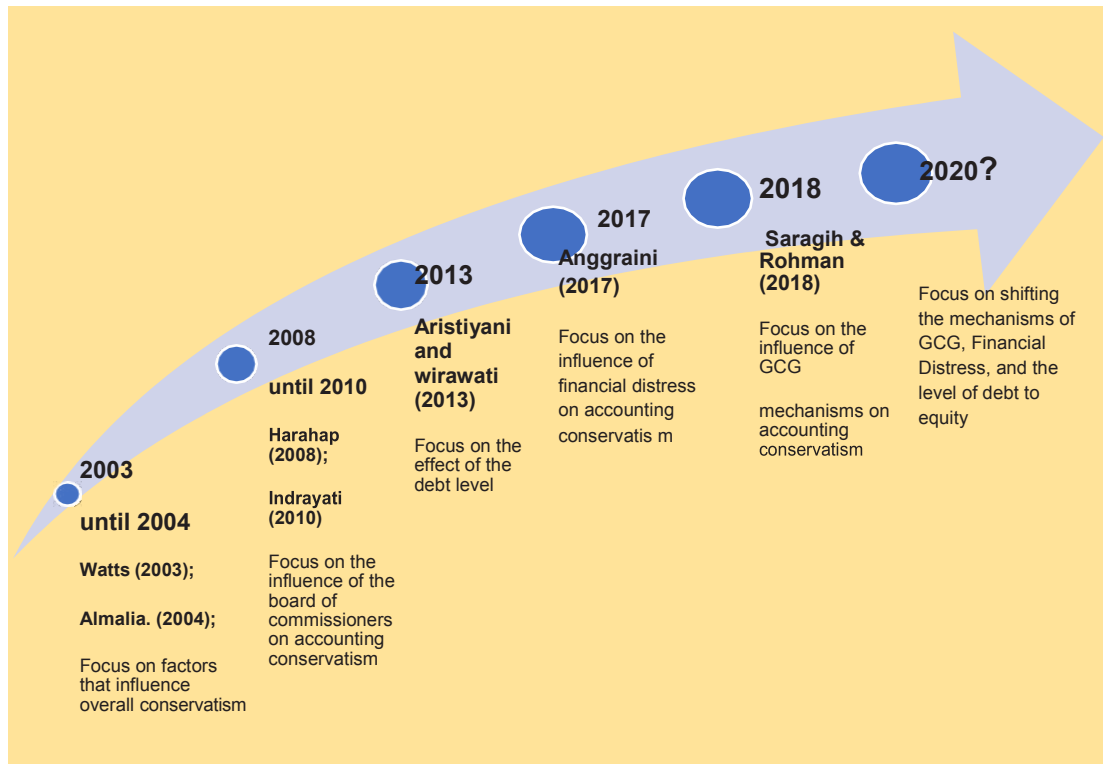
Putri (2016). Noviantari and Ratnadi's results (2015) are not consistent with Agustina *et al.* (2015) which says that when debt levels decline, companies will be more careful in recording. This is also supported by the findings of other researchers namely Susanto and Ramadhani (2016) and Tosi and Paidar (2015).

Conditions of financial difficulties can reduce the manager's market in the labor market so that managers tend to reduce the conservative nature of financial reporting. According to Anggraini (2017) and Pramudita (2012) which state that financial distress negatively influences accounting conservatism, this is because managers tend to cover up poor performance that will trigger shareholders to submit manager changes so as to reduce the manager's market value in the labor market, consequently the threat encourage managers to reduce the conservatism of their accounting. However, Deffa & Siti (2012) proved to be an unaligned outcome that the increasingly high financial difficulties led to the lower application of the accounting conservatism. As well as Dewi & Suryanawa (2014) and Aryani (2016) found that financial distress have significant negative influence over accounting conservatism, the higher financial distress will encourage managers to reduce the rate of accounting conservatism.

Another factor determining accounting conservatism is the audit committee and managerial ownership. An audit committee in a company will create a more well-monitored corporate financial reporting process that encourages the application of high accounting conservatism in the financial reporting process. This was revealed by Mamesah *et al.* (2016) supported by research from Krishnan and Visvanathan (2008) and Wardhani (2008).

The determining factor for accounting conservatism is the Independent Commissioner. Ahmed and Duellman (2007) revealed that if the proportion of independent commissioners is less then the supervision conducted will be weak so that company managers have the opportunity to use accounting principles that are more aggressive and less conservative. This is supported by research from Viola and Diana (2016) and Wardhani (2008).

**Figure 1**  
**Research Road Map**



The phenomenon which states the lack of application of accounting conservatism in Indonesia and the inconsistency of the results of previous studies that motivated this research was conducted. This research contributes to financial accounting research and has implications for companies to pay attention to aspects of accounting conservatism.

Based on a review of several studies that have been carried out previously and unraveled in Figure 1 of the research road map above, there are differences in this research with known studies, namely as follows;

1. This research is a development of the Influence of the Characteristics of the Board of Commissioners as a Mechanism of Good Corporate Governance Against the Level of Accounting Conservatism in Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange (Limantau, 2012) which only focuses on the influence of the characteristics of the board of commissioners on accounting conservatism.
2. The measurement of the independent commissioner variable uses criteria based on educational background and work experience, and this is very rarely used in proxy measurements from previous research studies.

3. The object of this research focuses on the effect of accounting conservatism on manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the IDX. This is because companies engaged in the consumer goods industry sector are quite attractive to investors. This was proven by the resilience of the manufacturing sector, mainly supported by the consumer goods industry sector which grew 26.67% in 2018 (<http://kemenperin.go.id>). In addition there are several cases of Mark-up of financial statements that occur in manufacturing companies in the consumer goods industry sector.

### **c. Hypothesis Development**

#### 1) The influence of Independent Commissioners on Accounting Conservatism

In agency theory, it is stated that between managers and shareholders there is a possibility of a conflict of interest. The existence of the board of commissioners in the company is intended to reduce the existence of conflicts of interest between shareholders and managers. Independent Commissioners are part of the board of commissioners who are not affiliated with directors, other members of the board of commissioners, and the company itself both in business relations and family relations. The existence of an independent Commissioner in a company is very important. One of the main functions of an independent commissioner is to carry out a monitoring function that is independent of the company's management performance.

The more the proportion of independent directors in a company indicates a strong board of commissioners, the higher the level of conservatism desired because of the requirements for quality financial information. According to Limantauw (2012) if the proportion of independent directors is smaller then the supervision conducted will be weak so that company managers have the opportunity to use accounting principles that are more aggressive and less conservative.

H1: Independent Commissioners has a significant positive effect on Accounting Conservatism in Manufacturing Companies Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 Period.

## 2) The influence of the Audit Committee on Accounting Conservatism

The audit committee in the company also plays an important role in determining the company's policies taken. The Audit Committee is tasked with assisting the board of commissioners to ensure that the financial statements are fairly presented in accordance with generally accepted accounting principles. The existence of an audit committee will encourage the use of higher conservatism principles in the company's financial reporting process (Sari et al., 2016). With an audit committee in a company, the company's financial reporting process will be monitored properly. The audit committee will ensure that the company applies accounting principles that will produce accurate and quality financial information. Therefore the existence of this audit committee will improve the overall quality of the company's financial reporting process by using the principle of conservatism (Wardhani, 2008).

H2: The Audit Committee has a significant positive effect on Accounting Conservatism in Manufacturing Companies Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 Period.

## 3) Effect of Financial Distress on Accounting Conservatism

Companies that earn negative profits or losses during the period which shows that the company is in a condition that is not good or commonly referred to as the level of financial difficulty of the company. The problematic financial condition of a company shows the failure of managers in managing a company that can be reflected through the financial statements presented. These conditions can encourage a manager to regulate the presentation of financial Statement. Companies that experience financial difficulties show the condition of the company that leads to the company's inability to meet its payment obligations and if the company is unable to resolve it will lead to bankruptcy.

Financial distress conditions cause the company needs more funds to finance its company activities as well as funds to pay its obligations. If the company experiences financial distress and continues to use conservative accounting, the financial statements presented will become understatement so that it will give a bad signal to external parties, especially creditors. This causes the creditor will not provide loans for business continuity so that when the company is experiencing financial distress the company will not apply the principle of conservatism in preparing financial statements. If the company experiences financial distress and continues to use conservative accounting,

the financial statements presented will become understatement so that it will give a bad signal to external parties, especially creditors. This causes the creditor will not provide loans for business continuity so that when the company is experiencing financial distress the company will not apply the principle of conservatism in preparing financial statements. If the company experiences financial distress and continues to use conservative accounting, the financial statements presented will become understatement so that it will give a bad signal to external parties, especially creditors. This causes the creditor will not provide loans for business continuity so that when the company is experiencing financial distress the company will not apply the principle of conservatism in preparing financial statements.

H3: Financial Distress has a significant negative effect on Accounting Conservatism in Manufacturing Companies Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 Period.

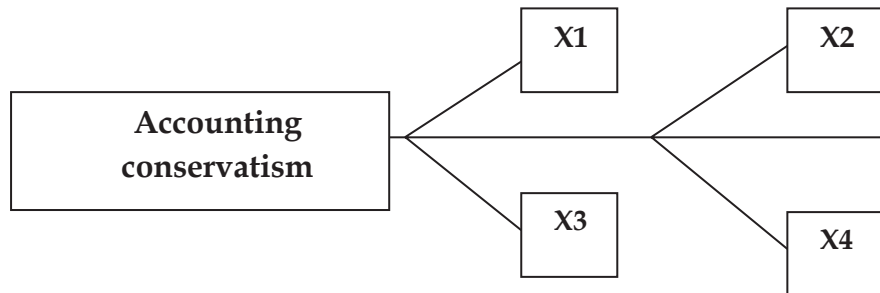
#### 4) Effect of Debt Levels on Accounting Conservatism

In companies that have relatively high debt, creditors have greater rights to know and oversee the operation and accounting of the company. More rights owned by creditors will reduce information asymmetry between creditors and company managers. The manager has difficulty hiding information from creditors. Creditors have an interest in the distribution of net assets and higher profits low to managers and shareholders so creditors will tend to ask managers to use conservative accounting. The higher the level of leverage, the greater the likelihood of conflict that will arise between shareholders and bondholders which will ultimately affect the contractual demand for conservative accounting (Ahmed and Duelman, 2007).

H4: Debt level has a significant positive effect on Accounting Conservatism in Manufacturing Companies Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 Period.



**Figure 2**  
**Research framework**



### **III. RESEARCH METHODS**

#### ***Data Source Type***

The data used in this research is secondary data. Secondary data is data that is not obtained directly from the source, but is obtained through intermediary media. Data collection techniques used in this study were carried out by downloading the annual financial statements and annual reports of manufacturing companies in the consumer goods industry sector from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, namely ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

#### ***Population and Sample***

The population in this study are manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The sample selection in this study was carried out by the method of purposive sampling, namely the selection of samples based on predetermined criteria. Manufacturing companies in the consumer goods industry sector that have met the criteria as a research sample of 37 manufacturing companies in the consumer goods industry sector during the three years of research, so that the amount of data used in this study was 111 observational data.

## **Definition of Variable Operations**

### *a. Dependent Variable*

The dependent variable used in this study is accounting conservatism. A conservative income statement will delay the recognition of unrealized revenues and costs incurred during the period will be immediately charged to that period rather than being a reserve (deferred costs) on the balance sheet. The conservatism measurement model used in this study is the accrual measure. The measure is calculated by using the formula Givoly and Hayn (2002) in Haniati and Fitriany (2010):

$$\text{CONNACC}_{it} = (\text{NI} + \text{Dep})_{it} - \text{CFO}_{it} / \text{TA}$$

Information:

CONACC<sub>it</sub> = level of conservatism

NI = net income before extraordinary items plus depreciation and amortization

CFO<sub>it</sub> = cash flow from operating activities

TA = Total Assets

It = Company i in period t

The CONACC calculation results above are multiplied by -1. This is to ensure that a positive value indicates a higher level of conservatism, so that greater conservatism is indicated by the greater value of CONACC (accounting conservatism with accrual measures). Meanwhile, the use of earnings before extraordinary items aims to eliminate the elements that cause profit growth to increase in one particular period that will not arise in other periods.

### *b. Independent Variable*

#### **1) Independent Commissioners**

The measurement of an Independent Commissioner is stated with the educational background and experience in accounting or finance owned by an independent commissioner. Information regarding the education and work experience of the independent board of commissioners can be seen in the company's Annual report in the board of commissioners profile section. Independent commissioners who have educational background and work experience in accounting and finance are total, then compared with the number of commissioners (Rahayu, 2014).

$$KI = \text{Number of IC} / \text{Number of BC}$$

Note:

IC = Independent Commissioners (who have educational background, and work experience in accounting and finance)

BC = Board of Commissioners

## 2) Audit committee

Audit committee activities in a company are measured by the number of meetings held by the audit committee within one year to discuss issues related to the duties and responsibilities of the audit committee in carrying out the supervisory function. Based on BAPEPAM-LK Decree Number: Kep-643 / BL / 2012, the audit committee must hold regular meetings at least 4 times a year. The measurement is then included in the dummy variable, where a value of 1 is given if the audit committee meets more than four times a year, a value of 0 is given if the audit committee only meets less than four times a year (Marsha, 2017). Information regarding the frequency of audit committee meetings is obtained from the company's Annual Report and from announcements issued by the IDX.

## 3) Financial Distress

Financial difficulties will be measured using the Z (Zeta) discriminant function found by Altman (1968) by using 5 ratios that can be used to see the difference between bankrupt and non-bankrupt companies. However, Altman (2000) modified the Z-Score because the old equation only had 30% accuracy. Its functions are as follows:

$$Z = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.420T4 + 0.998T5$$

Information:

T1 = Working Capital / Total Assets (%)

T2 = Retained Earnings / Total Assets (%)

T3 = Profit Before Tax / Total Assets (%)

T4 = Book Value of Capital / Total Debt (%) T5 = Sales / Total Assets

Indicators of the discriminant function Z (Zeta) are:

**Z > 2.9: Not experiencing bankruptcy**  
**1.23 < Z < 2.9: Doubtful- doubt Z < 1.23: bankrupt**

#### **4) Debt Rate (Leverage)**

Leverage is the debt ratio. The leverage ratio shows how much a company uses external debt to finance its operations. The leverage ratio in this study is measured by:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \text{Total Debt} / \text{Total Equity}$$

#### **Data analysis method**

Completion of this study uses quantitative analysis techniques. In this study quantitative analysis is done by qualifying research data so as to produce the information needed in the analysis. This study will use SPSS 22 Software to predict the effect of independent variables on the dependent variable. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression models. Multiple linear regression is used to test the effect of two or more independent variables on one dependent variable.

The independent variables in this study consisted of Independent Commissioners, Audit Committees, Financial Distress, and Debt Levels (leverage). While the dependent variable is accounting conservatism. To test the hypotheses of these variables, the regression equation formula used is as follows:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Information:

Y = accounting conservatism.

X1 = Independent Commissioner

X2 = Audit Committee

X3 = Financial Distress

X4 = Debt rate

e = Error standard.

## IV. ANALYSIS AND DISCUSSION

### Descriptive statistics

Descriptive statistics in this study are used to provide a description of the research variables. The following table 2 is the output of the descriptive statistical test which shows that the amount of data in this study was 111.

**Table 2**  
**Descriptive Statistics Test Results**

	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
CONNACCit	-0.17	.21	-0,087	0.06137
KI	.13	1	0.4115	0.17426
DER	0.08	1.65	0.5928	0.35056
KA	0	1	.94	.244
FD	.36	7,10	2.4042	1,48317

**Source: SPSS Processed Data 22**

### Hypothesis Testing Results

Results of Multiple Linear Regression Analysis

The model used in this study is to examine the effect of the Independent Commissioner, Audit Committee, Financial Distress, and the Level of Debt (leverage) on accounting conservatism. Based on table 3 it can be seen that the multiple linear regression equation in this study is as follows:

$$Y = 0.060 + 0.062X_1 + 0.003 X_2 + 0.008 X_3 + 0.005X_4 + e$$

A constant of 0.060 means that if the level of an independent commissioner (X1), the level of the audit committee (X2), the level of financial distress (X3) and the level of leverage (X4) are assumed to be fixed, then the accounting conservatism (Y) is equal to 0.060. The test results from multiple linear regression analysis are as follows:

**Table 3**  
**Test Results of Multiple Linear Regression Analysis**

Model	T	Unstandardized Coefficients (B)
(Constant)	1,862	0.060
KI	1,949	0.062
KA	.138	0.003
FD	2,081	0.008
DER	.298	0.005

**Source: SPSS Processed Data 22**

**R Square Coefficient Test Results (R2)**

The coefficient of determination (R2) in the research is used to measure how far the model's ability to explain the variation of the dependent variable. The coefficient of determination is between zero and one. A small R2 value means that the ability of the independent variables to explain the variation of the dependent variable is very limited. The results of the R square coefficient (R2) test are as follows:

**Table 4**  
**R Square Coefficient Test Results (R2)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	, 250a	, 162	, 127	4,06053

a. Predictors: (Constant), DER, FD, KA, KI

b. Dependent Variable: CONNACCit

Based on table 4 it can be seen that the value Adjusted R Square amounted to 0.127 which means that the variable Independent Commissioner, Audit Committee, Financial Distress, and Leverage as independent variables are able to explain the conservatism variable proxied by accounting conservatism as the dependent variable by 12.7% and the rest is influenced by other variables not examined.

### Hypothesis Test Results (t Test)

This partial test (T test) aims to show how far the influence of one explanatory variable (independent) individually in explaining the variation of the dependent variable. The test was carried out using a significance level of 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Based on table 5 it can be seen that:

- a The Independent Commissioner variable has a t value of 1.949 greater than t table 1.928 with a significance level indicating a value of 0.047 which means greater than 0.05 ( $0.047 < 0.05$ ), thus it can be that the independent commissioner variable has a significant positive effect on conservatism accounting.
- b The Audit Committee variable has a calculated value of 0.138 smaller than t table 1.928 with a significance level indicating a value of 0.891 which means greater than 0.05 ( $0.891 > 0.05$ ), thus it can be that the audit committee variable has a significant positive effect on accounting conservatism.
- c Financial Distress variable has a t value of 2.081 greater than t table 1.928 with a significance level showing a value of 0.040 which means less than 0.05 ( $0.040 < 0.05$ ), thus it can be concluded that H3 is accepted, which means that the Financial Distress variable positive and significant effect on accounting conservatism.

**Table 5**  
**Hypothesis Testing Results**

<b>Variable</b>	<b>Results</b>
Independent Commissioner	Significant
Audit Committee	Not significant
Financial Distress	Significant
Leverage	Not significant

- d Leverage variable has a calculated value of 0.298 smaller than t table 1.928 with a significance level showing a value of 0.766 which means greater than 0.05 ( $0.766 > 0.05$ ), thus it can be that the Leverage variable has no significant positive effect on accounting conservatism.



## Hypothesis Discussion Results

### **a. Influence of the Independent Commissioner on Accounting Conservatism in the manufacturing companies in the consumer goods industry sector which was listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018**

The results of this research support the first hypothesis which states that "Independent Commissioners have a positive effect on accounting conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018". The results showed a correlation coefficient of 0.062 which means that there was a positive relationship between the independent commissioners of Accounting Conservatism. In addition, this is indicated by the t value  $> t$  table (1,949  $>$  1,928) with a significance value of 0.047 less than 0.05, which means significant. So it can be concluded that H1 was accepted. This means that the size of the independent commissioner has an influence on accounting conservatism in the financial reporting of manufacturing companies in the consumer goods industry sector in 2016-2018. This means that if in an enterprise an independent commissioner has competence in the economic and business fields, then the monitoring function of the company's management performance will be better. Competence here is not only seen from an educational background, but also from the previous experience of the board of commissioners in economics and business. Competent Independent Commissioners can consider decisions based on experience, so they can be more careful in making decisions that aim to tighten supervision of management performance to produce good financial performance so that the higher the level of conservatism desired because of the requirements for quality financial information.

The results of this research are consistent with the results Research conducted by Nur *et al.* (2019) also concludes that the influence of the size of the level of the independent board of commissioners has a significant influence on accounting conservatism. However, this research is not consistent with the research of Wardhani (2008) which states that independent commissioners have not been able to prove its effect on the level of corporate accounting conservatism as measured by using accrual measures. This research has results that are also not consistent with the results of research conducted by Sari *et al.*

(2016) concluded that the size of the independent commissioner had no effect on accounting conservatism.

**b. Influence of the Audit Committee on Accounting Conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018**

The results of this research do not support the second hypothesis which states that "the Audit Committee has a positive effect on accounting conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018". The results showed a correlation coefficient of 0.003 which means that there was a positive relationship between the audit committee and Accounting Conservatism. In addition, this is indicated by the t value < t table (0.138 < 1.928) with a significance value of 0.891, greater than 0.05 which means that it is not significant or in other words H2 is rejected.

The hypothesis test results are clear that the audit committee as measured by the level of the audit committee meeting does not have a positive effect on accounting conservatism, meaning that the more often the audit committee holds meetings, it does not determine the higher level of conservatism in a company. Meetings that are held regularly and the long duration of a meeting may not necessarily be said that the meeting resulted in a good, effective and efficient decision for the company, in other words the quality of the audit committee meeting is not determined on the number of meetings conducted. This is the reason why the number of meetings does not affect the level of corporate conservatism.

This is in line with research conducted by Bahaudin (2011) which states that audit committee variables do not have a positive influence on accounting conservatism. However, this research produces different conclusions from the research of Zulaikha (2012) and Yunos *et al*, (2014) which states that the audit committee variable with the size of the audit committee meeting has a positive effect on accounting conservatism.

**c. Influence of Financial Distress on Accounting Conservatism in the manufacturing companies in the consumer goods industry sector which was listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018**

The results of this research do not support the third hypothesis which states that "Financial Distress has a significant negative effect on accounting conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector which is listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018". The results showed a correlation coefficient of 0.008 which means that there is a positive relationship between Financial Distress and Accounting Conservatism. In addition, this is indicated by the t value  $> t$  table ( $2,081 > 1,928$ ) with a significance value of 0.040 less than 0.05, which means significant.

Financial distress company significantly influence accounting conservatism. In a troubled financial condition, managers tend to apply accounting conservatism to reduce conflicts between investors and creditors. Conservatism is a principle of prudence, so with the financial difficulties encourage companies to be more careful in dealing with an uncertain environment. Thus the higher level of financial difficulties or the company's financial condition approaches bankruptcy, the resulting financial statements will be more conservative.

This research is in line with Pramudita's (2012) research which shows that the level of financial difficulties significantly influences accounting conservatism, and Noviantari and Ratnadi's research (2015) which shows that the level of financial difficulties has a significant and positive effect on accounting conservatism. However, this study produces different conclusions from the research conducted by Made (2015) which shows that the level of financial difficulties negatively affects Accounting Conservatism, as well as research Rivandi and Ariska (2019) which in their research also stated that the level of corporate financial distress had a significant negative effect on accounting conservatism.

**d. Influence of Debt Level (Leverage) on Accounting Conservatism in manufacturing companies in the consumer goods industry sector which is listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018**

The results of this research do not support the fourth hypothesis which states that "Debt Level significantly influences the accounting conservatism of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the

Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018". The results showed a correlation coefficient of 0.005 which means that there is a positive relationship between the level of debt to Accounting Conservatism. In addition, this is indicated by the value of t count < t table (0.298 < 1.928) with a significance value of 0.766 greater than 0.05 which means that it is not significant or in other words H4 is rejected.

T test results on the debt level variable which is proxied by DER has no effect on accounting conservatism. This shows that if the company has a high or low debt will not make the company more conservative. This is probably due to the conservatism principle which is a precautionary attitude in dealing with an uncertain environment, so the company will always use this principle regardless of whether the debt is high or low. The results of this research are in line with research by Pramudita (2012), Suharni, et al (2019) which states that the level of debt (leverage) does not significantly influence accounting conservatism. However, this study produced different conclusions from the research conducted by Noviantari and Ratnadi (2015), Putri (2017) which stated that the level of debt (leverage) has a significant effect on accounting conservatism.

## V. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

### Conclusion

Based on the research findings and hypothesis testing, the results are as follows:

1. Independent Commissioners have a positive and significant influence on application of accounting conservatism. The competency aspect possessed by independent commissioners in accounting and finance will help improve the oversight function of the company's management performance so that the financial statements produced by the company tend to be conservative.
2. The Audit Committee has no significant positive effect on the application of accounting conservatism or in other words the second hypothesis is rejected. The audit committee often holds meetings it is not certain that the meetings produce good, effective and efficient decisions for the company, in other words the quality of audit committee meetings is not determined by the number of meetings conducted.

3. Financial Distress take effect positive and significant to application of accounting conservatism. Companies that experience a state of financial distress will act cautiously in dealing with the uncertainty of an economic event by increasing the principle of conservatism in its financial reporting.
4. The level of debt is not a significant positive effect on the level of accounting conservatism so the fourth hypothesis is rejected. This is likely because companies always face uncertain economic conditions so that the level of debt does not affect the implementation of accounting conservatism

### **Suggestion**

This research still has some short comings, therefore the suggestions that can be given for further research are as follows:

1. For conservatism calculations other proxy calculations can be used, in addition to the proxy calculations contained in this study. It is better for further research to use a more recent calculation model.
2. Can add several other factors related to the variables presented, such as managerial ownership and company size.
3. Can increase the research sample by increasing the research time span.

## REFERENCE

- Ahmed, A.S., Duellman, S., 2007. Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis, *Journal of Accounting and Economics*
- Agnes, Sawir. 2004. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Altman, E. 1960. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*.
- Almilia, L. S. 2004. "Pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesis yang mempengaruhi tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 7 (2): 237-64.
- Aristiyani, Desak Gede Utami, dan I Gusti Putu Wirawati. 2013 "Pengaruh Debt To Total Assets Dividen Payout Ratio dan Ukuran Perusahaan pada Konservatisme Akuntansi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 3.3, hlm 216-230
- Bahaudin dan Provita, 2011, Mekanisme Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol 7, No. 1. Mei.
- Basu, Sudipta. 1997. The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 24 No. 1
- Brigham, E.F. & Daves, P.R. (2003). *Intermediate Financial Management With Thomson One*. United States Of America: Cengage South-Western.
- Deni Darmawati, Khomsiyah, Rika Gelar Rahayu (2005), "Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8 No.3. hal : 65-81, edisi Januari 2005.
- Fala, Dwiyan A.S., 2007. Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance. Makalah SNA X, Makasar.
- Fitriani, Sonia. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi". *Artikel Ilmiah Universitas Dian Nuswantoro*. 2014.
- Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Givoly, D. and C. Hayn. 2002. Rising conservatism: Implications for financial analysis. *Financial Analyst Journal*
- Haniati, S., dan Fitriany. (2010). Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran

- Konservatisme. Makalah. Paper presented at Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: 1-28.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers
- Hery. (2017). Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta: PT Gramedia.
- Indrayati, Martha Rizki. 2010. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi". Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael, and William Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
- Limantauw, Shirly. 2012. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Sebagai Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol.1 No.1.
- Lo, Eko Widodo, 2005. Pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap Konservatisme akuntansi. Makalah SNA VIII, Solo.
- Marsha, Felicia Dan Imam Ghozali. 2017. Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014). Diponegoro Journal Of Economics Volume 6, Nomor 2, Halaman 1-12.
- Mayangsari, Sekar dan Wilopo, 2002. Konservatisme Akuntansi, Value Relevance dan Discretionary Accruals: Implikasi Empiris Model Feltham-Ohlson (1996). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 5 No. 3 September: 291-310
- Noviantari, Ni Wayan dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2015. Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Konservatisme Akuntansi. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3
- Pramudita, Nathania. (2012). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Dan Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Unika Widya Mandala, Surabaya.
- Putri, A.G. 2017. Pengaruh Financial distress, Risiko Litigasi dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi, JOM Fekon, Vol.4 No.1.